

TESIS

EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT TANGGAPAN WARGA MASYARAKAT LOKAL

(Studi Kasus Pada Dua Desa Di Kabupaten Daerah
Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan)



KK
TS. 28/97

Ala
e

ANDI SAMSU ALAM

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 FEBRUARI 1997**

**oleh
Pembimbing**



**Dr. A. Ramlan Surbakti, MA.
NIP. 130 701 133**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



**Dr. A. Ramlan Surbakti, MA.
NIP. 130 701 133**

**Telah diuji Pada
Tanggal 21 Pebruari 1997**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. H. Soetandyo Wignjoebroto, MPA.
Anggota : 1. Dr. A. Ramlan Surbakti, MA.
2. Dr. Dede Oetomo, MA.
3. Dr. Laurentius Dyson P, MA.
4. Drs. Nyoman Naya Sujana, MA.

Motto:

Tiada Kemenangan:

*** Tanpa Perjuangan yang Tulus,**

*** Tanpa Ridho Allah Swt.**

Kupersembahkan

Buat:

Isteriku tercinta, serta

Anakku yang tersayang

RINGKASAN

Eksistensi otonomi bagi daerah adalah menghendaki adanya hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada Daerah Tingkat II untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di samping aspek pendemokrasian dalam rangka pencapaian kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dati II Gowa Sulawesi Selatan, dengan fokus pada dua desa (perkotaan dan pedesaan). Fokus dan sampel (subjek) penelitian ditentukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan pendekatan *interpretative understanding*.

Penelitian ini mempermasalahkan tiga hal pokok yaitu: *Pertama*, kuantitas dan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah. *Kedua*, Peningkatan penghasilan warga masyarakat lokal. dan *Ketiga*, penyaluran aspirasi dalam rangka memenuhi keinginan dan berbagai kebutuhan warga masyarakat lokal pada dua desa di Kabupaten Dati II Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan, eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal, dari segi pemanfaatannya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat lokal adalah "*belum merata*", antara kehidupan di perkotaan dengan kehidupan di pedesaan.

Pernyataan tersebut terbukti, dari: (1) karakteristik pekerjaan, yaitu kelompok Keluarga PNS/ABRI menilai pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bermanfaat bagi kesejahteraannya, sedangkan bagi kelompok Keluarga yang bukan (non) PNS/ABRI yang dirasakan adalah sebaliknya. (2) segi lokasi, di perkotaan (Kelurahan Pandang-Pandang) adalah pada umumnya warga masyarakat merasakan manfaat pelaksanaan otonomi bagi kesejahteraannya, sedangkan di pedesaan (Desa Je'netallasa) yang dirasakan justeru sebaliknya, yaitu pada umumnya mereka mengatakan otonomi daerah kurang penting bagi peningkatan kesejahteraannya.

Sehingga pada akhirnya dapat dinyatakan, warga masyarakat kota (*urban*) mengatakan pelaksanaan otonomi daerah adalah pada dasarnya penting bagi peningkatan kesejahteraannya, sedangkan bagi warga masyarakat pedesaan (*rural*) mengatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah kurang berpengaruh atau pada dasarnya mereka menganggap kurang penting bagi kesejahteraannya.

A B S T R A C T

Key Words: Local Population Responses to Regional Autonomy Existence

For a region autonomy existence, is a need to existence of right, authority and responsibility of residence to direct and manage their own household. Especially, in execution of government effectively and efficiently, execution of development programs and public service beside democratization aspect in order to achieve welfare for local population.

This research aimed to describe of local population responses on the regional autonomy existence related to the welfare of those local population.

This research carried on Residence of Gowa of South Sulawesi, by focusing to two village (urban and rural). Focus and sample of this research were determined purposively. Data collection was carried on by using interview and observation technique, then analyzed by using *interpretative understanding* approach.

This research argue about three prime point, that is : *First*, the quality and quantity of the service of the Residence, *second*, revenue increasing of local population , and *third*, leading along aspiration in order to fulfill wants and needs of the local population of the both village of Residence of Gowa.

These research results showed, that regional autonomy existence for welfare of local population, in usage aspect for living level of local population was "*not-evenly-yet*", if compared between rural and urban living level.

The above statement was proved by : (1) job characteristic, that group of state employees (PNS) and army (ABRI) family considered that execution of regional autonomy was useful for their welfare, whereas group of another family had adverse valuation. (2) Location aspect, in urban (administrative area of Pandang-Pandang), local population generally considered that execution of regional autonomy was useful for their welfare, whereas in rural (village of Je'netallasa) had adverse valuation, that they generally considered that regional autonomy was less important for increasing their welfare.

Finally, could be stated that basically urban population considered that regional autonomy was important for increasing their welfare, whereas rural population stated that execution of regional autonomy was less important or they basically considered that regional autonomy was less important for their welfare.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat kami selesaikan.

Proses penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat perhatian, bimbingan serta arahan yang tidak henti-hentinya dari Bapak Dr. A. Ramlan Surbakti, M.A. selaku pembimbing. Oleh karena itu sudah selayaknyalah kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga.

Sehubungan dengan proses penyelesaian studi kami pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, maka pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Team Managemen Program Doktor (TMPD) yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga dapat meringankan beban kami dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, selaku Rektor Univrsitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan di Unair Surabaya.

4. Bapak Prof. Dr. H. Soedijono, dr., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
5. Bapak Dr. A.Ramlan Surbakti, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
7. Para Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
8. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur c.q. Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan c.q. Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
10. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa c.q. Kepala Kantor Sosial Politik Daerah Tingkat II Gowa.
11. Para Aparat Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa yang telah memberikan data dalam pelaksanaan penelitian ini.
12. Aparat Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu beserta stafnya dan Aparat Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga beserta stafnya.
13. Warga masyarakat di Kelurahan Pandang Kecamatan Somba Opu dan Warga masyarakat di Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga.

14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana, khususnya rekan-rekan mahasiswa angkatan 1994/1995 Program Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
15. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara moril maupun materil dalam proses studi kami pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu.

Teristimewa kepada Isteri kami tercinta Dra. Andi Kasmawaty Mappedjeppu dan Anak kami yang tersayang Andi Muhammad Wahidien yang telah dengan setia mendampingi kami dalam suka dan duka mulai dari awal sampai dengan akhir studi kami, sehingga proses studi kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, maka selayaknyalah karya tulis ini kepersembahkan kepadanya sebagai tanda terima kasih.

Dan akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik berupa dorongan moril maupun bantuan materil, mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan limpahan rahmatnya, Amiiin.

Surabaya, 5 Februari 1997
Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
Perumusan Masalah	14
Tujuan Penelitian	15
Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
Eksistensi	19
Otonomi Daerah	21
Tanggapan	41
Masyarakat Lokal	46
Kesejahteraan	47
BAB III METODE PENELITIAN	
Sifat Penelitian	56
Definisi Operasional	58
Lokasi Penelitian	61
Subjek Penelitian	64
Pendekatan Penelitian	67
Tehnik Koleksi Data	69
Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	72

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
Gambaran Umum	76
Letak Geografis	77
Keadaan Demografi	79
Keadaan Perekonomian	81
Profil Otonomi Daerah Kabupaten Dati II Gowa.	84
Keadaan Aparatur Pemda Tingkat II Gowa	90
Kelurahan Pandang-Pandang	94
Desa Je'netallasa	98
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
Pelayanan Pemerintah Daerah	103
- Pelayanan di Kelurahan Pandang-Pandang	105
- Pelayanan di Desa Je'netallasa	116
Peningkatan Penghasilan	125
Penyaluran Aspirasi	131
Konsekuensi Pelaksanaan Otonomi Daerah Bagi Masyarakat Lokal Di Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa	136
BAB VI PEMBAHASAN	
Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Warga Masya rakat Lokal	139
Faktor yang Menyebabkan Otonomi Daerah Dianggap Tidak Penting	144
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORI	
Kesimpulan	167
Implikasi Teoritik	170
Implikasi Praktis	184
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN-LAMPIRAN	194

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa	78
Tabel 4.2 : Jumlah Kelurahan dan Desa Setiap Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa...	79
Tabel 4.3 : Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa	80
Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Setiap Kecamatan Kabupaten Dati II Gowa....	81
Tabel 4.5 : Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dati II Gowa	83
Tabel 4.6 : Keadaan Aparatur Menurut Pangkat/Golongan Pada Lingkup Penda Tingkat II Gowa.....	90
Tabel 4.7 : Komposisi Jumlah Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan Karier Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa	91
Tabel 4.8 : Keadaan Aparatur Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa	92
Tabel 4.9 : Jumlah Aparat Berdasarkan Eselon pada Setiap Dinas Kabupaten Dati II Gowa	93
Tabel 4.10: Sarana Pendidikan Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa	95
Tabel 4.11: Sarana Kesehatan Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Dati II Gowa	96
Tabel 4.12: Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Dati II Gowa	98

Tabel 4.13: Sarana Pendidikan Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Dati II Gowa....	99
Tabel 4.14: Sarana Kesehatan Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Dati II Gowa	100
Tabel 4.15: Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Dati II Gowa	102
Tabel 5.1 : Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang Terhadap Waktu Pelayanan	106
Tabel 5.2 : Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang Terhadap Biaya Pelayanan	109
Tabel 5.3 : Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang Terhadap Perilaku Pelayanan	111
Tabel 5.4 : Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang Terhadap Kebutuhan Pelayanan	114
Tabel 5.5 : Tanggapan Masyarakat Desa Je'netallasa Terhadap Waktu Pelayanan	117
Tabel 5.6 : Tanggapan Masyarakat Desa Je'netallasa Terhadap Biaya Pelayanan	119
Tabel 5.7 : Tanggapan Masyarakat Desa Je'netallasa Terhadap Perilaku Pelayanan	121
Tabel 5.8 : Tanggapan Masyarakat Desa Je'netallasa Terhadap Kebutuhan Pelayanan	123
Tabel 5.9 : Tanggapan Masyarakat terhadap Peningkatan Penghasilan Oleh Dinas-Dinas Daerah Tingkat II Gowa	126
Tabel 5.10: Tanggapan Masyarakat Tentang Persentase Penyaluran Aspirasi Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa	132
Tabel 5.11: Tanggapan Masyarakat Tentang Kunjungan Ke Lapangan Oleh Pemda Tingkat II Gowa	134

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 1995, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dati I Sulawesi Selatan Kepada Daerah Tingkat II Gowa	194
Lampiran 2 : Peta Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	203
Lampiran 3 : Peta Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa	204
Lampiran 4 : Peta Wilayah Kecamatan Somba Opu	205
Lampiran 5 : Peta Wilayah Kecamatan Pallangga	206
Lampiran 6 : Surat-Surat Izin Penelitian	207
Lampiran 7 : Surat-Surat Keterangan Selesai Penelitian Pada Dua Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa	214

BAB I**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Demikian pula konsep-konsep dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal pada Daerah Tingkat II di Indonesia.

Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, yakni dimaksudkan sebagai suatu proses perubahan yang berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik.

Hal tersebut searah dengan tujuan Pembangunan Nasional, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, maka sebagai konsekuensi dari suatu negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia adalah tidak tepat lagi kalau sistem pelaksanaan pembangunannya bersifat sentralistis, melainkan sistem yang

paling tepat untuk diwujudkan adalah sistem otonomi yang Nyata dan Bertanggung jawab, kemudian dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dipertegas lagi sebagai Otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.¹

Dengan titik berat Otonomi Daerah yang diletakkan di Daerah Tingkat II yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat. Maka jelaslah, pemberian otonomi pada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

Keberadaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi, merupakan suatu hal yang tidak pernah surut dalam kajian, bahkan akan terus menjadi isu menarik untuk dijadikan agenda setting. Karena desentralisasi merupakan suatu konsep yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah pelayanan sosial di berbagai sektor publik, sehingga dengan demikian diharapkan terjadi efisiensi, efektivitas serta pemerataan dan kesejahteraan warga masyarakat lokal akan cepat bisa terwujudkan.

Demikian juga dari segi konsep, Otonomi itu adalah sangat tepat untuk Daerah (Daerah Tingkat II) karena secara yuridis menghendaki pemberian suatu kewenangan kepada Daerah

¹TAP MPR No. IV/MPR/1978, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dalam Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h. 19.

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, di samping juga harus memperhatikan "aspek pendemokrasian" dalam menyalurkan keinginannya.

Hal tersebut secara yuridis formal dikatakan, kebijakan meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II didasarkan pada pertimbangan, Daerah Tingkat II merupakan Daerah Otonom yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat di daerahnya.

Dengan demikian, dapat menunjang adanya keselarasan dan keserasian antara kegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Sehingga pada akhirnya daerah tidak akan terima jadi dari Pemerintah Pusat, dan pelaksanaan pembangunan daerah lebih berorientasi pada kebutuhan setempat (*bottom up oriented*) yang sesuai dengan kemampuan perencanaan disesuaikan dengan "kebutuhan" bukan berdasarkan kepada "kemauan" yang menjadi landasan pembangunan daerah.

Hal tersebut diperjelas oleh Syarif Saleh, "Otonomi itu sebagai hal mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri, hak mana diperoleh dari

Pemerintah Pusat".²

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan oleh aparat pemerintah daerah tingkat II dapat melaksanakan fungsinya secara efisien dan efektif dalam berbagai kegiatan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada warga masyarakat lokal yang terarah dan berkesinambungan.

Dari sekian tinjauan di atas, dapat diungkapkan tentang perwujudan otonomi daerah, itu merupakan suatu hal yang sangat tepat dan relevan serta banyak didambakan oleh masyarakat pada daerah-daerah tingkat II di Indonesia. Khususnya dalam hal teroperasionalisasinya aspek pendemokrasian, yakni keterlibatan masyarakat (lewat DPRD) untuk berpartisipasi dalam proses dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II.

Namun dibalik dari itu, menurut pengamatan A.F. Lee-mans, tentang penancangan efisiensi sebagai tujuan desentralisasi di berbagai negara berkembang sering menimbulkan kecenderungan dikorbankannya kepentingan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.³ Kecenderungan semacam itu dapat diamati pada struktur, kedudukan dan fungsi DPRD di Indonesia dewasa ini.

²Abdurrahman, (ed), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, (Jakarta: Media Sarana Press, 1980), h. 11.

³Syamsuddin Haris & Riza Sihbudi, (ed), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 63.

Untuk mengantisipasi ungkapan seperti itu, Faisal Siagian mengungkapkan, demi terlaksananya aspek pendemokrasi-an bagi masyarakat, maka aspek keterbukaan sangat diperlukan di tingkat lokal, yang meliputi : (1) terbuka kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk secara bebas mengkritik kebijaksanaan pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk kritik terhadap pola kebijakan pembangunan di daerah, (2) terbuka kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk berbeda pendapat dengan pemerintah pusat, perbedaan mana harus diakomodasikan oleh pemerintah pusat dengan menyerap aspirasi daerah, dan (3) terbuka kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk menolak Kepala Daerah yang kurang berkenang dengan aspirasi daerah.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, di antara sekian banyak fenomena yang ditemukan dari hasil pengamatan dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan otonomi di daerah adalah kebanyakan menyimpang dari pada keinginan konsep otonomi yang sebenarnya.

Berdasarkan pengamatan pada beberapa Daerah Tingkat II, khususnya yang menyangkut dengan pelaksanaan otonomi yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, secara formal Pemerintah Pusat telah menyerahkan beberapa urusan kepada daerah untuk diurus dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah

⁴Faisal Siagian, "Meretas Kepemimpinan yang Demokratis dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia", dalam Analisis CSIS No. 2 tahun 1995, (Jakarta: CSIS, 1995), h. 129.

bersama masyarakatnya.

Tetapi kenyataannya, Pemerintah Pusat masih besar campur tangannya (keterlibatannya) terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan, utamanya dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, yang seharusnya didominasi oleh Daerah Tingkat II, sebagai aplikasi dari aspek pendemokrasian dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan pengamatan tersebut, maka pelaksanaan Otonomi seperti itu, Afan Gaffar mengibaratkan seperti bermain layang-layang, yakni kewenangan diberikan kepada Daerah tetapi kendali tetap dipegang Pemerintah Pusat, layang-layang dapat bergerak sesuai dengan derasnya arus angin dengan menggali atau mengeksploitasi potensi daerah, tetapi kendali tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat.⁵

Hal seperti itu diperkuat dalam suatu hasil penelitian yang sifatnya evaluatif, yakni penelitian tentang suatu evaluasi atas pelaksanaan UU No. 5/1974, yang telah dilakukan oleh Sujanto, tahun 1990. Di antara reviewnya ditemukan, "pengawasan masih merupakan titik lemah dalam proses manajemen pemerintahan di Indonesia sekarang ini--- didapatkan, salah satu penyebab lemahnya otonomi daerah adalah akibat terlalu ketatnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat

⁵Afan Gaffar, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan", dalam Majalah PRISMA Nomor 4 Tahun 1995, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 60.

atas jalannya Pemerintahan Daerah".⁶

Demikian juga dengan aspek pendemokrasian dalam pelaksanaan otonomi daerah, adalah tidak lepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD II) dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, khususnya yang menyangkut kemaslahatan warga masyarakat itu sendiri.

Dari reueiw hasil penelitian yang berkaitan dengan itu, diantaranya dari : (1) Azam Awang, tentang Peranan DPRD Riau 1982-1987 Dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat: Suatu Studi Komunikasi Politik.⁷ (2) Christina Latupapua dkk, Rekrutmen Elite Politik di Maluku: Studi Kasus Pemilihan Gubernur.⁸ dan (3) Sujanto, Studi Evaluasi UU No. 5/1974, Menyangkut Pemilihan Bupati Kepala daerah Tingkat II di Indonesia.⁹

Ketiga hasil penelitian ini pada umumnya menyebutkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD II) sebagai penjelmaan

⁶Sujanto, Perspektif Otonomi Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 47.

⁷Azam Awang, "Peranan DPRD Riau 1982-1987 dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat: Suatu Studi Komunikasi Politik", dalam Jurnal Ilmu Politik Nomor 8, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 93.

⁸Christina Latupapua, dkk., "Rekrutmen Elite Politik di Maluku (Studi Kasus Pemilihan Gubernur)", dalam Berkalah Penelitian Pascasarjana UGM Nomor 4A, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Graduate Research Publication, 1993), h. 441.

⁹Sujanto, Perspektif...., h. 31.

rakyat di daerah, kemandiriannya adalah relatif masih sangat kurang, artinya keterlibatan Pemerintah Pusat masih tinggi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat menentukan karena masyarakat diharapkan di samping sebagai objek juga sekaligus sebagai subjek daripada pembangunan, dan di samping Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Dana (SDD) yang tersedia.

Hal ini relevan dengan review hasil penelitian dari Josef Riwu Kaho, Tentang "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, "... Penyelenggaraan otonomi Daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas dan kapasitasnya"¹⁰

Demikian juga ditambahkan oleh Rozali Abdullah, dalam penelitian Tentang "Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi", tentang kemampuan suatu Daerah Tingkat II untuk melaksanakan hak otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, ditentukan banyak faktor yaitu diantaranya: kemampuan (keuangan, aparatur, organisasi/administrasi, ekonomi daerah, potensi masyarakat, dan demografi). Juga ditemukan faktor utama yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah adalah

¹⁰Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1988), h. 246.

faktor sumber daya manusia yang belum optimal.¹¹

Fenomena lain yang terkait pada Dati II yakni seperti yang dikemukakan TB. Silalahi, dalam pasal 8 Undang-Undang No. 5/1974 disebutkan, diaturnya penyerahan urusan dari Pusat ke Daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP), masalah inilah yang selalu dipermasalahkan oleh Dati II dalam pelaksanaan otonomi di daerah, yaitu diberi urusan tetapi tidak diberi 3P (Personal, Pembiayaan dan perlengkapannya). Bila tidak diserahkan maka hanya beban yang diberikan pada daerah, hal ini akan menjadi masalah yang berat di masa mendatang karena meleset dari tujuan pelaksanaan otonomi.¹²

Dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45 tahun 1992, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II, setidaknya terdapat beberapa indikator/variabel yang berpengaruh yakni kemampuan keuangan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), keadaan daerah, kebutuhan daerah serta yang lainnya.

Adanya kemampuan daerah dengan pokok kemampuan keuangan, merupakan salah satu variabel untuk mempercepat terwujudnya otonomi daerah tingkat II, kemudian ditelaah

¹¹Rozali Abdullah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi", dalam Jurnal Universitas Jambi Nomor 6 Tahun 1994, (Jambi: Publikasi Khusus Universitas Jambi, 1994), h. 1-13.

¹²TB. Silalahi, "Otonomi Daerah Tingkat II, Urusan Siapa?", dalam Markus Rani, Ronald Ngantung (Penyunting), Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 23.

lebih jauh yang dihubungkan dengan aspek lainnya.

Dan adanya keinginan daerah untuk lebih banyak memperoleh otonomi, dalam konteks negara kesatuan agar lebih memiliki kapasitas (*capacity*) termasuk kemampuan keuangan untuk memberi pelayanan kepada warga masyarakat lokal, kalau terlalu disyaratkan akan kemampuan keuangan daerah, maka penambahan urusan dan perwujudan penitlikberatan otonomi di Daerah Tingkat II akan sulit dicapai.

Demikian juga halnya dengan masalah perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, review hasil penelitian dari T. Dzulkarnain Amin, tentang "Tinjauan atas Kebijakan Anggaran di Indonesia Selama Priode Orde Baru", yakni dinilainya terlalu "berat sebelah", dalam arti sumber-sumber yang diberikan kepada daerah adalah tergolong "kurus-kurus" (kecil), sementara jatah untuk Pemerintah Pusat adalah "gemuk-gemuk" (besar).¹³ Sehingga Daerah (Daerah Tingkat II) mengalami hambatan dalam mengembangkan daerahnya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Kelemahan-kelemahan yang bisa dikemukakan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah selama ini, adalah :

Pertama, selama ini pentingnya otonomi daerah bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal hanya

¹³T. Dzulkarnain Amin, "Tinjauan atas Kebijakan Anggaran Negara di Indonesia Selama Periode Orde Baru", dalam Amir Santoso, M. Riza Sihbudi, Politik Pelaksanaan dan Pembangunan, (Jakarta : Dian Lestari Grafika, 1993), h. 146.

diasumsikan, tetapi oleh para peneliti belum pernah ditelaah secara empirik.

Kedua, pada umumnya para peneliti menyoroti dari segi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada akhirnya mereka berkesimpulan, ada beberapa Daerah Tingkat II di Indonesia yang tidak mampu berotonomi dan demikian juga sebaliknya.

Ketiga, ada juga beberapa peneliti cuma memfokuskan diri pada penelitian tentang dominannya keberadaan (turut campurnya) Pemerintah Pusat terhadap aktivitas Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pelaksanaann otonominya, khususnya dalam menangani urusan-urusan yang secara formal telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II setempat dan serba terbatasnya wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menangani kekayaan yang memiliki nilai ekonomi potensial di daerahnya.

Sementara di sisi lain menurut pengetahuan kami, ada faktor yang sangat prinsipil selama ini belum ada penelitian yang spesifik mengungkapkannya, yaitu tentang hakikat dan tujuan otonomi daerah terhadap kehidupan warga masyarakat lokal pada daerah tingkat II, yang intinya dapat dikatakan, otonomi daerah dititikberatkannya pada daerah tingkat II adalah untuk menjamin peningkatan pelayanan, kesejahteraan disamping aspek pendemokrasian terhadap kehidupan warga masyarakat lokal pada Daerah Tingkat II di Indonesia.

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, dapat

menjadi acuan bagi kami untuk menentukan posisi pelaksanaan penelitian ini, yang intinya tentang "apakah pelaksanaan otonomi daerah betul atau tidak dirasa penting atau bermanfaat bagi kehidupan warga masyarakat lokal". Dan lebih jelasnya lihat rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah "EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT TANGGAPAN WARGA MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus Pada Dua Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan)".

Kemudian dengan berdasar pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, yang umumnya berfokus pada Paradigma "*Fakta Sosial*", yang intinya dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut yaitu berupaya untuk mencocokkan tentang apa yang telah diketahui dengan data yang telah diperoleh di lapangan penelitian.

Demikian juga kalau disimak secara seksama, di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kajian yang terfokus pada "Studi tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Daerah Tingkat II" khususnya di kabupaten Dati II Gowa Sulawesi Selatan, adalah nampaknya belum pernah dilakukan, olehnya itu permasalahan tersebut, kami menilai valid untuk diteliti kemudian dianalisis lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan Paradigma "*Definisi Sosial*", yaitu dalam opera-

sionalnya berupaya mencocokkan tentang apa yang telah diketahui dengan perilaku manusia sebagai subjek dalam penelitian ini, yakni berfokus pada upaya untuk memahami tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap keberadaan atau pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraannya, hal ini dapat diketahui dengan melalui sikap dan pandangan mereka (masyarakat) dalam menanggapi hal ikhwal pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Adapun dasar pendekatan yang dipergunakan dalam mengoperasionalkan penting atau tidak pentingnya pelaksanaan otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal adalah pendekatan objektif (*etik*), yaitu peneliti yang menyusun sistem kategori yang logis.

Kemudian operasionalnya, dilakukan pengelompokan, dan satuan-satuan tanpa mempedulikan struktur yang ada dalam bahasa perorangan, dengan cara: (a) mengelompokkan secara sistematis seluruh data yang dapat diperbandingkan, ke dalam sistem tunggal, (b) menyediakan seperangkat kriteria untuk mengklasifikasikan setiap unsur data, (c) mengorganisasikan data yang telah diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe, (d) mempelajari, menemukan, dan menguraikan setiap data baru yang ditemukan ke dalam kerangka sistem yang telah dibuatnya dari data yang ditemukan.¹⁴

¹⁴Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 53.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan munculnya pendapat-pendapat secara subjektif (*emik*) dari warga masyarakat lokal yang sifatnya insidental tentang keberadaan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan.

Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah: Tanggapan warga masyarakat lokal tentang "Seberapa pentingkah Otonomi Daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan" .

Kemudian secara rinci, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini:

1. Bagaimanakah tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah bagi peningkatkan kesejahteraannya, yang meliputi tiga aspek:
 - Pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - Peningkatan penghasilan masyarakat; dan
 - Penyaluran aspirasi warga masyarakat lokal?.
2. Konsekuensi logis apakah yang ditimbulkan dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain :

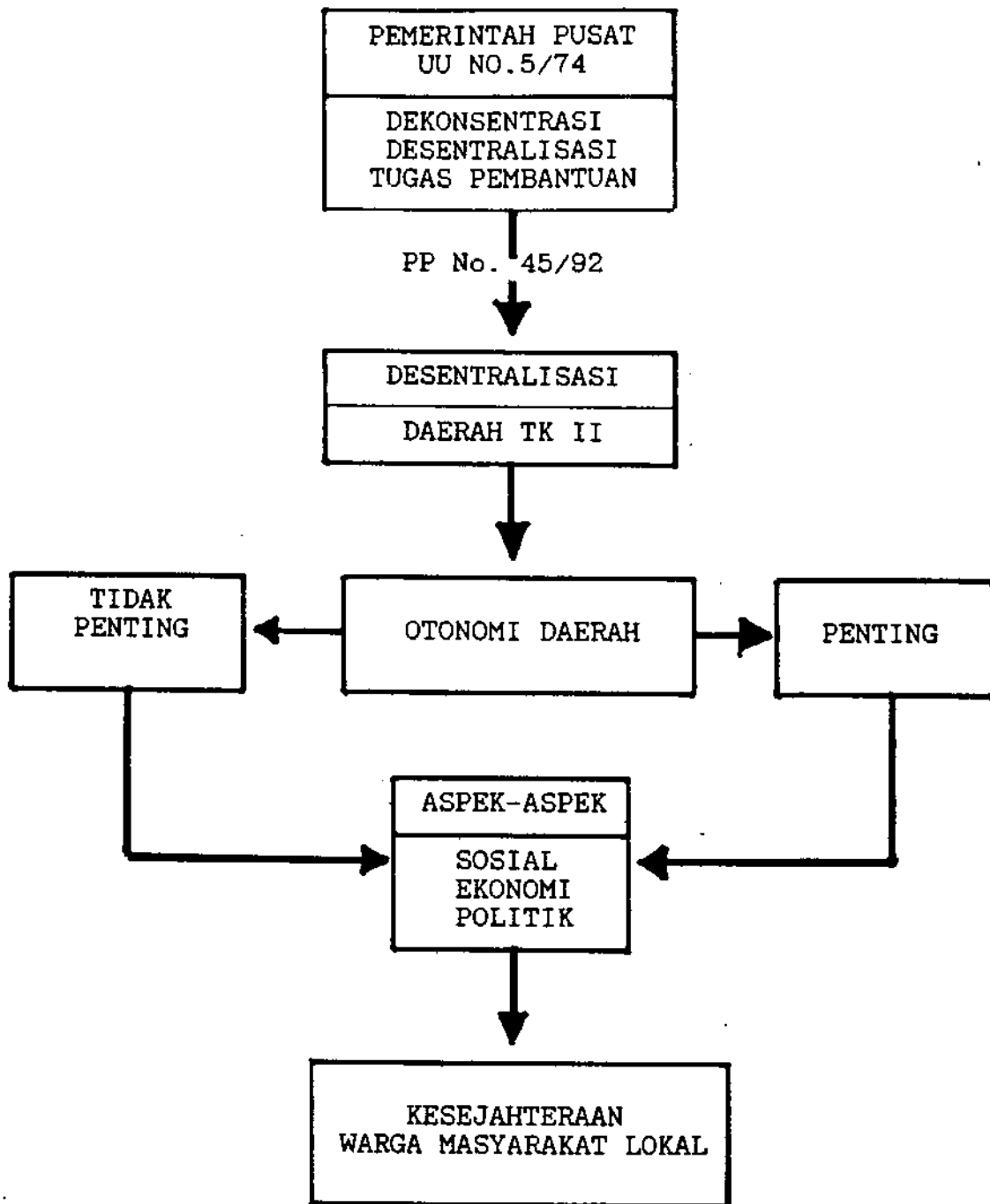
1. Untuk dapat mendeskripsikan dan memahami tentang apakah pelaksanaan Otonomi Daerah dirasa penting bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal di perkotaan maupun di pedesaan, khususnya yang berkaitan dengan :
 - Pemberian pelayanan kepada warga masyarakat lokal;
 - Peningkatkan penghasilan dari pekerjaan;
 - Terjaminnya penyaluran aspirasi warga masyarakat lokal;
2. Untuk dapat mendeskripsikan dan memahami tentang tanggapan dan pandangan warga masyarakat lokal pada dua desa kasus terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
3. Untuk dapat mendeskripsikan dan memahami secara detail tentang konsekuensi logis yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan otonomi daerah pada Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa Kabupaten Daerah Tingkat II Guwa Sulawesi Selatan.

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat menambah wawasan keilmuan, utamanya dalam pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial terhadap segala aspek kehidupan manusia. Juga terhadap pihak yang berminat mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat lebih dicermati tentang di mana celah-celah yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan, dalam rangka pemenuhan hakikat dan tujuan pelaksanaan otonomi yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lokal pada Daerah Tingkat II Gowa khususnya dan Daerah-Daerah Tingkat II di Indonesia pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam kepada warga masyarakat lokal setempat, agar mereka dapat mengetahui seberapa jauh manfaat pelaksanaan otonomi daerah bagi kehidupannya, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kemaslahatan masyarakat pada umumnya, dalam hal pelayanan yang diterima, peningkatan penghasilan dan kualitas kerja, serta panyaluran aspirasi dari segala keinginan dan kebutuhan warga masyarakat lokal di Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan.

SKEMATIK PERMASALAHAN



Keterangan :

1. UU No. 5/1974 tentang: Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. PP No. 45/1992 tentang: Pelaksanaan Desentralisasi (Otonomi Daerah) dititikberatkan pad Daerah Tingkat II.

→ : Memunjukkan arah kebijaksanaan dan kegiatan otonomi daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan landasan teoritis yang berkaitan dengan: eksistensi, otonomi daerah, tanggapan, dan masyarakat lokal serta kesejahteraan. Sehingga dengan demikian terungkap keterkaitan antara otonomi daerah dengan kesejahteraan warga masyarakat lokal, khususnya di Daerah Tingkat II Gowa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma "*Definisi Sosial*", yakni berupaya untuk mencocokkan tentang "apa yang diketahui dengan perilaku manusia" di lapangan. Dengan berfokus pada "seberapa pentingkah otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal", khususnya tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraan.

Paradigma definisi sosial merupakan salah satu bagian dari teori sosial mikro, yang menguraikan tentang bagaimana pelaku (aktor) mendefinisikan situasi-situasi kemasyarakatan dan bagaimana pula definisi ini kemudian membawa efek pada aksi dan interaksi dalam masyarakat. Kemudian dalam paradigma ini tergolong teori-teori mikro seperti teori aksi (tindakan), interaksionisme simbolik, etnometodologi, dan teori-teori yang didasari oleh filsafat fenomenologis maupun

eksistensialisme.¹⁵

Dalam operasionalisasi penelitian ini, yang dijadikan sebagai dasar adalah salah satu bagian dari paradigma definisi sosial tersebut, yaitu teori aksi (tindakan) sosial. Hal ini erat sekali kaitannya dengan pendapat "Max Weber", bahwa secara sosiologis manusia senantiasa berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Maka dalam hal ini tercakup dua konsep yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman.¹⁶

Dan oleh karena itu, masyarakat berbuat dan bertindak serta menilai suatu kenyataan yang ada disekitarnya, dilandasi dengan suatu pemahaman secara cermat dan mendalam, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengatakan penting atau tidaknya sesuatu (otonomi daerah) itu bagi kehidupannya.

Eksistensi

Kata eksistensi dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris dinyatakan, "eksistence" (*ig'zistens*), adalah keadaan yang menunjukkan adanya suatu kehidupan, adanya suatu wujud seca

¹⁵Dede Oetomo, Teori Sosial Mikri, dalam Penataran Dasar Teori dan Metodologi Ilmu Sosial, 1994, (Surabaya: Balai Kajian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Fisip Unair, 1994), h. 2.

¹⁶George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1992). h. 44.

ra nyata dalam kehidupan manusia.¹⁷

Demikian juga dalam teori sosial, Max Weber melihat bahwa prinsip eksistensial ada banyak sekali nilai yang dapat dipilih untuk dihayati oleh individu dalam rangka meneguhkan nilai-nilai atau makna terhadap apa yang dihadapi oleh manusia. Sehingga manusia (masyarakat), sampai pada taraf tertentu harus memilih nilai-nilainya dan memutuskan sendiri bagaimana tindakan-tindakannya menjadi rasional serta tidak mengesampingkan sikap emosional dan prinsip tradisional yang dimilikinya.¹⁸

Dengan dasar tersebut di atas, maka "eksistensi" yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah keberadaan suatu konsep otonomi, yang menunjukkan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada warga masyarakat lokal. Maka titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di Daerah Tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah di arahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga

¹⁷E. Pino dan T. Wittermans, Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia dan Indonesia Inggris), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), h. 144.

¹⁸Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 210.

masyarakat lokal, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dan meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kepada warga masyarakat lokal, peningkatan stabilitas serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab tersebut.

Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah yang selama ini dikenal dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia bukan atau tidak identik dengan konsep otonomi yang dilaksanakan pada negara-negara lain seperti negara Amerika Serikat, Filipina, Palestina dan lain-lainnya, melainkan otonomi yang dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri yang diselenggarakan di daerah dalam wilayah negara kesatuan.

Lebih jelasnya dapat dikemukakan, bahwa Otonomi daerah berasal dari dua kata yakni Otonomi dan Daerah, untuk itu dapat dijelaskan: "Otonomi" secara etimologi berasal dari bahasa latin, "Autos" berarti sendiri, dan

"*Nomos*" yang berarti aturan.¹⁹

Jadi "Otonomi" menurut Ateng Syafruddin, adalah suatu yang mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*), kebebasan yang terbatas atau kemandirian merupakan wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.²⁰

Sedangkan menurut E.Utrech dalam M. Solly Lubis, bahwa dalam suatu negara kesatuan yang didesentralisasikan, terdapat daerah-daerah yang memerintah daerahnya yang diberi wewenang mengatur rumah tangganya, daerah itu disebut "swatantra" atau "otonomi".²¹ Sementara menurut The Liang Gie, Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan kelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan tertentu.²²

Sedangkan pengertian "*Daerah*" menurut J. Wajong, adalah sebagai berikut:

"Badan hukum public wadah pemerintahan daerah atau organisasi pemerintahan se daerah yang disebut "Propinsi/Kotamadya" (Daerah Tingkat I), Kabupaten/Kotamadya (Daerah Tingkat II), dan Kecamatan/Kotapraja

¹⁹Abdurrahman, (ed), Beberapa..., h. 9.

²⁰Idem. h. 12.

²¹M. Solly Lubis, SH., Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Di Daerah, (Bandung: Alumni, 1985), h. 11

²²Idem, h. 17.

(Daerah Tingkat III)".²³

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pasal 1 ayat (e) "*daerah*" adalah :

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Maka pengertian "*Otonomi Daerah*" dalam pasal 1 ayat (c) Undang-Undang No. 5/1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, adalah : "Suatu hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".²⁵

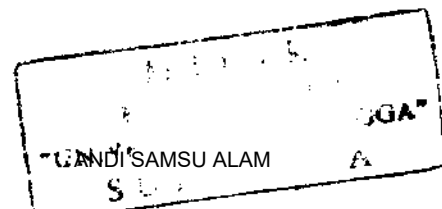
Bayu Surianingrat, melihat secara kepustakaan tentang beberapa jenis otonomi, yang dilihat dari sistim yang dianut, yaitu antara lain:

- a. Otonomi materil, urusan diserahkan menjadi urusan rumah tangga. Urusan tersebut secara tegas, pasti, diberi batas-batas (*limitative*), "zakelijk" dan dalam prakteknya penyerahan ini dilakukan dalam UU Pembentukan Daerah yang bersangkutan.
- b. Otonomi formal, otonomi adalah sebaliknya dari oto

²³J. Wajong, Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. (Jakarta: Djambatan, 1975), h. 25.

²⁴Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, (Surabaya : Arloka, 1994), h. 7.

²⁵Idem.



nomi materiil. Urusan yang diserahkan tidak dibatasi dan tidak "zakelijk". Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menurut pandangannya adalah kepentingan daerah, untuk kemajuan dan perkembangan daerah. Batasnya ialah, bahwa daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Selain daripada itu pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

- c. Otonomi riil, sistim ini dapat dikatakan kombinasi atau campuran otonomi materiil dan otonomi formal. Di dalam undang-undang pembentukan daerah, Pemerintah Pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Penyerahan ini merupakan otonomi materiil. Kemudian setiap waktu daerah dapat meminta tambahan urusan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah.²⁶

Selanjutnya, otonomi daerah secara operasional mencakup pengertian, mengenai daerah mempunyai:

1. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan
3. Kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari konsepsi otonomi tersebut, maka dapat dikatakan otonomi pada dasarnya menunjukkan adanya kebebasan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan preferensinya. Selain itu, otonomi daerah tidak merupakan salah satu perwujudan dan praktek delegasi wewenang dan tanggung jawab dari organ

²⁶Bayu Surianingrat, Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa, (Jakarta: Dewaruci Press, 1981), h. 18-19.

Pemerintah di atasnya kepada organ Pemerintah di bawahnya.

Pencanangan konsepsi itu sendiri dimaksudkan untuk lebih memungkinkan terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah. Dasar pemikirannya adalah Daerah Tingkat II lebih langsung berhubungan dengan masyarakat juga lebih memahami aspirasi warga masyarakat lokal serta lebih mengetahui potensi yang dimiliki ataupun kendala yang dihadapi.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Muhammad Hatta dalam tulisannya tentang "Demokrasi dan Otonomi", yang intinya adalah:

"Memberikan otonomi kepada daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktiviteit. Auto-Aktiviteit artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya auto-aktiviteit tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, y.i. pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri".²⁷

Kemudian dalam perkembangan kehidupan nasional, pelaksanaan titik berat otonomi daerah tingkat II tidaklah lagi semata-mata merupakan persoalan pelaksanaan peraturan formal, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, hal ini disebabkan sebagai upaya memelihara keseimbangan pembangunan nasional.

²⁷The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia, Jilid III, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 98.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka oleh Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II di seluruh Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan titik berat dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, maka pengaturan prosedur penyerahan urusan pada Daerah Tingkat II pada prinsipnya dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dengan memberikan kepada Daerah wewenang dan Tanggung jawab, yaitu prakarsa menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan. Olehnya itu dalam setiap wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan pada tujuan otonomi itu sendiri, yaitu memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi, dengan pelaksanaan otonomi di Daerah Tingkat II, adalah sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan berwibawa serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lokal pada umumnya.

Dan memang pada dasarnya tujuan, prinsip dan hakikat pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Untuk mendukung pernyataan seperti itu, maka kami memilih salah satu teori yang dianggap relevan yaitu *Teori Idealisme*, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog kontemporer Amerika. Parsons mengemukakan, inti setiap masyarakat adalah jalinan makna, kepercayaan dan nilai yang dianut bersama. Kepercayaan dan nilai suatu masyarakat dapat membentuk struktur cara-cara dasar mereka dalam memandang dan mengorganisasikan kehidupan sosialnya.²⁸ Kemudian ditambahkan oleh Weber, bahwa semakin rasional tindakan sosial atau tindakan masyarakat itu maka semakin mudah difahami oleh orang lain.²⁹

Sebagai operasionalisasi dari pada teori idealisme tersebut, maka manusia dalam beraktivitas pada dasarnya menghendaki suatu kenyataan yang dihadapi itu adalah sesuai dengan apa adanya (seharusnya). Kalau prinsip seperti itu ditaati sepenuhnya, maka jika diperumpamakan dengan asumsi dasar dalam penelitian ini, yang intinya dikatakan: "pelaksanaan otonomi daerah adalah penting bagi kesejahteraan

²⁸Stepen K. Sanderson, Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 6.

²⁹George Ritzer, Sosiologi, h. 47.

warga masyarakat lokal", adalah dapat terkabulkan bagi kehidupan masyarakat yang berlangsung dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, adalah sangat tepat karena keinginan Pemerintah bersama masyarakat lokal pada Daerah Tingkat II untuk : (1) berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun rencana, pelaksanaannya), (2) memiliki alat pelaksana sendiri yang qualified, (3) membuat pengaturan sendiri, biasanya dengan bentuk Peraturan Daerah, (4) menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak, retribusi dan lain-lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁰

Maka jelaslah, otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada warga masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal tersebut juga relevan dengan ungkapan Ramlan Surbakti, dalam Formula "titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II", kalau dilaksanakan secara konsisten (tak hanya kewenangan implementasi tetapi juga membuat kebijakan), dan Pememrintah Daerah Kabupaten/Kodya hanya menyelenggarakan otonomi daerah (tidak lagi memegang

³⁰A.W.Widjaja, Titik Berat Otonomi pada daerah Tingkat II, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), h. 32.

jabatan wakil pusat di daerah).³¹

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka diper-
tegas oleh H. Sumitro Maskun (Dirjen PUOD Depdagri), sebe-
narnya otonomi daerah dilaksanakan di daerah tingkat II
karena mempunyai empat tujuan (sasaran), antara lain: (1)
peningkatan ekonomi masyarakat, (2) meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat (*publik service*), (3) meningkatkan sosial
budaya masyarakat, dan (4) untuk demokratisasi.³² Yang
selalu menghendaki suatu sistem birokrasi memuat demokra-
tisasi, karena tujuan otonomi untuk masyarakat maka suara
masyarakat selayaknya didengar, dan DPRD akan lebih efektif
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, maka sebenarnya
kehidupan berotonomi hendaknya dilihat dari tiga dimensi,
yakni (1) otonomi selalu dikaitkan dengan peningkatan kapa-
sitas atau demokratisasi kehidupan politik yang memungkinkan
masyarakat bisa berpartisipasi, (2) yang selalu menjadi
tema, otonomi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efek-
tivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (3) otonomi
dalam rangka mendukung satu negara-bangsa Indonesia.³³

³¹Ramlan Surbakti, *Pertumbuhan Kota dan Struktur Politik*, dalam *Analisis CSIS Tahun XXV No. 1, 1996*, (Jakarta: CSIS, 1996), h. 27.

³²H. Sumitro Maskun, "Otonomi Daerah adalah Program Pemerintah", dalam *Majalah PRISMA Nomor 4 Tahun 1995*, h. 43.

³³Afan Gaffar, *Otonomi*, h. 61.

Jadi kalau diperhatikan lebih jauh tentang proses perencanaan yang bermuara kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka keikutsertaan dan keterlibatan rakyat secara otomatis adanya.

Hal seperti itu dilakukan oleh warga masyarakat lokal bisa secara langsung, juga boleh diwakili dalam hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Setempat, tetapi dengan catatan mereka benar-benar bisa mewakili rakyat, bukan sekedar simbol saja.

Dengan dasar seperti itu, sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah yang berorientasi pada pembangunan, maka pelaksanaan otonomi yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab adalah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah adalah menjunjung aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
- b) Pemberian otonomi kepada daerah merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c) Azas Desentralisasi dilaksanakan benar-benar dengan azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan azas Tugas Pembantuan.
- d) Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
- e) Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan

politik dan kesatuan bangsa.³⁴

Sehingga dapat tercapai pengurangan beban di pundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepada instansi pemerintah yang terkait.

Sehubungan dengan beberapa pernyataan tersebut di atas, maka untuk lebih aplikatifnya sehingga sasaran atau tujuan-tujuan yang dikehendaki kaitannya antara eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal, oleh Hinkle dengan Teori Aksinya, dikemukakan tujuh asumsi fundamental, yaitu sebagai berikut :

- (1) Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
- (2) Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
- (3) Dalam bertindak manusia menggunakan cara, tehnik prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
- (4) Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya.

³⁴Abdurrahman, (ed), Beberapa...., h. 109.

- (5) Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya.
- (6) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan, dan
- (7) Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian tehnik penemuan yang bersifat subjektif seperti metode *verstehen*, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).³⁵

Selanjutnya untuk merealisasikan konsep tersebut, maka Parsons mengemukakan unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Adanya individu selaku aktor.
- (2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
- (3) Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
- (4) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu, misalnya jenis kelamin dan tradisi.
- (5) Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan, contohnya kendala kebudayaan dan lain-lain.³⁶

Ekspresi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang tersedia, dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan (kesejahteraan) masyarakat lokal.

³⁵Ritzer, *Sosiologi*..., h. 53-54.

³⁶*Idem*, h. 57.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Iglesias menyebutkan 5 faktor yang saling terkait dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di Daerah Tingkat II, yaitu sebagai berikut:

- (a) Resources... include generally human (e.g. program personel) as well as non-human components (funding, physical plant and equipment, material, etc.);
- (b) Structure. This refers to certain stable organizational roles and relationships which are program relevant and either prescribes legally or informally by convention at both;
- (c) Technology. Refers broadly to knowledge and behavior essentially for the operation of the organization and more specifically to knowledge and practices required by or essential to the program itself;
- (d) Support. Refers to the whole range of actual or potentials roles and behavior of persons and entities which tend to promote the attainment of certain organizational goals;
- (e) Leadership... is the dominant faktor... in terms of its ability to alter and modify the critical inputs...³⁷

Sehingga dengan demikian, efektivitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan banyak dipengaruhi oleh kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam mengkoordinir dan mengoperasionalkan kebijaksanaan dan strategi nasional untuk daerahnya. Pemerintah Daerah Tingkat II mempunyai posisi yang penting dalam jaringan organisasi pemerintahan karena jaraknya yang lebih dekat kepada masya-

³⁷Gabriel U. Iglesias, *Implementation: The Problem of Achieving Results*, dalam Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi...*, h. 59.

rakat yang akan dilayani.³⁸

Maka pelaksanaan otonomi daerah pada Daerah Tingkat II, dapat termanifestasikan, dan wujud nyatanya dapat dilihat dari hasil kerja oleh sejumlah aparat pemerintahan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, adapun aparat yang dimaksudkan yang sekaligus berfungsi sebagai aparat daerah otonom, yaitu antara lain :

1. Kepala Daerah

Kepala Daerah (daerah tingkat II) merupakan salah satu unsur dari Pemerintah Daerah, dan dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom dan fungsi sebagai Kepala Wilayah, maka dapatlah disimpulkan, pada hakikatnya Kepala Daerah adalah berkedudukan sebagai alat Pemerintah Daerah dan juga sebagai alat Pemerintah Pusat. Tetapi dalam hal ini, Kepala Daerah fungsinya dilihat sebagai Kepala Daerah Otonom.

Pada daerah-daerah tertentu, Kepala Daerah dibantu seorang Wakil Kepala Daerah, karena jabatan dan statusnya maka keberadaannya identik dengan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepala Daerah memerlukan suatu sarana yaitu hak. Dan pelaksanaan hak

³⁸Azhar Kasim, Koordinasi antara Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Instansi-Instansi Vertikal: Studi Kasus Kabupaten Dati II Bogor, Jawa Barat, dalam Bisnis & Birokrasi Nomor 1/Volume I/April 1993, (Jakarta: Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UI, 1993), h. 65.

menimbulkan wewenang dan kewajiban, yaitu: (1) Kepala Daerah menurut hirarkhi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, (2) Kepala Daerah juga berkewajiban memberikan keterangan pertanggung-jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD II)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu unsur dari Pemerintah Daerah, dan juga sekaligus sebagai mitra Kepala daerah.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan adanya hak "prakarsa" dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, maka Rancangan-rancangan Peraturan Daerah tidak hanya dibuat oleh Kepala Daerah saja, tetapi dapat pula dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun hak "prakarsa" dari pada DPRD ini adalah sangat langka diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Badan Pertimbangan Daerah

Untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam rangka melakukan tugas dan kewajibannya, di tiap-tiap daerah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

unsur Fraksi-Fraksi yang belum terwakili dalam Pimpinan Dewan Rakyat Daerah.

Jadi tugas Badan Pertimbangan Daerah adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik diminta maupun tidak diminta.

4. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Daerah.

Sekretariat Daerah Tingkat II diintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Dengan demikian, maka Sekretariat Daerah adalah Sekretariat yang membantu Kepala Daerah Otonom dan Kepala Wilayah Administratif. Dengan pengintegrasian (penyatupaduan) Sekretariat ini, maka dapatlah diharapkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pekerjaan dan dapat pula dicegah kesimpangsiuran yang tidak perlu.

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

6. Dinas-Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, didalamnya terdapat sejumlah aparat yang memiliki berbagai ketrampilan khusus sebagai pelaksana unit-unit kerja tertentu. Pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas Daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-Dinas Daerah itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Secara operasional, Dinas Daerah merupakan unsur yang berhubungan langsung dengan jenis-jenis urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat. jadi keberadaan Dinas-Dinas Daerah adalah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dinas-Dinas Daerah yang dimaksudkan antara lain: (1) Pertanian Tanaman Pangan, (2) Perikanan, (3) Peternakan, (4) Pendapatan Daerah, (5) Kebersihan dan Pertamanan, (6) Perindustrian, (7) Perdagangan, (8) Sosial, (9) Koperasi dan Pengusaha Kecil, (10) Pengairan, (11) Bina Marga, (12) Ke

hutan dan Konservasi Tanah, (13) Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJ), (14) Perkebunan, (15) Pendidikan dan Kebudayaan, (16) Kesehatan, (17) Pertambangan, (18) Tata Ruang, (19) Bangunan, (20) Pasar, (21) Kependudukan dan Catatan Sipil, (22) Pembangunan Masyarakat Desa, (23) Pariwisata, dan (24) Tenaga Kerja.³⁹

7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Suatu badan yang menghendaki suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Dan bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Badan Usaha Milik Daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tersendiri yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II, seperti Perusahaan-Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa (a) dalam rangka usaha peningkatan

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1995, dan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 5 tahun 1995, Tentang Pembentukan dan Pengesahan Dinas-Dinas Daerah Tingkat II Gowa, (Ujung Pandang: Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1995), h. 15.

keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, dan (b) dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih meyeluruh, terarah dan terpadu.

BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

9. BP-7 Daerah

Suatu Badan yang bertugas untuk membudayakan dan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di tingkat daerah.

Badan ini, merupakan suatu perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan mental dan moral warga masyarakat lokal di Daerah Tingkat II. Sehubungan dengan implementasi tugas badan ini, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.

10. Pegawai Daerah

Pegawai Daerah merupakan personal yang ditempatkan pada Dinas-dinas daerah, yang disesuaikan dengan bidang

keahlian yang mereka miliki masing-masing. Namun Pegawai Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kadang-kadang mereka tidak tahu menempatkan diri, artinya di dalam pelaksanaan beban tugas yang perlu diselesaikan kadang-kadang mereka tidak mengetahui atau mampu membedakan antara tugas daerah otonom atau tugas wilayah administratif.

Kemudian pendukung utama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah anggota masyarakat, dalam hal ini warga masyarakat lokal yang dijadikan sebagai subjek dalam rencana penelitian ini, karena keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan dari partisipasi warga masyarakat dan sekaligus dapat menikmatinya.

Selanjutnya dapat digambarkan, kemampuan Otonomi Daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) Tingkat II adalah penjumlahan PAD dan penerimaan PBB. Peningkatan PADS memiliki arti yang sangat strategis, baik bagi kepentingan Daerah Tingkat II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya maupun kepentingan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan di daerah.

Dengan demikian, maka pelaksanaan otonomi pada dasarnya mengarah kepada segala daya dan upaya yang diperuntukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dari itu, sering ditemukan pelaksanaan otonomi daerah tidak sesuai dengan proporsi yang sebenarnya.

Tanggapan

Tanggapan secara umum adalah proses di mana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu di dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi daya inderanya.

Pernyataan seperti itu mengandung makna, seseorang yang mempunyai tanggapan luas dan berkualitas tinggi akan terlihat dari kesanggupannya memandang, memahami dan menilai berbagai masalah yang dihadapinya dengan baik.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, secara singkat J.S.Badudu mengatakan, Tanggapan adalah Penilaian atas sesuatu: Penilaian seseorang terhadap keputusan pemerintah itu yang sesuai dengan panca inderanya.⁴⁰ maka *tanggapan* masyarakat yang dimaksudkan adalah pengetahuan, dan penilaian warga masyarakat lokal yang dilakukan secara sadar tentang pelaksanaan otonomi daerah di daerahnya, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan yang mereka rasakan.

Untuk itu, prinsip yang dimiliki oleh masyarakat lokal adalah dalam rangka menanggapi dan menilai sesuatu biasanya dilakukan secara bertahap, seperti penerapan pelayanan Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat bagi peningkatan kesejahteraannya yakni mereka terlebih dahulu mengetahui, mencermati, menilai kemudian mengungkapkannya, demikian

⁴⁰J.S.Badudu & Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 1005.

juga terhadap hal-hal lainnya yang terkait.

Tanggapan warga masyarakat lokal tersebut, diungkapkan dengan berdasar pada realitas sosial dari hasil pengamatan langsung di lapangan demikian juga terhadap perilaku sosial yaitu perilaku yang dinampakkan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas-Dinas Daerah.

Selain itu, tanggapan tersebut juga berdasarkan pada "Opini" yaitu suatu pendirian, pikiran dan pendapat serta pengalaman atau yang dirasakan langsung oleh subjek penelitian atau warga masyarakat lokal pada dua Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Selanjutnya lebih tepat lagi, jika dalam penelitian ini kami memegang prinsip, manusia (masyarakat) itu berpikir dan bertindak kemudian menilai serta menanggapi tentang pelaksanaan otonomi daerah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraannya adalah sesuai dengan akalinya (rasionalitas). Jadi tindakan manusia (masyarakat) untuk menilai sesuatu adalah atas dasar pertimbangan yang baik dengan kenyataan-kenyataan yang dialaminya.

Sehubungan dengan tanggapan warga masyarakat lokal dalam menilai pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraan, yakni dengan cara mengetahui dan mencermati secara mendalam dengan cara mengamati segala tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya yang berkenaan dengan fokus penelitian ini.

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa Kepala Daerah bersama

DPRD yang merupakan partner kemitraan dalam melaksanakan dan memperjuangkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pernyataan seperti ini, warga masyarakat menilai apakah betul demikian atau tidak?, maka penilaian yang tepat untuk dilakukan adalah penilaian yang mencakup secara keseluruhan dari segala aktivitas yang dilakukam Pemerintah Daerah tersebut.

Kemudian masyarakat lokal menjawab hal-hal yang telah dicermati tersebut dengan bentuk aktivitas atau tingkah laku yang digambarkan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam hal ini yang berhubungan penting atau tidak pentingnya pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat lokal di Daerah Tingkat II.

Dengan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka Weber mengemukakan, tindakan individu dibedakan menjadi empat jenis, antara lain:

Pertama, Rasional-instrumental (*Zwerk Rational*), adalah tindakan sosial yang menandakan diri pada pertimbangan-pertimbangan secara rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya, atau suatu tindakan sosial yang ditujukan untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan menggunakan dana dan daya semaksimal mungkin pula.

Kedua, Rasionalitas yang berdasarkan pada nilai (*Werk rational*), adalah tindakan sosial yang rasional dengan menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu-

tu, bisa nilai etis, estetis, keagamaan atau pula nilai-nilai lainnya.

Ketiga, Tindakan yang berdasarkan tradisi (*Traditional action*), adalah tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau. Tradisi dalam pengertian ini adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau (didasarkan pada hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat.

Keempat, Tindakan emosional (*Affectual action*), adalah tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional, tindakan ini tanpa campur tangan intelektual atau tindakan di luar kesadaran.⁴¹

Sehingga dengan demikian, Weber mengatakan tindakan antar hubungan sosial disebut sebagai tindakan antara beberapa individu yang berbeda-beda di dalam suatu kelompok, yang masing-masing mempunyai motivasi sendiri-sendiri yang bersifat subjektif, dan yang saling diarahkan kepada satu sama lainnya.⁴²

Kemudian Weber lebih menegaskan, tidak semua tindakan sosial individu dapat dipahami, pemahaman tindakan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan tingkat rasionalitasnya. Semakin rasional suatu tindakan maka akan semakin mudah

⁴¹Harry Elmer Barnes, An Introduction to the History of Sociology (Chicago: University of Chicago Press, 1948), h. 300.

⁴²George Ritzer, Sosiologi...., h. 48.

tindakan itu dipahami, demikian pula sebaliknya. Tingkat rasional suatu tindakan dapat diketahui adalah melalui suatu tindakan yang didasarkan pada tingkat kesadaran yang berupa pertimbangan tentang tujuan suatu tindakan dan cara tindakan itu dilakukan oleh pelakuknya.

Dan lebih diperjelas oleh Max Weber, untuk memahami kehidupan sosial tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan melalui "pengamatan" terhadap struktur dan pranata sosial saja, sebagaimana dianjurkan Durkheim. Oleh karena kehidupan sosial terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, maka tindakan individu inilah yang harus menjadi titik tolak analisa tentang kehidupan sosial.

Sangat tepat, apabila hasil amatan tersebut, dilanjutkan dengan memakai kerangka teori tindakan sosial, oleh Weber yang membedakan dua jenis tindakan individu, yaitu (1) tindakan sosial, adalah tindakan individu yang bermakna subjektif (dilakukan dengan motivasi yang bersifat pribadi), dan diarahkan kepada tindakan orang lain; baik diarahkan kepada tindakan yang telah lalu, yang baru berlangsung, maupun tindakan yang diharapkan pada waktu yang akan datang, dan (2) bukan tindakan sosial adalah segala tindakan yang tidak diarahkan kepada tindakan orang lain.⁴³

⁴³Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern I, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h. 214.

Masyarakat Lokal

Kodrat manusia adalah mahluk sosial, maka dalam kehidupan manusia adalah mutlak disertai manusia lainnya. Sosiolog Soerjono Soekanto, mengungkapkan manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu (1) keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (masyarakat), dan (2) keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.⁴⁴

Jadi dengan dasar seperti itu, maka masyarakat lokal (*community*) yang dimaksudkan adalah menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, daerah atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Dengan demikian, kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah adanya hubungan-hubungan sosial (*social relationships*) antara anggota suatu kelompok. Dengan mengambil pokok-pokok uraian di atas, dapat dikatakan, masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang

⁴⁴Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 124.

menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.⁴⁵ Dan diperjelas oleh Kingsley, bahwa masyarakat adalah suatu kelompok sosial terkecil yang bertempat tinggal di daerah tertentu, yang di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan sosial.⁴⁶

Dengan dasar seperti tersebut di atas, maka "*Masyarakat Lokal*" yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sekumpulan warga yang berkeinginan menjadi satu dengan warga lain disekelilingnya yang bertempat tinggal pada satu desa dan satu kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan.

Kesejahteraan

Kesejahteraan (sejahtera) secara etimologi artinya aman, sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya).⁴⁷ Sedangkan menurut Walter A. Friedlander, Kesejahteraan Sosial (masyarakat) adalah:

⁴⁵Selo Soemardjan, Social Changes in Yogyakarta, cetakan pertama, (New York: Cornell University Press, Ithaca, 1962), h. XX.

⁴⁶Ngadiyono, Kelembagaan dan Masyarakat, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 16.

⁴⁷W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 547.

"Suatu sistem yang terorganisasi dari pada pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat".⁴⁸

Kemudian secara umum kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kekusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.⁴⁹

Maka secara konseptual "kesejahteraan" dapatlah dirumuskan sebagai kepuasan yang diperoleh para individu dari situasi hidup yang mereka alami. Secara operasional kesejahteraan diantaranya dapat diukur berdasarkan jumlah pendapatan, pelayanan publik yang tersedia bagi para individu, dan faktor-faktor lain yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat pendapatan dan pelayanan

⁴⁸Walter A. Friedlander, Introduction to Social Welfare, 3th. ed, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1968), h. 4.

⁴⁹T. Sumarnomugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1991), h. 33.

publik.⁵⁰

Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah apabila kebutuhan materil dan kebutuhan spirituilnya dapat terkabulkan atau kebutuhan sosial, ekonomi dan politiknya bisa terpenuhi dengan baik. Yakni dengan melalui pelayanan publik yang baik, jumlah penghasilan yang memadai, tersalurnya aspirasi mereka dengan baik dan faktor-faktor lain yang langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhinya.

Pelaksanaan otonomi daerah dianggap suatu hal yang penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara keseluruhan, karena di dalamnya tercakup arahan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat.

Hal ini diperjelas pada hakikat dan tujuan otonomi daerah yang menegaskan, dengan pelaksanaan otonomi daerah dapat menjamin terlaksananya pelayanan, tingkat kesejahteraan, di samping aspek pendemokrasian, yang diidentikkan dengan tiga aspek pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lokal yakni aspek sosial, ekonomi dan politik.

Memang, pendekatan terhadap pembahasan masalah otonomi tersebut tidak dapat hanya dilakukan secara satu sisi yaitu dari segi yuridis atau sudut ketatanegaraan belaka,

⁵⁰Ramlan Surbakti, "Isu Politik di Kota dari Perspektif Arus Bawah", dalam Majalah Widyapraja No. 23 Tahun XV/1996, (Jakarta: IIP Depdagri, 1996), h. 29.

melainkan daerah kajiannya lebih luas dan melibatkan aspek-aspek lain seperti politik, sosial budaya, Hankamnas, dan segi pembangunan ekonomi.⁵¹

Pada fokus seperti itu, maka secara global relevan dengan konsep dasar pembangunan nasional yang bersifat multidimensional, di dalamnya terdapat tiga dimensi utama, yaitu (1) pembangunan ekonomi, (2) pembangunan politik, dan (3) pembangunan sosial.⁵²

Selain itu, juga terkait dengan suatu pernyataan, "otonomi adalah bukan sekedar masalah pemerintahan dan desentralisasi pemerintahan, namun suatu hak atas kemandirian masyarakat dan hukum/adat setempat dalam mengembangkan potensi sosial, ekonomi dan budayanya menuju kepada kesejahteraan sosial dalam wadah negara nasional Republik Indonesia dan yang berpancasila".⁵³

Masyarakat menganggap dirinya sejahtera apabila kebutuhan material dan kebutuhan spiritualnya dapat terkabulkan atau kebutuhan sosial, ekonomi dan politiknya bisa terpenuhi dengan baik, hal ini terkait dengan pelaksanaan

⁵¹M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, (Bandung: Alumni, 1975), h. 23.

⁵²J.A. Ponsioen, National Development, dalam Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 44.

⁵³Frans Seda, Otonomi Daerah, dalam Kompas 8 April 1996, tahun XXXI, hal. IV dan V.

otonomi daerah dengan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut sesuai dengan gagasan Afan Gaffar, ada hubungan yang erat antara meningkatnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan terbentuknya suatu rezim politik yang demokratis, dan semakin sejahtera suatu bangsa atau negara maka semakin besar pula kemungkinannya untuk menopang sistem politik yang demokratis.⁵⁴

Kebutuhan dasar bagi kehidupan seseorang (masyarakat) merupakan cikal bakal tercapainya suatu kesejahteraan. Adapun sasaran pokok yang strategis dari metode pemenuhan kebutuhan dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan atau perumahan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang dipandang perlu;
- (2) Dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh berbagai jasa, pendidikan untuk anak dan orang tua, program preventif dan kuratif kesehatan air minum, pemukiman dengan lingkungan yang mempunyai infrastruktur dan komunikasi, baik rural maupun urban;
- (3) Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- (4) Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, ataupun dari perdagangan internasional untuk memperolehnya dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha selanjutnya;
- (5) Menjamin adanya partisipasi massa dalam pengam

⁵⁴Afan Gaffar, Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila, dalam Akhmad Zaini Abar, (penyunting) Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru (Esei-Esei dari Fisi-pol Bulakaumur), (Solo: CV. Ramadhan, 1990), h. 84.

bilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek.⁵⁵

Kesejahteraan itu dapat dicapai apabila seluruh rangkaian indikator-indikator tersebut di atas dapat terkabulkan, selanjutnya dipertegas dalam salah satu pernyataan Mubyarto, unsur kehidupan yang bebas, bahagia dan aman dapat dicapai apabila komponen-komponen berikut ini dapat dijadikan pola dalam beraktivitas, diantaranya: (1) mutu kehidupan hidup, (2) mata pencaharian, (3) individualitas dan kebebasan memilih, (4) pengembangan diri, dan (5) perkembangan sosial politik.⁵⁶

Terkait dengan pernyataan tersebut, maka sangat relevan dengan gagasan A.Ramlan Surbakti, tujuan memaksimalkan kemakmuran ekonomi warga melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi agaknya menjadi prioritas banyak pemerintah lokal perkotaan.

Ada tiga alasan mengapa kemakmuran ekonomilah yang terpenting, yaitu: *Pertama*, kemakmuran ekonomi merupakan keharusan untuk dapat melindungi basis fiskal (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah lokal. Tanpa basis fiskal yang handal sukar bagi Pemdada untuk memberikan pelayanan publik. *Kedua*, dengan memilih dan menjalankan kebijakan yang dapat

⁵⁵Dorodjatun Koentjoro-Jakti, "Mau Kemana Kita dengan Pembangunan Ini", dalam PRISMA Tahun VII No. 10, 1978, (Jakarta: LP3ES, 1978), h. 10 - 12.

⁵⁶Mubyarto, dkk., Nelayan dan Kemiakinan (Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai), (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 8.

menunjang secara langsung kemakmuran ekonomi masyarakat kota, politisi lokal akan mendapat keuntungan politik baik berupa perpanjangan jabatan maupun dukungan dalam pemilu,--- karena ini menyangkut kebutuhan dasar dan basis materil masyarakat, inilah disebut *good government is good politics*. *Ketiga*, dan kalau kemakmuran ekonomi masyarakat kota tidak dapat dipelihara, maka pengusaha lokal akan gulung tikar atau pindah ke daerah lain, para pekerja kehilangan pekerjaan. kegiatan kultural akan memudar, dan nilai lahan akan turun drastis dibandingkan dengan daerah lain, ini merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab sosial para pejabat pemerintah.⁵⁷

Sehingga dengan demikian, dengan keberadaan dan pelaksanaan otonomi daerah adalah penting bagi kesejahteraan masyarakat, itu sebagai asumsi dasar. Olehnya itu, untuk membuktikan asumsi tersebut, maka diadakanlah penelitian yang lebih mendalam dengan metode tersendiri, yang disesuaikan dengan objek yang hendak dipahaminya.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, walaupun ilmu pengetahuan sosial harus mempelajari tindakan manusia yang bersifat subjektif, tidak berarti bahwa ilmu sosial harus

⁵⁷A. Ramlan Surbakti, *Kajian Perkotaan dari Perspektif Ilmu Politik*, dalam *Kajian tentang Politik Lokal di Indonesia*, (Pada Seminar dan Riset Politik Lokal Program IIS Pasacsarjana Unair, 1996), h. 8 - 9.

bersifat subjektif pula.⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan, ilmu pengetahuan sosial adalah memahami "tindakan manusia" yang subjektif dengan cara yang objektif dalam berbagai aktivitasnya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka ilmu pengetahuan sosial harus menggunakan metode *Verstehen*. Hal ini berarti, untuk memahami tindakan individu secara objektif, seorang ilmuan sosial diharapkan mampu menempatkan dirinya di dalam kerangka berpikir orang lain yang tindakannya ingin dipahami.

Dalam hal ini, Weber membedakan dua jenis *Verstehen* yaitu: Pertama, *Aktuelles Verstehen* (pemahaman yang bersifat langsung) yaitu pemahaman yang langsung didapatkan berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh individu. Kedua, *Eklarendes Verstehen* (pemahaman yang bersifat penjelasan) yaitu pemahaman yang berhubungan dengan motivasi yang mendasari tindakan individu yang bersangkutan.⁵⁹

Dengan demikian, dari kedua *verstehen* tersebut di atas, dapat dipahami oleh masyarakat lokal tentang hubungan sebab-akibat antara kaitan tata pelaksanaan nilai-nilai yang berkenaan dengan tindakan secara langsung maupun tidak

⁵⁸Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, Max Weber, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 188.

⁵⁹L. Lacyendecker, Tata. Perubahan dan Ketimpangan. Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), h. 317.

langsung berhubungan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan kehidupan warga masyarakat lokal.

Pada akhirnya, dalam sifat kedinamisan yang dimiliki oleh warga masyarakat lokal, sehingga mereka dapat menggambarkan, memahami, menanggapi dan sekaligus menilai tentang "eksistensi Otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal" pada dua desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metode penelitian yang meliputi: sifat penelitian, definisi operasional, lokasi penelitian, subjek penelitian, pendekatan penelitian, teknik koleksi data, teknik pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan dengan sistematis mulai dari observasi lapangan, pengumpulan data sampai dengan proses analisis data.

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus, yakni suatu penelitian yang dapat digolongkan ke dalam penelitian yang bersifat menjelajah, dan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala tersebut, dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan dugaan-dugaan awal.

Dalam hal ini, organisasi sosial yang lebih luas adalah warga masyarakat lokal di Kabupaten Dati II Gowa Sulawesi Selatan, sedangkan unit analisis yang dijadikan kajian adalah warga masyarakat yang bermukim pada dua Desa/Kelurahan, yaitu yang bermukim di Kelurahan Pandang-Pandang (perkotaan) dan di Desa Je'netallasa (pedesaan)

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Dan apabila dilihat dari segi tujuan, maka penelitian ini bertujuan mendeskriptifkan dan memahami permasalahan yang ada, yaitu bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep atau teori yang telah dikembangkan. Adapun realitas sosial yang dipelajari/diteliti adalah kehidupan sosial, ekonomi, politik warga masyarakat lokal yang dikaitkan dengan tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan otonomi daerah dengan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Selanjutnya, jika dilihat dari proses pengumpulan datanya, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung atas realitas sosial dan berusaha untuk memahami berbagai gejala sosial yang muncul dari realitas tersebut, serta hubungannya dengan gejala sosial yang lainnya.

Kemudian sebagai penelitian yang bersifat studi kasus, maka kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini pada dasarnya hanya berlaku secara terbatas pada lokasi penelitian ini. Namun demikian karena dihasilkan oleh suatu penelitian, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut memiliki arti penting bagi peneliti, pemerintah dan yang lebih penting adalah bagi warga masyarakat setempat.

Definisi Operasional

Adapun operasionalisasi dari ketiga aspek yang dimaksudkan di atas, yang sekaligus dijadikan sebagai indikator-indikator (ukuran) dalam pelaksanaan penelitian ini, adalah:

Pertama, aspek sosial mencakup berbagai macam pelayanan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah (Pemda), terhadap segala unsur yang terkait antara pelaksanaan otonomi daerah dengan kesejahteraan, yaitu meliputi:

- (1) Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dioperasionalkan oleh 24 Dinas Daerah terdiri dari Dinas: pertanian tanaman pangan, perikanan, pendapatan daerah, kebersihan dan pertamanan, perindustrian, perdagangan, sosial, koperasi dan pengusaha kecil, pengairan, bina marga, kehutanan dan konservasi tanah, LLAJ, perkebunan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertambangan, tata ruang, bangunan, pasar, kependudukan catatan sipil, pembangunan masyarakat desa, pariwisata, dan tenaga kerja.
- (2) Kualitas dan kuantitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat lokal (pada dua desa kasus) sehubungan dengan keberadaan Dinas-Dinas Daerah tersebut di atas, antara lain:
 - a. Waktu pelayanan, mengungkapkan tingkat kecepatan pelayanan yang diterapkan.
 - b. Biaya pelayanan, mengungkapkan tentang biaya-biaya

yang dibebankan kepada masyarakat lokal dalam menerima pelayanan dari pemerintah daerah.

c. Perilaku pelayanan, dikemukakan tentang sikap dan tingkah laku atau tingkat keramahan yang dirasakan oleh warga masyarakat lokal dalam menerima pelayanan dari pemerintah daerah.

d. Kebutuhan pelayanan, menjelaskan tentang penyediaan sarana dan prasarana (jumlah personil dan sarana pendukung lainnya) yang berhubungan dengan pemberian pelayanan oleh pemerintah daerah.

Kedua, aspek ekonomi yakni adanya jaminan dan upaya-upaya nyata dari Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penghasilan warga masyarakat lokal, yaitu meliputi:

- (1) Perhatian Pemerintah Daerah tentang kebutuhan pokok, seperti pengadaan bantuan pangan, sandang, serta penyediaan sarana perumahan yang bisa dijangkau dari seluruh lapisan masyarakat, serta kebutuhan lain yang mendesak;
- (2) Perhatian terhadap adanya jaminan hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri), dibukanya lapangan kerja untuk dapat menampung tenaga kerja yang maksimal, serta diciptakannya lapangan kerja dari bidang-bidang yang dapat menampung tenaga kerja yang banyak dan produktif;
- (3) Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, seperti dibukanya kesempatan dengan persyaratan yang mudah bagi para investor yang ingin menanam-

kan modalnya di daerah;

- (4) Peningkatan mutu dari semua jenis mata pencaharian, seperti dicanangkannya bagi petani tentang pola : Tanam, Petik, Olah dan Jual dari segala canangan produksi yang diinginkan oleh masyarakat;
- (5) Adanya penyesuaian terhadap sektor-sektor ekonomi yang dengan potensi wilayahnya, seperti perbaikan dan promosi pariwisata, dan pembinaan industri rakyat (kecil) untuk dapat menghasilkan lebih banyak;
- (6) Dibukanya kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi putra daerah pada Dinas-Dinas pemerintahan yang ada, dalam rangka lebih meningkatkan penghasilan warga masyarakat lokal, sekaligus dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin pada daerah yang bersangkutan.

Ketiga, aspek politik yakni adanya perhatian dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam menyalurkan aspirasi warga masyarakat lokal yang berkaitan dengan segala pemenuhan kebutuhannya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, yaitu meliputi:

- (1) Sikap dan perilaku Kepala Daerah dan DPRD baik ketua maupun para anggotanya dalam menerima berbagai keluhan dan kritikan dari anggota masyarakat tentang pelaksanaan tugasnya;
- (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD baik pimpinan maupun anggota-anggotanya, dalam rangka tersalurkankannya berbagai aspirasi yang berhubungan

- dengan kemaslahatan warga masyarakat lokal;
- (3) Aspek Pendemokrasian dalam lembaga DPRD, seperti: Masyarakat diberi kebebasan untuk menuntut ketepatan proyek, kegunaan proyek, maksimalisasi proyek, lewat DPRD. contohnya pembangunan jalan sebagai sarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya;
- (4) Proses perencanaan pembangunan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijaksanaan yang terkait, demikian juga terhadap pelaksanaannya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan, lokasi ini dipilih secara "purposive", yaitu dilakukan dengan sengaja, dengan pertimbangan:

Pertama, Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa jika dilihat dari segi kenaikan angka-angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki prospek yang sangat cerah. Dalam pengembangan otonomi (rata-rata mengalami kenaikan) pada setiap tahunnya yaitu pada Tahun Anggaran 1995/1996 mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 70,16 persen dari tahun sebelumnya.⁶⁰ Dan termasuk sepuluh kategori besar penerima PAD di antara 23 Kabupaten/Kotamadya di Sulawesi Selatan, namun belum dikategorikan sebagai daerah yang mampu berotonomi.

⁶⁰Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, 1996.

Kedua, kondisi geografis, demografi dan faktor-faktor lain yang terkait, seperti kesuburan tanah yang didukung dengan pengairan yang cukup baik untuk perkebunan dan usaha pertanian lainnya.

Ketiga, potensi pariwisata yang memiliki prospek yang cukup bagus (Tempat: rekreasi, permandian dan air terjun) di kawasan "Malino", namun pada potensi kedua dan ketiga tersebut belum dikelola secara maksimal disebabkan karena kemampuan Sumber Daya manusianya masih kurang, demikian juga sarana dan prasarana pendukungnya masih sangat terbatas.⁶¹

Dari ketiga pertimbangan tersebut, kami menilai Kabupaten Dati II Gowa sangat tepat untuk diteliti khususnya yang berkenaan dengan keberadaan Otonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Sebagai salah satu bukti dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Kabupaten Dati II Gowa merupakan salah satu diantara 26 kabupaten di Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 April 1995 yang lalu sebagai Kabupaten "Percontohan/uji-coba (pilot proyek) pelaksanaan Otonomi Daerah".

Karena penelitian ini sifatnya studi kasus, maka secara spesifik akan dilakukan pada dua Desa. Yaitu Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu, yakni yang dapat

⁶¹Potret Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, 1995/1996, serta Penjelasan Umum dari Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, 1996.

Populasi penelitian ini, dalam konteks sasaran penelitian adalah mencakup semua rumah tangga yang bertempat tinggal/bermukim pada Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa Kabupaten Dati II Gowa.

Adapun kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan Kepala Keluarga (KK) terhadap setiap Rumah Tangga (RT) adalah: (1) tercatat secara resmi sebagai penduduk pada dua kelurahan/desa tersebut, (2) bermukim di dua Kelurahan/Desa tersebut selama 10 (sepuluh) tahun keatas, (3) bertanggung jawab secara langsung terhadap rumah tangganya masing-masing, serta kriteria lainnya yang mendukung.

Sampel diambil secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu dalam menentukan responden atau informan dilakukan dengan pertimbangan: keluarga-keluarga yang dipilih tersebut dapat mewakili keluarga lainnya dalam satu jenis pekerjaan tertentu. Adapun alasan sehingga memakai tehnik *purposive sampling* tersebut adalah dari sejumlah Kepala Keluarga (KK) yang kami pilih itu, pada dasarnya mereka mampu memberikan data yang kami butuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Dalam menentukan sejumlah sampel tersebut, maka terlebih dahulu kami lakukan penjajakan (*overview*) pada Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa dengan tujuan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang ditekuni pada dua desa tersebut, demikian juga jumlah Kepala Keluarga (KK) terhadap jenis-jenis pekerjaan yang mereka tekuni.

Kemudian setelah itu, untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian ini. maka kami mengambil sepuluh persen (10%) responden dari jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga pada kedua desa kasus tersebut, dengan pertimbangan bahwa dari sepuluh persen tersebut sudah layak untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan, khususnya yang berhubungan dengan otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal di dua desa tersebut.

Para Kepala Keluarga yang dipilih itu adalah dianggap mampu memberikan data dan informasi yang valid sekaligus mampu mewakili keluarga-keluarga lainnya yang sejenis dengan pekerjaan yang mereka tekuni, hal ini diketahui melalui baik dari tokoh-tokoh masyarakat maupun dari aparat desa sendiri. Untuk mengetahui jumlah Kepala Keluarga pada setiap jenis pekerjaan yang ditekuni oleh warga masyarakat lokal di kedua desa tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.12 dan 4.15.

Secara umum jenis pekerjaan yang ditekuni oleh populasi pada kedua desa tersebut disusun berdasarkan heterogenitas dari kriteria mata pencaharian (pekerjaan). Berdasarkan kriteria tersebut, dapat digolongkan sebagai berikut :

Warga masyarakat kota (*urban*), meliputi: (1) Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI, (2) Keluarga karyawan swasta, (3) Keluarga pedagang/pengusaha, (4) Keluarga pensiunan, (5) Keluarga pertukangan/kerajinan, (6) Keluarga Sopir mobil, (7) Keluarga buruh, (8) Keluarga petani, (9) Keluarga pemulung, dan (10) Dan lain-lain.

Warga masyarakat desa (*rural*), meliputi : (1) Keluar-

ga PNS dan ABRI, (2) Keluarga pedagang/pengusaha, (3) Keluarga karyawan swasta, (4) Keluarga petan, (5) Keluarga pensiunan, (6) Keluarga sopir mobil, (7) Keluarga montir, (8) Keluarga pertukangan/kerajinan, (9) Keluarga buruh, (10) Dan lain-lain.

Dari kriteria tersebut, maka dalam analisis data dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) pengelompokan jenis pekerjaan PNS/ABRI meliputi Keluarga: PNS, ABRI dan Pensiunan. dan (2) pengelompokan jenis pekerjaan Non PNS/ABRI meliputi Keluarga: Karyawan swasta, pengusaha, pertukangan, Sopir mobil, Buruh, Petani, Pemulung, dan lain-lain.

Tujuan pengelompokan tersebut adalah di samping untuk mempermudah analisis hasil penelitian, juga sekaligus dapat mengetahui tentang tanggapan antara warga masyarakat PNS/ABRI dengan tanggapan warga masyarakat yang bukan PNS/ABRI tersebut terhadap eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Pendekatan Penelitian

Proses pengumpulan (koleksi) data dilakukan secara kualitatif, dan metode kualitatif tersebut dijadikan sebagai dasar analisisnya, yang bertujuan mendeskripsikan serta memperoleh pemahaman tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah, kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan yang dialaminya.

Pendekatan rasionalistik digunakan yang berdasarkan

pada kerangka teoritik yang dibangun dari pemahaman hasil penelitian yang terdahulu, teori-teori yang relevan, demikian juga pemikiran dari para pakar yang dikonstruksikan menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, (*descriptive research*) yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti yang berkaitan dengan fenomena lainnya dan ditujukan kepada unit analisis (masyarakat lokal yang terdiri dari warga masyarakat yang tinggal di kota (*urban*) Kelurahan Pandang-Pandang dan warga masyarakat yang tinggal di desa (*rural*) Desa Je'netallasa.

Tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah diungkapkan berdasarkan dengan "*opini*" yang mereka miliki, yaitu suatu pendirian, pikiran dan pendapat serta pengalaman atau yang diraskan langsung oleh subjek penelitian (warga masyarakat) tersebut.

Tanggapan tersebut diungkapkan oleh warga masyarakat lokal dalam rangka menilai dan mencermati realitas sosial dan prilaku sosial yang terjadi disekitarnya.

Kedua hal tersebut penting dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian ini lebih valid, karena kami menganggap, dengan kedua cara itu adalah dapat mempermudah proses analisis data yang dilakukan.

Dalam tanggapan tersebut, rana aksi dan interaksi

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penilaian, pendapat atau pendirian warga masyarakat lokal terhadap aktivitas Pemerintahan Daerah, dalam hal ini operasionalisasi tugas dari Dinas-Dinas Daerah tentang keterkaitan antara pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal pada dua desa di Kabupaten daerah Tingkat II Gowa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hasil penelitian yang ditemukan adalah berfokus pada tanggapan warga masyarakat lokal terhadap otonomi daerah bagi kesejahteraan dengan melalui opini yang bersifat non empirik terhadap segala aspek kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tehnik Koleksi Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan warga masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa Kabupaten Dati II Gowa.

Secara singkat langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: (1) pengurusan izin dari aparat yang berwenang, (2) melakukan penjajakan pada lokasi penelitian, (2) menentukan atau memilih responden dan informan yang ada untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, (3) mengumpulkan data, baik data sekunder maupun data primer, (4) melakukan tabulasi data, dan (5) melakukan pembahasan serta (6) melakukan analisis data.

Dengan berdasar pada definisi operasional yang telah disebutkan pada bagian terdahulu, yang dijadikan sebagai dasar dalam mengumpulkan data. Maka tehnik koleksi data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data sekunder, yaitu segala bentuk data yang didapatkan lewat data pustaka yaitu mengumpulkan dari berbagai macam bacaan baik berupa: buku, jurnal, majalah, Surat kabar, artikel, berbagai hasil penelitian yang terkait serta menelaah berbagai macam dokumen resmi pada Kantor Kepala Daerah, Bappeda, Biro Pusat Statistik (BPS), dan data dari kedua Kelurahan/Desa terpilih yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Data ini dijadikan sebagai dasar dalam pengumpulan data primer, dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis hasil penelitian.

Kedua, pengumpulan data primer, yaitu semua data yang didapatkan di lokasi penelitian, dengan melalui: (a) *Observasi langsung*, yaitu bertujuan mengumpulkan fakta dari dunia kenyataan disekeliling peneliti atau mengamati secara langsung fenomena dan gejala yang terjadi di lokasi penelitian, dan sekaligus mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan (b) *Wawancara*, yang bertujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain (subjek penelitian), khususnya yang berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah khususnya

yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraannya. Wawancara ini dilakukan dengan dua cara:

- (1) wawancara berstruktur yaitu dilakukan dengan mempergunakan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya kepada semua Kepala Keluarga sampel dari warga masyarakat lokal pada kedua Kelurahan/Desa yang terpilih.
- (2) wawancara mendalam (bebas) yaitu juga dilakukan dengan mempergunakan pedoman wawancara namun sifatnya fleksibel, artinya tidak menutup kemungkinan dari daftar pertanyaan tersebut mengalami perubahan di lapangan, ini dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat (tokoh: adat, pendidikan, pemuda, pengamat sosial dan pembangunan, dan lain sebagainya).

Hal ini dilakukan secara mendalam dan sekaligus dijadikan sebagai "*key-informan*", yang dianggap lebih mengetahui tentang keterkaitan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan kesejahteraan warga masyarakat lokal, demikian juga kepada beberapa orang dari pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa dan Pemerintah Desa pada kedua Kelurahan/Desa terpilih, yang datanya dijadikan sebagai bahan analisis.

Dengan menggunakan tehnik-tehnik tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan penelitian ini kami mengalami beberapa hambatan, antara lain:

Pertama, Sulitnya menemui dan mewawancarai para

responden karena warga masyarakat pada siang harinya pada umumnya pergi bekerja dan malam harinya mereka butuh waktu istirahat. Sehingga pada akhirnya, kami kadang-kadang mengadakan perjanjian tentang kapan waktu yang disiapkan untuk kami mewawancarainya.

Kedua, tingkat pengetahuan subjek (informan/responden) penelitian sangat terbatas terhadap keberadaan konsep otonomi daerah, sehingga pada awalnya kami mengalami kesulitan untuk mengadakan wawancara. Kemudian setelah kami memberikan gambaran umum tentang otonomi daerah tersebut, barulah mereka (masyarakat lokal) mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan.

Ketiga, serta hambatan-hambatan kecil lainnya seperti dalam hal bahasa, keengganan memberikan informasi yang jelas, dan lain-lain sebagainya. Tetapi semua hambatan tersebut kami mampu mengatasinya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersendiri terhadap mereka.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berhubung karena penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berkenaan dengan otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal, maka digunakan analisis yang bersifat teknik deskriptif kualitatif, setelah data yang bersifat primer maupun sekunder terkumpul secara lengkap.

Sedangkan data yang bersifat kuantitatif pada akhirnya ditafsirkan secara kualitatif, dan proses selanjutnya

data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka data dan informasi yang berhasil diperoleh terlebih dahulu diklasifikasikan kemudian dianalisis berdasarkan perspektif kerangka pemikiran yang digunakan.

Adapun proses pengolahan data dilakukan dengan cara:

(1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil observasi, wawancara dan berbagai dokumen tentang tanggapan warga masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. (2) Melakukan tabulasi data dari sejumlah kuesioner dengan bentuk frekuensi, (3) Menyusun dalam satuan-satuan atau kategorisasi dari informasi atau data yang telah didapatkan.

Selanjutnya, data dari hasil penelitian yang telah diolah itu kemudian dianalisis dengan melalui *interpretative understanding*, yang berarti penelitian dilakukan dengan penafsiran atau pemaknaan terhadap data dan fakta yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan berdasarkan pada "pendekatan metode kualitatif" yang menitikberatkan pada penelitian yang bersifat deskriptif terhadap data-data yang berasal dari hasil wawancara berstruktur dan bebas serta hasil pengamatan (observasi) mengenai studi tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah bagi peningkat

an kesejahteraan masyarakat lokal, dan diungkapkan apa adanya, selanjutnya dilakukan interpretasi dan pemahaman terhadap data-data tersebut.

Kemudian demi keabsahan data yang telah didapatkan tersebut, maka dilakukanlah pemeriksaan keabsahan data atau verifikasi, dengan kriteria yang digunakan untuk verifikasi adalah kriteria kredibilitas dengan tehnik sebagai berikut :

Pertama, pemeriksaan triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Hal tersebut bertujuan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data, cara ini juga mencegah bahaya subjektifitas.

Denzin (dalam Lincoln dan Guba, 1985) membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi yang dipakai di sini terutama triangulasi dengan sumber, metode dan penyidik.⁶²

Pada triangulasi dengan "*sumber*", menurut Patton (dalam Moleong, 1994) dapat berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi/data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam suatu

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, h. 178.

metode kualitatif.

Sedangkan pada triangulasi dengan "metode" adalah diterapkan melalui dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari beberapa tehnik pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Sementara pada triangulasi "penyidik" (peneliti), yaitu dimanfaatkan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data yang telah didapatkan.

Kedua, pengecekan atau pemeriksaan sejawat dilakukan melalui diskusi, yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan sejawat, seperti rekan-rekan mahasiswa dari Program Pascasarjana dan rekan-rekan dosen yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti, kaitannya dengan substansi dalam penelitian ini.

Ketiga, pemeriksaan "Analisis Kasus Negatif" yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan.

Untuk keperluan tersebut, kelompok-kelompok dari warga masyarakat lokal (dua Kelurahan/Desa) diperlukan sebagai contoh kasus, sebagian dari mereka mengatakan otonomi daerah itu penting bagi keperluan kesejahteraannya, dan sebagian pula yang mengatakan sebaliknya dan seterusnya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: letak geografis, keadaan demografi, keadaan perekonomian, profil otonomi daerah Kabupaten Dati II Gowa yang mencakup keberadaan dinas-dinas daerah, keadaan aparatur pemerintahan tentang tingkat kemampuan dengan tugas-tugas yang diembannya.

Kemudian secara spesifik dikemukakan gambaran Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu dan Desa Je'netal-lasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Dati II Gowa.

Gambaran Umum

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa sebelum terbentuk menjadi Daerah Tingkat II, Gowa dimasa lampau adalah kerajaan yang diperintah oleh seorang Raja bergelar Sombaya (yang disembah) Ri Gowa (di Gowa), Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI berkat perjuangan dan jasanya terhadap bangsa dan negara melawan Belanda yang dianugrahi oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional, dengan demikian sejarah perkembangan Gowa melampaui dua masa yang berbeda dalam bentuk pemerintahannya yaitu masa kerajaan dan masa kemerdekaan.

Dan secara umum dapat digambarkan, penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa didiami oleh sebagian besar masyarakat yang beretnis Makassar sembilan puluh delapan persen

(98%), sedangkan sisanya dua persen (2%) adalah etnis Bugis, Toraja, Mandar dan lain-lainnya.

Letak Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa secara geografis adalah terletak pada $12^{\circ}. 33''. 19'$ - $13^{\circ}. 15''. 57''$ Bujur Timur dan $50^{\circ}. 5''. 5'$ - $50^{\circ}. 34''. 7'$ Lintang Selatan, dengan keadaan cuaca mencapai suhu maksimum 21° C serta rata-rata curah hujan pertahun mencapai 2000 - 3000 mm.

Posisi Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang berkaitan dengan pengembangan wilayah adalah sangat strategis karena berbatasan pada delapan Kabupaten/Kotamadya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan: Kotamadya Ujung Pandang dan Kabupaten Takalar.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan: Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan: Kotamadya Ujung Pandang dan Kabupaten Maros.

Sungguminasa adalah Ibukota dari Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, letaknya dikatakan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Metropolitan Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Bagian selatan merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indone-

sia (KTI) yang sangat potensial untuk lokasi kegiatan sosial ekonomi yang berskala regional maupun nasional.

Adapun luas wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah 1.883,33 Km² (lihat tabel 4.1), yang terdiri dari dua wilayah Pembantu Bupati. Wilayah I berkedudukan di Malino Kecamatan Tinggimoncong, meliputi Kecamatan: Parangloae, Tinggimoncong, Bungaya, dan Kecamatan Tompobulu. Sedangkan Wilayah II berkedudukan di Limbung Kecamatan Bajeng, meliputi Kecamatan: Somba Opu, Bontomarannu, Pallangga, Bajeng, dan Kecamatan Bontonompo.

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
01	Bajeng	79, 13
02	Bontomarannu	137, 59
03	Bontonompo	59, 63
04	Bungaya	373, 62
05	Pallangga	68, 91
06	Parangloae	313, 16
07	Somba Opu	28, 09
08	Tinggimoncong	527, 45
09	Tompobulu	295, 75
***	J U M L A H	1.883, 33

Sumber: Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Dati II Gowa, 1996

Dari sembilan kecamatan tersebut di atas, terdapat 130 Desa/Kelurahan yang terbagi atas 111 Desa/Kelurahan

definitif dan 19 desa persiapan, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Jumlah Kelurahan dan Desa setiap Kecamatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	KECAMATAN	BANYAKNYA				JUMLAH
		Kelhn	Desa	Def.	Pers.	
01	Bajeng	2	14	15	1	16
02	Bontomarannu	2	9	10	1	11
03	Bontonompo	3	14	15	2	17
04	Bungaya	-	11	11	-	11
05	Pallangga	3	18	19	2	21
06	Parangloe	2	7	8	1	9
07	Somba Opu	14	-	7	7	14
08	Tinggimoncong	3	14	16	1	17
09	Tompobulu	2	12	13	1	14
**	J U M L A H	31	99	111	19	130

Sumber: Kantor BPS Daerah Tingkat II Gowa, 1996.

Kedaaan Demografi

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa berjumlah 444.327 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 216.163 jiwa dan perempuan sebanyak 228. 164 jiwa, dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

Jika dibandingkan antara wilayah seluas 1.883. 33 Km² dengan penduduk yang berjumlah 444, 327 jiwa yang tersebar

pada sembilan kecamatan, maka kepadatan penduduknya adalah 236 jiwa per Km². Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.
Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	KECAMATAN	LUAS WIL (Km ²)	JUMLAH PDDK (JIWA)	KEPADATAN (Km ²)
01	Bajeng	79,13	60.057	759
02	Bontomarannu	137,59	40.391	294
03	Bontonompo	59,63	54.834	920
04	Bungaya	373,62	31.588	84
05	Pallangga	68,91	70.792	1.027
06	Parangloe	313,16	24.330	78
07	Somba Opu	28,09	59.082	2.103
08	Tinggimoncong	527,45	50.277	95
09	Tompobulu	295,75	52.976	179
***	J U M L A H	1.883,33	444.327	236

Sumber: Kantor BPS Daerah Tingkat II Gowa, 1996.

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan, pertumbuhan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa selama lima tahun terakhir adalah sebesar 2,14 persen pertahun, bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 2,02 persen, dengan demikian terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 persen.

Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dalam setiap tahunnya, maka sudah merupakan keha-

rusan bagi pemegang kebijakan (Pemerintah Daerah) untuk senantiasa mengupayakan perluasan lapangan pekerjaan, sehingga pada saatnya nanti, pengangguran juga semakin tahun adalah juga semakin menurun. Sekedar dapat dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki pada setiap kecamatan yang merupakan akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Setiap Kecamatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01	Bajeng	29.486	30.571	60.057
02	Bontomarannu	19.779	20.612	40.391
03	Bontonompo	25.677	29.157	54.834
04	Bungaya	15.363	16.225	31.588
05	Pallangga	34.716	36.076	70.792
06	Parangloe	12.256	12.074	24.330
07	Somba Opu	28.975	30.107	59.082
08	Tinggimoncong	24.639	25.638	50.277
09	Tompobulu	25.272	27.704	52.976
***	J U M L A H	216.163	228.164	444.327

Sumber: Kantor BPS Daerah Tingkat II Gowa, 1996.

Keadaan Perekonomian

Sebagaimana telah diungkapkan, Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mempunyai wilayah yang strategis dan sangat potensial untuk kegiatan sosial ekonomi yang berskala regional maupun nasional, penggunaan lahannya cukup besar

untuk membantu perekonomian daerah.

Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, pada tahun 1995 tanah kering seluas 84,29% (158.739 ha) dan 15,71% (29.595 ha) adalah tanah persawahan dari total tanah atau lahan yang ada di Kabupaten Gowa.

Dan luas tanah kering 28,40% dipergunakan untuk tegalan dan ladang, 48,90% adalah hutan sedangkan sisanya 22,70% dipergunakan untuk tanah pekarangan. Sedangkan dari luas tanah sawah terbagi dalam sawah tadah hujan seluas 36,59% dan 63,41% adalah tanah sawah pengairan atau tanah irigasi.

Adapun kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah sebagian besar bergerak disektor pertanian dengan kategori di bidang tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Sementara itu, pada sektor industri dan jasa yang meliputi aneka industri dan industri kecil. Berdasarkan laporan dari Dinas Perindustrian, Perusahaan Aneka Industri yang ada tahun 1995/1996 sebanyak 11 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja 986 orang, sedangkan Industri Kecil sebanyak 3.123 dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 11.440 orang.

Keadaan absolut perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa selama delapan bulan terakhir ini memperlihatkan adanya kestabilan pertumbuhan. Kestabilan tersebut dapat

dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (lihat tabel 4.5) yang tertera berikut ini.

Tabel 4.5.
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

TAHUN	PDRB HARGA BERLAKU (Juta Rp)	JUMLAH PDDK	PERTUMBUHAN (%)
88/89	188.166,08	394.005	8,42
89/90	221.175,45	402.128	14,92
90/91	251.108,98	410.419	11,92
91/92	287.101,53	418.881	12,54
92/93	323.094,08	427.517	11,14
93/94	359.086,63	436.331	10,02
94/95	395.079,18	425.327	9,11
95/96	289.258,84	419.229	11,05

Sumber: Kantor BAPPEDA Tingkat II Gowa, 1996.

Untuk mendukung hal-hal yang dimaksudkan di atas, maka potensi dan peluang ekonomi untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain:

- a. Potensi Sumber Daya Alam (SDA), meliputi: Tambang Galian "C", Kehutanan, dan Sumber Air.
- b. Potensi Pariwisata, meliputi: Taman Miniatur Sulawesi (Benteng Somba Opu), Kawasan Hutan Wisata Malino.
- c. Waduk Serba Guna Bili-Bili, meliputi: Proyek Serba Guna Bili-Bili berskala nasional yang merupakan proyek multi-guna yang berfungsi untuk pertanian, perikanan, pariwisata, penanggulangan banjir, pembangkit listrik dan penye-

diaan air minum.

Profil Otonomi Daerah Di Kabupaten Dati II Gowa

Pada tanggal 21 April 1995 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, dan sebagai perwujudannya oleh Pemerintah telah dikeluarkan PP Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan.

Dan dari 26 Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan tersebut, Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa termasuk salah satu di dalamnya.

Sebagai tindak lanjut dari penancangan era uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 1995 yang sekaligus menetapkan tanggal 25 April tersebut sebagai Hari Otonomi Daerah.

Maka pada tanggal 4 Mei 1995 dalam rapat Paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Gowa telah dilaksanakan penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan disaksikan oleh para Kepala Kantor Wilayah Departemen, para Kepala Dinas Tingkat I Sulawesi Selatan dan pejabat lainnya yang terkait,

telah menyerahkan:

Pertama, Sebagian Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 yang terdiri dari 19 bidang, antara lain: (a) Bidang Petanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, (b) Bidang Peternakan/Kehewanan, (c) Bidang Perikanan darat, (d) Bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat, (e) Bidang Perkebunan, (f) Bidang Transmigrasi dan Perambah Hutan, (g) Bidang Pemerintahan Umum, (h) Bidang Sosial, (i) Bidang Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, (j) Bidang Kehutanan, (k) Bidang Pariwisata, (l) Bidang Pekerjaan Umum, (m) Bidang LLAJ, (n) Bidang Pertambangan, (o) Bidang Perdagangan, (p) Bidang Kesehatan, (q) Bidang Perburuhan, (r) Bidang Perindustrian, (s) Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Kedua, Sebagian Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 1995, terdiri dari: (a) Bidang Kehutanan, (b) Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, (c) Bidang Pekerjaan Umum Pengairan, (d) Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya, (e) Bidang Pertambangan Golongan "C", (f) Bidang Kepariwisata, (g) Bidang LLAJ, (h) Bidang Tenaga Kerja.

Penyerahan berbagai urusan tersebut di atas, juga disertai dengan 3P (Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan) dari masing-masing urusan untuk mendukung pelaksanaan oto-

nomi daerah tingkat yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam rangka penataan kelembagaan yang akan mewadahi penanganan urusan yang diserahkan, maka berdasarkan hasil konsultasi antara Tim Tehnis Otonomi Daerah Tingkat II Gowa dengan Tim Tehnis Otonomi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan serta Tim Asistensi Pusat, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa pada bulan Maret 1995 menetapkan 26 (dua puluh enam) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Tingkat II Gowa dalam rangka persiapan pelaksanaan percontohan otonomi daerah.

Ke-26 Dinas Daerah yang dibentuk dan atau ditata kembali organisasinya, sebelum diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pengesahan telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pembahasan lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu, maka sejumlah Dinas yang diusulkan, yaitu antara lain: (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, (2) Dinas Peternakan, (3) Dinas Perikanan, (4) Dinas Kesehatan, (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (6) Dinas Bina Marga, (7) Dinas Pengairan, (8) Dinas Perkebunan, (9) Dinas Perdagangan, (10) Dinas Perindustrian, (11) Dinas Sosial, (12) Koperasi dan Pengusaha Kecil, (13) Dinas Pendapatan Daerah, (14) Dinas Bina Sosial Politik, (15) Dinas Penerangan, (16) Dinas Agama, (17) Dinas Pariwisata, (18) Dinas LLAJ, (19) Dinas Tenaga Kerja, (20) Dinas Pertamban-

gan. (21) Dinas Bangunan, (22) Dinas Tata Ruang, (23) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (24) Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah, (25) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dan (26) Dinas Pasar.

Setelah Peraturan Daerah (Perda) Dinas-Dinas mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah telah menempuh langkah selanjutnya yakni membuat Lembaran Daerah.

Dari 26 Perda Dinas yang diusulkan tersebut, ada tiga Dinas ditangguhkan diantaranya Dinas Agama, Dinas Penerangan dan Dinas Bina Sosial Politik, karena urusannya belum diserahkan kepada Daerah Tingkat II percontohan.

Kemudian ada dua Dinas tidak dilakukan penataan kembali organisasinya yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan alasan, Dinas Pendapatan Daerah tidak mendapat pengesahan sehingga otomatis struktur organisasi yang lama tetap diberlakukan.

Sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan memang tidak diusulkan untuk ditata kembali organisasinya, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 1995 tentang akan diarahkannya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tingkat II.

Dengan demikian, maka jumlah keseluruhan Dinas yang ada di Daerah Tingkat II Gowa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) Dinas dengan profil sebagai berikut:

- 5 (lima) Dinas merupakan Dinas yang sudah ada.
- 4 (empat) Dinas dari Eks Kandep.
- 2 (dua) merupakan integrasi Kandep dengan Dinas yang sudah ada sebelumnya.
- 2 (dua) Dinas dari Perangkat Vertikal Depdagri.
- 6 (enam) Dinas baru yang dibentuk dari Urusan yang diserahkan maupun pemekaran Dinas yang telah ada.

Dalam rangka pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah yang Nyata, serasi, dinamis dan Bertanggung jawab, maka secara formal sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Otonom dengan sendirinya menjadi urusan rumah tangganya.

Dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga tersebut, UU Nomor 5 tahun 1974 pasal 13 ayat 2 menggariskan, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah.

Dengan dasar seperti tersebut di atas, maka Pemerintahan Daerah Tingkat II Gowa telah membentuk Dinas-Dinas Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan memberikan tugas dan fungsi-fungsi Dinas-Dinas yang telah dibentuk.

Adapun susunan organisasi Dinas Daerah Tingkat II Gowa dengan profil tersebut di atas dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi yang memang sudah ada dan urusan-urusan otonomi yang baru diserahkan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 1995, ke-24 Dinas yang dibentuk itu yang disertai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, yaitu antara lain: (1) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, (2) Dinas Perikanan, (3) Dinas Peternakan, (4) Dinas Pendapatan daerah, (5) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, (6) Dinas Perindustrian, (7) Dinas Perdagangan, (8) Dinas Sosial, (9) Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil, (10) Dinas Pengairan, (11) Dinas Bina Marga, (12) Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah, (13) Dinas LLAJ, (14) Dinas Perkebunan, (15) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (16) Dinas Kesehatan, (17) Dinas Pertambangan, (18) Dinas Tata Ruang, (19) Dinas Bangunan, (20) Dinas Pasar, (21) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (22) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, (23) Dinas Pariwisata, dan (24) Dinas Tenaga Kerja.

Dengan terbentuknya ke-24 Dinas tersebut, sebagai langkah selanjutnya adalah merumuskan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa tentang pelaksanaan beberapa Perda yang sekaligus uraian tugas secara rinci dari seluruh perangkat daerah yang telah dibentuk itu.

Demikian juga untuk Anggaran Belanja Rutin dari Dinas-Dinas yang baru dibentuk, maka pada bulan Desember 1995 telah dianggarkan dalam perubahan APBD Tingkat II Gowa sesuai Anggaran DIK Dinas-Dinas eks Kandep dan Dinas eks Perangkat Vertikal Depdagri.

Kedaaan Aparatur Pemerintahan Daerah Tingkat II Gowa

Untuk melaksanakan kegiatan (tugas dan fungsi) yang sangat kompleks dari setiap Dinas yang berjumlah 24 tersebut di atas, tentunya memerlukan aparatur (tenaga) pemerintahan yang memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang berkualitas tinggi terhadap bidang tugasnya masing-masing dari Dinas Daerah tersebut.

Adapun kondisi aparatur pada lingkup Pemerintahan Daerah Tingkat II Gowa secara keseluruhan terdapat 2.273 personil, yang terbagi ke dalam berbagai Instansi, Kantor, Dinas dan Kecamatan, untuk mendapatkan gambaran tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Kedaaan Aparatur Menurut Pangkat/Golongan
Pada Lingkup Pemda Tingkat II Gowa

GOL.	PANGKAT/GOLONGAN					FREKUEN- ENSI	PERSENTA SE (%)
	a	b	c	d	e		
IV	23	12	1	-	-	36	1,58
III	320	297	37	20	-	674	29,65
II	113	184	523	463	-	1.283	56,44
I	92	53	61	74	-	280	12,32
JLH	548	546	622	557	-	2.273	100,00

Sumber: Bagian Kepegawaian Pemda Tingkat II Gowa, 1996.

Selanjutnya komposisi pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan, dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Komposisi Jumlah Pejabat Yang Telah Mengikuti
Diklat Penjurangan karier Pada Pemda Tingkat II Gowa

ESELON	JENIS DIKLAT YANG PERNAH DIIKUTI				JUMLAH
	SEPADA	SEPALA	SEPADYA	SESPA	
II	-	-	-	1	1
III	-	-	26	1	27
IV	3	24	23	-	50
V	10	51	-	-	61
JUMLAH	13	75	49	2	139

Sumber: Bagian Kepegawaian Pemda Tingkat II Gowa, 1996.

Setelah melihat keadaan aparatur menurut Pangkat dan Golongan serta komposisi pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan, maka berikut ini dapat pula dilihat data jumlah aparatur pemerintahan dalam lingkup Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa menurut klasifikasi pendidikan terakhir yang pernah diikuti, pada tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Keadaan Aparatur Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan
Pada Lingkup Pemda Tingkat II Gowa

PANG/ GOLONG	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	JUMLAH
I	166	97	17	-	-	280
II	197	102	846	93	45	1.283
III	-	-	76	266	332	674
IV	-	-	-	-	36	36
JLH	363	199	939	359	413	2.273

Sumber: Bagian Kepegawaian Pemda Tingkat II Gowa, 1996.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi secara maksimal di Daerah Tingkat II Gowa, maka dibutuhkan sejumlah aparat pelaksana yang memiliki kemampuan yang memadai sehingga nantinya mereka mampu menjadi motor penggerak terhadap dinas-dinas daerah yang ada.

Jumlah aparat pelaksana setiap Dinas Daerah menurut eselon yang dimilikinya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9.
Jumlah Aparat Berdasarkan Eselon Pada Setiap Dinas
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	DINAS-DINAS DAERAH	ESELON			JUMLAH
		III	IV	V	
01	Pertanian & T.Pangan	1	6	22	29
02	Perikanan	1	6	22	29
03	Peternakan	1	6	24	31
04	Pendapatan Daerah	1	5	15	21
05	Kebersihan & Pertmnan	1	6	18	25
06	Perindustrian	1	4	9	14
07	Perdagangan	1	4	13	18
08	Sosial	1	5	15	21
09	Koperasi & Peng.Kecil	1	5	11	17
10	Pengairan	1	6	24	31
11	Bina Marga	1	4	12	17
12	Kehutanan dan K.Tanah	1	4	11	16
13	LLAJ	1	4	11	16
14	Perkebunan	1	4	11	16
15	Pendidikan & Kebud.	1	5	18	24
16	Kesehatan	1	6	19	26
17	Pertambangan	1	4	-	5
18	Tata Ruang	1	4	12	17
19	Bangunan	1	4	12	17
20	Pasar	1	3	7	11
21	Kependudukan & C.Sip	1	4	12	17
22	Pemb. Masyarakat Desa	1	6	19	26
23	Pariwisata	1	4	12	17
24	Tenaga Kerja	1	5	13	19
**	J U M L A H	24	114	343	481

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekwikab Dati II Gowa, 1996.

Gambaran Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa Kelurahan Pandang-Pandang

Gambaran Umum

Kelurahan Pandang-Pandang merupakan salah satu Kelurahan diantara 14 Kelurahan/Desa di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa. yang sekaligus dianggap menggambarkan kehidupan diperkotaan (*urban*).

Adapun letak geografis Kelurahan Pandang-Pandang adalah disamping sebagian wilayahnya sebagai Ibukota kabupaten dan juga sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi yaitu Kotamadya Ujung Pandang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Persiapan Kalegowa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungguminasa.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pallangga.
- a. Sebelah Barat Berbatasan dengan: Kotamadya Ujung Pandang.

Kelurahan Pandang-Pandang terbagi dari dua Lingkungan yaitu Lingkungan Pandang-Pandang dan Lingkungan Mangasa, dengan luas 155 Ha. Dan jumlah penduduknya sebanyak 4.483 jiwa/orang, yang terdiri dari 2.206 jiwa laki-laki dan 2.277 jiwa perempuan, serta kepadatan penduduknya sebesar 2.892 jiwa/Km², dan rata-rata lima orang tiap rumah tangga.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting

dalam rangka mencapai tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sarana pendidikan sangat perlu mendapatkan prioritas dari Pemerintah Daerah. Sarana pendidikan di Kelurahan Pandang-Pandang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Sarana Pendidikan Kelurahan Pandang-Pandang
Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	JENIS PENDIDIKAN	SEKOL	KELAS	MURID	GURU
01	Taman Kanak-Kanak	1	2	38	1
02	SD dan Sederajat	3	20	633	35
03	SMTA dan Sederajat	2	8	365	33
04	SMTA dan Sederajat	2	25	1.048	89
05	Akademi/Universitas	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kelurahan Pandang-Pandang, Agustus 1996,

Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan kebutuhan utama warga masyarakat yang setiap saat dibutuhkan (tidak mengenal waktu), oleh karena itu penyediaannya mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada setiap pemukiman yang sudah dianggap strategis. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut ini:

Tabel 4.11.
Sarana Kesehatan Kelurahan Pandang-Pandang
Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	JENIS SARANA KESEHATAN	BANYAKNYA
01	Rumah Sakit	1
02	Rumah Sakit Bersalin/BKIA	1
03	Rumah Bersalin	1
04	Poliklinik	1
05	Puskesmas	1
06	Puskemas Pembantu	1
07	Posyandu	3
08	Tempat Prkatek Dokter	2

Sumber: Kantor Kelurahan Pandang-Pandang, Agustus 1996,

Selanjutnya dari sarana kesehatan tersebut, Kelurahan Pandang-Pandang memiliki tenaga kesehatan, yakni: Dokter ahli 2 orang, Paramedis 6 orang, Bidan Desa 3 orang dan Dukun Bayi sebanyak 1 orang.

Komunikasi

Dari jumlah rumah tangga yang ada di Kelurahan Pandang-Pandang, ada 137 rumah tangga yang sudah memiliki telepon pribadi di rumahnya, dan ada 5 buah tempat Telepon Umum. Adapun sarana penerima informasi selain Televisi dan Radio juga sudah banyak masyarakat yang senang membaca Surat-Surat Kabar dan beberapa jenis Majalah, bahkan banyak anggota masyarakat yang sudah berlangganan.

Hal tersebut di atas terjadi karena Kelurahan Pandang-Pandang (Kabupaten Gowa) letaknya strategis, yakni di samping berdekatan sekaligus memang berbatasan langsung dengan Ibukota Proipinsi (Kota Metropolitan) Kotamadya Ujung Pandang.

Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu jenis pekerjaan/mata pencaharian dari pada anggota masyarakatnya adalah sangat beragam (heterogen) Sebagai daerah percontohan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka tentunya hal seperti ini memerlukan kejelian dan kecermatan bagi Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal pengadaan dan pengembangan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Jenis pekerjaan yang digeluti oleh anggota masyarakat ini dapat memberikan gambaran, bahwa di Kelurahan Pandang-Pandang jika ditinjau dari gerak roda perekonomiannya adalah memiliki aktivitas usaha yang cukup banyak. Hal ini juga sekaligus bisa menjadi daya tarik bagi para investor dari luar untuk masuk menanamkan modalnya dalam berbagai jenis usaha tersebut. Secara rinci dari pada jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.12.
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KK
01	Pegawai Negeri Sipil dan ABRI	287
02	Karyawan Swasta	218
03	Pedagang/Pengusaha	163
04	Petani	20
05	Pensiunan	84
06	Pertukangan/Kerajinan	28
07	Sopir Mobil	42
08	Buruh	57
09	Pemulung	5
10	Dan lain-lain	24
***	J U M L A H	928

Sumber: Kantor Kelurahan Pandang-Pandang, Agustus 1996,

Desa Je'netallasa

Gambaran Umum

Desa Je'netallasa merupakan salah satu Desa dari 21 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, sekaligus dianggap dapat menggambarkan kehidupan di pedesaan (*rural*), jarak dari ibukota Kabupaten adalah 12 Km. Dan secara geografis Desa Je'netallasa mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontoala.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tetebatu.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lembang Parang.
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kanjilo.

Luas Desa Je'netallasa adalah 5.416 Ha. yang terbagi dari tiga Dusun, masing-masing: Dusun Je'netallasa, Dusun Tombolo, dan Dusun Sanrangan. Adapun jumlah penduduknya sebanyak 4.299 jiwa yang terdiri dari: 2.095 jiwa laki-laki dan 2.204 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduknya adalah 1.335 jiwa/Km², dan rata-rata 5 orang setiap Rumah Tangga.

Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di desa ini jumlahnya sangat terbatas, jika dibandingkan dengan Kelurahan Pandang-Pandang, karena desa ini di samping lokasinya terpencil juga karena masih dianggap oleh pemerintah setempat bahwa desa tersebut belum saatnya membutuhkan banyak sarana pendidikan, rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13.
Sarana Pendidikan Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	JENIS PENDIDIKAN	SEKOL	KELAS	MURID	GURU
01	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	-
02	SD dan Sederajat	2	12	376	20
03	SMP dan Sederajat	1	6	283	14
04	SMTA dan Sederajat	1	6	93	26
05	Akademi/Universitas	-	-	-	-

Sumber: Kantor Depdikbud Kecamatan Pallangga, 1996.

Kesehatan

Sarana kesehatan juga secara formal hampir tidak ada, namun secara non formal menurut pengakuan masyarakat setempat ada tetapi jumlahnya sangat terbatas, padahal dari segi kebutuhan kurang lebih sama demikian juga jumlah penduduknya, rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14.
Sarana Kesehatan Desa Je'netallasa
Kecamatan Pallangga
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	JENIS SARANA KESEHATAN	BANYAKNYA
01	Rumah Sakit	-
02	Rumah Sakit Bersalin/BKIA	-
03	Rumah Bersalin	-
04	Poliklinik	-
05	Puskesmas	-
06	Puskemas Pembantu	-
07	Posyandu	3
08	Tempat Prkatek Dokter	-

Sumber: Puskesmas Kecamatan Pallangga, Agustus 1996,

Adapun tenaga kesehatan yang tersedia di Desa Je'netallasa adalah: Perawat kesehatan tiga orang, ditambah dengan Dukun Bayi sebanyak lima orang.

Ekonomi

Tingkat penghasilan masyarakat Desa Je'netallasa adalah masih sangat tergolong rendah jika dibandingkan pendapatan rata-rata dengan tingkat kebutuhan manusia dalam setiap bulannya, yakni masih lebih dari 60% dari jumlah anggota masyarakat yang berpendapatan kurang dari Rp.100.000,- dalam setiap bulannya.

Kemudian jenis pekerjaan yang digeluti oleh anggota masyarakat di desa ini dapat memberikan gambaran, bahwa di Desa Je'netallasa jika ditinjau dari gerak roda perekonomian adalah memiliki aktivitas usaha yang cukup banyak, namun penghasilannya masih tergolong masih sangat rendah. Hal ini juga sekaligus bisa menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, karena terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah terhadap beragamnya jenis pekerjaan tersebut adalah memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan warga masyarakat pada umumnya. Secara rinci dari jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15.
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KK
01	Pegawai Negeri Sipil dan ABRI	95
02	Karyawan Swasta	19
03	Pedagang/Pengusaha	32
04	Petani	447
05	Pensiunan	19
06	Pertukangan/Kerajinan	133
07	Sopir Mobil	9
08	Montir	4
09	Buruh	53
10	Dan lain-lain	27
***	J U M L A H	838

Sumber: Kantor Desa Je'netallasa, Agustus 1996,

Sebenarnya desa ini memiliki potensi (sumber daya alam) yang berprospek bagus, tetapi pengelolaannya belum mendapat perhatian yang berarti dari Pemerintah Daerah sehingga pendapatan masyarakatnya masih dibawah standard rata-rata.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian tentang keterkaitan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan Pemerintah Daerah, peningkatan pendapatan masyarakat demikian juga dalam menyalurkan aspirasinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain itu, juga dikemukakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Pelayanan Pemerintah Daerah

Pelayanan yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat yakni yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi. Namun istilah tersebut pada umumnya digunakan untuk menyatakan adanya beraneka ragam pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas-Dinas Daerah, yaitu dalam rangka meningkatkan di samping kualitas juga kuantitas hidup masyarakat.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, dari data yang kami peroleh ada 24 Dinas Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun menurut pengakuan para responden pada dua Desa/Kelurahan, dari ke-24 Dinas tersebut didalam operasionalisasi tugas-tugasnya tidak semuanya langsung menyentuh atau dirasakan oleh anggota masyarakat yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan warga

masyarakat lokal.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas-tugas dari Dinas-Dinas yang dimaksudkan di atas, setelah kami mengamati dan menanyakan langsung kepada warga masyarakat lokal, maka ada beberapa operasionalisasi tugas dari Dinas-Dinas yang dianggap sangat sering dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu sejumlah dinas daerah yang sering:

Pertama, memberikan beban kepada warga masyarakat lokal langsung, dan mereka langsung menerima jasa/barang atau pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Kedua, memberikan beban kepada warga masyarakat lokal tetapi tidak langsung menerima jasa/barang atau pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Adapun Dinas-Dinas Daerah yang dimaksudkan adalah:

Di Kelurahan Pandang-Pandang diantaranya pelayanan yang berkaitan dengan tugas-tugas dari Dinas: Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Kebersihan dan pertamanan, Koperasi dan Pengusaha Kecil, serta Dinas Pendapatan Daerah.

Di Desa Je'netallasa, meliputi Dinas: Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Koperasi dan Pengusaha Kecil, Perdagangan dan Dinas Pertanian. Sedangkan Dinas-dinas daerah lainnya masyarakat menganggap cuma memberikan beban tetapi Pemerintah Daerah tidak memberikan jasa/barang atau pelayanan sama sekali.

Sebagai dasar untuk mengetahui kualitas dan kuantitas

pelayanan (salah satu aspek kesejahteraan) yang dirasakan atau diterima oleh warga masyarakat lokal. Maka dalam penelitian ini ada empat kategori yang dijadikan dasar atau indikator yakni: (a) Waktu pelayanan, tentang tingkat kecepatan yang dirasakan oleh masyarakat, (b) Biaya Pelayanan, biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, (c) Prilaku pelayanan, tentang tingkat keramahan yang dirasakan oleh masyarakat, dan (d) Kebutuhan pelayanan, tentang jumlah sarana dan prasarana pelayanan (jumlah personil dan sarana material lainnya) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan di Kelurahan Pandang-Pandang

Waktu Pelayanan

Setelah diadakan penelitian tentang waktu pelayanan atau tingkat kecepatan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat pada Kelurahan Pandang-Pandang terhadap pelaksanaan otonomi daerah dari Dinas-Dinas Daerah yang dianggap relevan untuk diteliti (sebagaimana tersebut di atas) dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat lokal tersebut.

Maka faktanya dapat dicermati dari hasil tanggapan warga masyarakat lokal terhadap kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dinas-Dinas Daerah, khususnya dalam hal kecepatan pelayanan yang dirasakan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhannya, jelasnya dapat dilihat tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang
Terhadap Waktu Pelayanan
Oleh Pemda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	WAKTU PELAYANAN			
		S. Cepat (%)	Cepat (%)	Lambat (%)	S. Lambat (%)
PNS/ABRI (38 KK)	Kesehatan	11 (28,95)	21 (55,26)	5 (13,16)	1 (2,63)
	Pendidikan dan Kebudayaan	13 (34,21)	19 (50,00)	6 (15,79)	-
	Kebersihan dan Pertamanan	-	5 (13,16)	20 (52,63)	13 (34,21)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	16 (42,10)	19 (50,00)	3 (7,89)	-
	Pendapatan Daerah	7 (18,42)	27 (71,05)	4 (10,53)	-
NON PNS/ABRI (56 KK)	Kesehatan	2 (3,57)	13 (23,21)	29 (51,78)	12 (21,43)
	Pendidikan dan Kebudayaan	13 (23,21)	16 (28,57)	19 (33,93)	8 (14,28)
	Kebersihan dan Pertamanan	-	4 (7,14)	21 (37,50)	31 (55,36)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	9 (16,07)	22 (39,28)	13 (23,21)	12 (21,43)
	Pendapatan Daerah	17 (30,36)	21 (37,50)	11 (19,64)	7 (12,50)

Sumber : Data Primer, 1996.

Keterangan : S: Sangat

Pada tabel tersebut di atas, di Kelurahan Pandang-Pandang, tingkat kecepatan pelayanan yang dirasakan dari 94 Kepala Keluarga (KK) yang dikelompokkan menjadi dua, yakni Kelompok PNS/ABRI adalah tergolong "cepat" bahkan beberapa responden mengatakan "sangat cepat", kecuali waktu pelayanan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dirasakan masih

"lambat". Sedangkan pada kelompok Non PNS/ABRI adalah mereka merasakan masih "lambat" menerima pelayanan dari Pemerintah Daerah, kecuali dari Dinas Pendapatan Daerah dan Koperasi adalah pelayanannya cepat.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, maka seorang informan yang bernama DG. NG (tokoh pengamat sosial dan pembangunan), berumur 47 tahun, menyatakan:

"Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Gowa sekarang ini, apalagi sejak ditetapkannya Kabupaten Gowa sebagai daerah percontohan (pilot proyek) pelaksanaan otonomi daerah, yang kami rasakan dan saya lihat masyarakat yang lain juga merasakannya. Adalah harapan untuk mencapai kesejahteraan masih sangat jauh bahkan yang kami rasakan adalah justru sebaliknya yakni meresahkan warga masyarakat, contohnya pada dinas kebersihan disamping pembayarannya agak mahal lebih-lebih sering terlambat mengangkut sampah, sehingga sampahnya bertumpuk dan berbau busuk".

Jadi, berdasarkan pengamatan kami di lapangan (lokasi penelitian) tentang apa-apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat lokal khususnya mengenai kecepatan pelayanan di bidang kebersihan memang demikianlah yang terjadi, namun keluhan ini sebenarnya tidak merata. Hal ini diakui sendiri oleh para petugas kebersihan, disebabkan karena sarana angkutan sampah masih sangat terbatas.

Kemudian pada bidang kesehatan dan pendidikan sebagian responden mengatakan lambat melayani. Hal seperti itu sebenarnya tidak demikian, setelah kami konfirmasi dengan beberapa petugas kesehatan dan pendidikan yang sementara bertugas.

Mereka mengatakan "sebenarnya cuma masyarakatnya yang

kurang bersabar. tidak mau antri". Sedangkan kalau menurut pengamatan kami pada beberapa kesempatan di lokasi penelitian, memang kadang-kadang petugas pelayanan terlambat memberikan pelayanan, disebabkan karena mereka kurang disiplin masuk kantor pada jam-jam kerja yang telah ditentukan dan berbagai alasan lainnya yang sifatnya sangat subjektif.

Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan yang kami maksudkan dalam penelitian ini adalah banyaknya biaya yang dibebankan warga masyarakat lokal dari operasional pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Dinas-Dinas Daerah), khususnya yang berkenaan dengan sejumlah kebutuhan yang diinginkan dengan konsekuensi dana atau biaya yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat lokal tersebut.

Maka berikut ini, secara nyata dikemukakan tanggapan warga masyarakat lokal tentang biaya pelayanan yang selama ini dirasakan dari sejumlah pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas-Dinas Daerah.

Tabel 5.2
Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang
Terhadap Biaya Pelayanan
Oleh Penda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	BIAYA PELAYANAN			
		S.Murah (%)	Murah (%)	Mahal (%)	S.Mahal (%)
PNS/ABRI (38 KK)	Kesehatan	13 (34,21)	23 (60,53)	2 (5,26)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	13 (34,21)	25 (65,79)	-	-
	Kebersihan dan Pertamanan	-	5 (13,16)	24 (63,16)	9 (23,68)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	12 (31,58)	23 (60,53)	3 (7,89)	-
	Pendapatan Daerah	5 (13,16)	29 (76,31)	4 (10,53)	-
NON PNS/ABRI (56 KK)	Kesehatan	17 (30,36)	31 (55,36)	8 (14,28)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	17 (30,36)	34 (60,71)	5 (8,93)	-
	Kebersihan dan Pertamanan	-	4 (7,14)	31 (55,36)	21 (37,50)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	9 (16,07)	29 (51,78)	17 (30,35)	-
	Pendapatan Daerah	17 (30,36)	29 (51,78)	10 (17,86)	-

Sumber : Data Primer, 1996.

Keterangan : S: Sangat

Pada tabel tersebut di atas, secara singkat dapat dikemukakan, bahwa beban biaya pelayanan yang dirasakan warga masyarakat lokal baik oleh PNS/ABRI maupun Non PNS/ABRI adalah tergolong "murah" bahkan ada beberap responden mengatakan "sangat murah".

Kecuali bidang kebersihan, pengakuan warga masyarakat

pada umumnya mengatakan "mahal" bahkan ada beberapa KK mengatakan biaya pelayanan kebersihan adalah "sangat mahal".

Hal ini sesuai dengan pernyataan tokoh masyarakat di atas, yaitu sebagaimana hasil wawancara kami terdahulu, (DG.NG) mengatakan "..., pelayanan di bidang kebersihan di samping "agak mahal" juga sering terlambat diangkut sehingga berbau busuk". Pengakuan ini diperjelas oleh salah seorang aparat Kelurahan Pandang-Pandang, "Bahwa di Kabupaten Gowa umumnya dan Kelurahan Pandang-Pandang khususnya adalah memang biaya pelayanan kebersihan masih tergolong agak mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya".

Setelah kami mengamati lebih mendalam, biaya pelayanan yang dibebankan kepada warga masyarakat lokal dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dikatakan murah karena mereka rata-rata mampu membayarnya. Lain halnya bagi beberapa responden (KK) yang mengatakan mahal bahkan sangat mahal karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Jadi pada dasarnya penilaian warga masyarakat tentang mahal atau tidaknya biaya pelayanan yang dibebankan kepadanya adalah sangat ditentukan dari kemampuan finansial yang mereka miliki untuk membayarnya.

Perilaku Pelayanan

Perilaku pelayanan yang di teliti adalah yang berkenaan dengan sikap dan tingkat keramahan yang ditampilkan oleh aparat Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan

kepada warga masyarakat lokal. Maka lebih jelasnya, berikut ini digambarkan tentang tanggapan warga masyarakat lokal Kelurahan Pandang-Pandang terhadap perilaku pelayanan yang mereka terima dari Dinas-Dinas Daerah.

Tabel 5.3
Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang
Terhadap Perilaku Pelayanan
Oleh Penda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	PERILAKU PELAYANAN			
		S. Ramah (%)	Ramah (%)	T. Ramah (%)	S. T. Ramah (%)
PNS/ABRI (38 KK)	Kesehatan	11 (28,95)	23 (60,53)	4 (10,52)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	15 (39,47)	21 (55,26)	2 (5,26)	-
	Kebersihan dan Pertamanan	-	15 (39,47)	23 (60,53)	-
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	17 (44,74)	19 (50,00)	2 (5,26)	-
	Pendapatan Daerah	8 (21,05)	29 (76,32)	1 (2,63)	-
NON PNS/ABRI (56 KK)	Kesehatan	12 (21,43)	32 (57,14)	12 (21,43)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	14 (25,00)	23 (41,07)	19 (33,93)	-
	Kebersihan dan Pertamanan	-	24 (42,86)	27 (48,21)	5 (8,93)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	11 (19,64)	29 (51,79)	16 (28,57)	-
	Pendapatan Daerah	19 (33,93)	26 (46,43)	11 (19,64)	-

Sumber : Data Primer, 1996.

Keterangan : S: Sangat, T: Tidak

Penelitian tersebut membuktikan, tanggapan warga masyarakat lokal terhadap perilaku pelayanan yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah adalah pada umumnya mengatakan, perilaku pelayanan yang diterima dari Pemda (Dinas-Dinas Daerah) adalah tergolong "ramah" bahkan beberapa (KK) mengatakan "sangat ramah", namun tidak bisa dipungkiri menurut pengakuan warga masyarakat adalah masih ada beberapa petugas yang tidak ramah bahkan ada yang sangat tidak ramah, (lihat tabel 5.3), seperti pada bidang kebersihan.

Sehubungan dengan fakta tersebut di atas, oleh se orang informan yang kami wawancarai bernama Z, berumur 65 tahun (seorang pensiunan PNS/tokoh adat), di Kelurahan Pandang-Pandang menanggapi jawaban dari warga masyarakat lokal tersebut, dengan mengemukakan suatu prinsip orang bugis Makassar. Dia menyatakan:

"Modal utama orang Bugis Makassar adalah bertingkah laku yang sopan terhadap sesamanya, sehingga rezekinya mudah dikabulkan oleh Sang Pencipta." Dan memang kalau disadari sedalam-dalamnya bahwa kalau manusia itu berperilaku baik terhadap sesamanya, maka dia menyadari keberadaannya sebagai mahluk sosial. Bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain dan sekaligus harus saling tolong menolong terhadap segala perbuatan yang baik, sehingga dengan sendirinya rezeki akan mudah didapatkan".

Ungkapan dari tokoh masyarakat (informan) di atas, bukan berarti orang Bugis Makassar itu perbuatannya semuanya baik, namun kalau mereka memegang teguh salah satu prinsip tersebut (karena masih banyak prinsip yang lainnya), maka niscaya dapat dijamin perbuatannya juga akan baik.

Tetapi disisi lain, oleh informan lain bernama A, umur 41 tahun (tokoh pemuda), mengemukakan: "aparatus pemerintah atau petugas dalam memberikan pelayanan adalah kadang-

kadang pilih kasih, jadi tingkat keramahan seorang petugas itu adalah relatif adanya". Pernyataan seperti ini adalah pada dasarnya sesuai dengan pengamatan kami di lapangan.

Sehubungan dengan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka kami menilai, penilaian warga masyarakat lokal tentang perilaku pelayanan oleh Pemerintah Daerah adalah sangat ditentukan oleh situasi dan kondisinya, siapa pelayannya, dan siapa yang dilayani serta pelayanan apa yang dirasakannya, maka penilaiannya adalah sangat subjektif.

Tetapi namun demikian, dari beberapa pernyataan tersebut, berdasarkan pengamatan kami pada beberapa instansi pemerintah adalah pada dasarnya pelayanan yang diberikan adalah cukup ramah.

Kebutuhan Pelayanan

Kebutuhan pelayanan dalam penelitian ini adalah difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan jumlah sarana pelayanan serta jumlah tenaga pelayanan yang tersedia pada setiap Dinas daerah yang mengadakan pelayanan kepada warga masyarakat lokal.

Adapaun tanggapan warga masyarakat lokal terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap Dinas Daerah, maka secara jelas faktanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Tanggapan Masyarakat Kelurahan Pandang-Pandang
Terhadap Kebutuhan Pelayanan
Oleh Pemda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	KEBUTUHAN PELAYANAN			
		S. Banyak (%)	Banyak (%)	Kurang (%)	S. Kurang (%)
PNS/ABRI (38 KK)	Kesehatan	12 (31,58)	23 (60,53)	3 (7,89)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	15 (39,47)	23 (60,53)	-	-
	Kebersihan dan Pertamanan	-	4 (10,53)	21 (55,26)	13 (34,21)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	14 (36,84)	21 (55,26)	3 (7,89)	-
	Pendapatan Daerah	12 (31,58)	26 (68,42)	-	-
NON PNS/ABRI (56 KK)	Kesehatan	15 (26,78)	29 (51,79)	12 (21,43)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	26 (46,43)	30 (53,57)	-	-
	Kebersihan dan Pertamanan	-	4 (7,14)	25 (44,64)	27 (48,21)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	19 (33,93)	26 (46,43)	11 (19,64)	-
	Pendapatan Daerah	22 (39,29)	25 (44,64)	9 (16,07)	-

Sumber : Data Primer, 1996

Keterangan : S: Sangat

Dalam penelitian ini terbukti dari tanggapan warga masyarakat menunjukkan, kebutuhan sarana pelayanan pada setiap Dinas Daerah adalah pada umumnya mengatakan "banyak" bahkan ada beberapa responden (KK) menjawab jumlahnya "sangat banyak".

Sedangkan khusus mengenai sarana dan prasarana pela-

yanan di bidang kebersihan adalah masih tergolong "Sangat kurang", kekurangan ini meliputi keduanya yakni baik sarana maupun tenaganya.

Hal itu dapat dilihat pada tabel 5.4. dan relevan dengan hasil wawancara kami pada halaman terdahulu yang dikemukakan oleh seorang informan bernama tokoh masyarakat (DG.NG) yang diperkuat oleh keterangan salah seorang aparat Kelurahan Pandang-Pandang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sempat mewawancarai seorang informan dari tokoh masyarakat di Lingkungan Mangasa Pandang-Pandang, bernama AH (pengamat sosial dan pembangunan), dengan umur 53 tahun, dia mengemukakan:

"Sehubungan dengan sarana pelayanan kebersihan di daerah kami adalah keadaannya sangat memprihatinkan, karena mulai dari penanganan selokan (*drainage*) sampai pada masalah kebersihan lingkungan pada umumnya adalah masih sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dan juga yang lebih menyakitkan hati dari warga masyarakat adalah kita dituntut selalu tepat waktu membayar biaya (retribusi) kebersihan sementara sampah masih tetap dibiarkan berserakan karena Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sudah penuh, kalau ditanyakan kepada Aparat Kelurahan, dia mengatakan bersabarlah dulu, mobil pengangkut sampahnya memang masih kurang demikian juga tenaganya".

Sedangkan menurut pengamatan kami di lapangan (lokasi penelitian), sarana dan prasarana di Kelurahan Pandang-Pandang pada berbagai bidang kecuali bidang kebersihan, adalah pada dasarnya memang sudah memenuhi kebutuhan pelayanan. Hal demikian ini disebabkan karena kelurahan ini adalah di samping sebagai kawasan perkotaan juga termasuk sebagai

Ibukota kabupaten.

Pada dasarnya sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh Pemda adalah sudah dianggap oleh warga masyarakat lokal sudah cukup kecuali sarana dan prasarana di bidang kebersihan.

Pelayanan di Desa Je'netallasa

Waktu Pelayanan

Penelitian di desa ini hambatan utama yang kami alami adalah waktu untuk menemui warga masyarakatnya sangat susah, dan kalau kami sempat ketemu mereka tidak mau langsung untuk diwawancarai atau enggan memberikan jawaban dengan berbagai alasan. Maka dengan demikian, kami menempuh berbagai pendekatan sehingga pada akhirnya juga mereka mau diwawancarai dan mengemukakan kenyataan-kenyataan apa adanya.

Adapun hasil penelitian yang kami peroleh yang berkenaan dengan tingkat kecepatan pelayanan yang diterima dari aparat Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas-Dinas Daerah, adalah sebagaimana terungkap pada tabel berikut (tabel 5.5) tentang tanggapan warga masyarakat mengenai waktu pelayanan yang mereka terima.

Tabel 5.5
Tanggapan Masyarakat Desa Je'netallasa
Terhadap Waktu Pelayanan
Oleh Penda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	WAKTU PELAYANAN			
		S.Cepat (%)	Cepat (%)	Lambat (%)	S.Lambat (%)
PNS/ABRI (12 KK)	Kesehatan	4 (33,33)	7 (58,33)	1 (8,33)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	5 (41,67)	7 (58,33)	-	-
	Perdagangan	3 (25,00)	9 (75,00)	-	-
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	5 (41,67)	7 (58,33)	-	-
	Pertanian Tanaman Pangan	7 (58,33)	5 (41,67)	-	-
NON PNS/ABRI (73 KK)	Kesehatan	11 (15,07)	32 (43,83)	21 (28,77)	9 (12,33)
	Pendidikan dan Kebudayaan	8 (10,98)	21 (28,76)	33 (45,20)	11 (15,06)
	Perdagangan	-	13 (17,81)	33 (45,20)	27 (37,99)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	3 (4,11)	14 (19,18)	35 (47,94)	21 (28,77)
	Pertanian Tanaman Pangan	9 (12,33)	21 (28,77)	36 (49,31)	7 (9,59)

Sumber : Data Primer, 1996.

Keterangan : S: Sangat

Pada tabel tersebut di atas, membuktikan khususnya warga masyarakat pada kelompok pekerjaan PNS/ABRI pada umumnya mengatakan tingkat kecepatan pelayanan yang mereka terima adalah termasuk "cepat". Tetapi lain halnya bagi warga masyarakat pada kelompok pekerjaan Non PNS/ABRI, yang diarsakan justeru sebaliknya kecuali pada bidang kesehatan.

Dari hasil tanggapan tersebut, yang mengherankan adalah pelayanan di bidang pertanian yang seharusnya di pedesaan adalah cepat, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya yakni pelayanan dirasakan "terlambat". Pada bidang pertanian khususnya, seorang informan bernama DG. L (tokoh adat) berumur 57 tahun, menyatakan:

"Yang menyebabkan pelayanan sering terlambat oleh petugas pertanian setempat adalah pertama petugasnya tidak sering tidak ada di desa, sehingga sering juga terlambat untuk melaksanakan tugasnya. Dan kadang-kadang juga kalau masyarakat membutuhkan pelayanan, petugasnya menginginkan secara formal, seperti dikumpulkan dulu oleh Kepala Desa kemudian diberikan pelayanan, ceramah dan lain-lainnya. Petugasnya kadang-kadang tidak mau atau jarang mau memberikan pelayanan secara perorangan demikian juga secara informal terhadap warga masyarakat lokal".

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah kami konfirmasi dengan petugas Dinas Pertanian di Desa ini ditambah dengan pengamatan yang kami lakukan, adalah tidak semuanya benar, yakni di pihak petugas pertanian mengemukakan "kita (petugas pertanian) selalu siap memberikan penyuluhan dan semacamnya kepada para petani tetapi mereka kadang-kadang yang tidak mau atau tidak punya waktu".

Jadi dengan demikian kami menyimpulkan, antara petugas dari Dinas Pertanian dengan warga masyarakat petani di desa ini hubungannya kurang terjalin dengan baik, dan terbukti pada saat kami mengadakan wawancara terhadap salah seorang diantara mereka (petani) mengatakan "petugas pertanian kita di sini adalah kurang mamasyarakat (maksudnya kurang pendekatan kepada masyarakat petani)" serta tenaganya masih

perlu ditambah, sehingga pelayanan lebih mudah dan cepat.

Biaya Pelayanan

Secara operasional Dinas-Dinas daerah yang diteliti adalah sejumlah Dinas Daerah yang memberikan beban biaya kepada warga masyarakat dan langsung menerima jasa/barang. Adapun tanggapan warga masyarakat terhadap biaya-biaya yang dibebankan dari Dinas-Dinas tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6
Tanggapan Masyarakat Desa Jenebera
Terhadap Biaya Pelayanan
Oleh Pemda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	BIAYA PELAYANAN			
		S.Murah (%)	Murah (%)	Mahal (%)	S.Mahal (%)
PNS/ABRI (12 KK)	Kesehatan	5 (41,67)	7 (58,33)	-	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	8 (66,67)	4 (33,33)	-	-
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	7 (58,33)	5 (41,67)	-	-
	Pertanian Tanaman Pangan	7 (58,33)	5 (41,67)	-	-
NON PNS/ABRI (73 KK)	Kesehatan	11 (15,06)	21 (28,77)	37 (50,68)	4 (5,48)
	Pendidikan dan Kebudayaan	18 (24,66)	42 (57,53)	13 (17,81)	-
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	14 (19,18)	36 (49,32)	14 (19,18)	9 (12,32)
	Pertanian Tanaman Pangan	16 (21,92)	21 (28,77)	36 (49,31)	-

Sumber : Data Primer, 1996.

Keterangan : S: Sangat

Dalam tabel tersebut di atas, pada umumnya biaya pelayanan yang dirasakan oleh warga masyarakat adalah murah, kecuali biaya pelayanan kesehatan dan pertanian oleh warga masyarakat yang Non PNS/ABRI mengatakan "mahal". Hal ini disebabkan karena menurut pengamatan kami memang pendaan sarana pertanian masih terbatas, demikian juga halnya pada bidang kesehatan, dikatakan mahal karena memang sarana dan prasarananya masih tergolong kurang, sehingga warga masyarakat kebanyakan lebih senang ke Dukun-dukun Kampung.

Hal tersebut oleh seorang informan bernama DG. A (tokoh agama) berumur 42 tahun, menyatakan:

"Warga masyarakat yang tinggal di pedesaan pada umumnya masih senang berobat kepada Dukun, karena mereka beranggapan bahwa Dukun itu jauh lebih mujarab dan lebih mudah dijangkau jika dibandingkan dengan pengobatan ke dokter, hal seperti ini terjadi disebabkan karena penyuluhan tentang kesehatan oleh petugas-petugas kesehatan di pedesaan hampir saja tidak pernah dilakukan karena tugasnya sangat sedikit atau hampir saja tidak ada".

Jadi menurut kami, dengan adanya pernyataan seperti itu, sehingga dapat dikatakan warga masyarakat itu biasanya tidak mengikuti program-program pemerintah, bukan semata-mata karena kebandelannya tetapi kadang-kadang karena personalnya kurang atau memang mereka belum mengetahui tentang fungsi dan kegunaan dari pada keberadaan program-program tersebut, anggapan seperti itulah terjadi di Desa Je'netallasa ini, jelasnya lihat tabel 4.14.

Perilaku Palayanan

Tanggapan warga masyarakat terhadap perilaku pelayanan adalah berfokus pada tingkat keramahan yang diterima dari pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah. Untuk lebih jelasnya tanggapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7
Tanggapan Masyarakat Desa Je'netallasa
Terhadap Perilaku Pelayanan
Oleh Pemda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	PERILAKU PELAYANAN			
		S. Ramah (%)	Ramah (%)	T. Ramah (%)	S.T. Ramah (%)
PNS/ABRI (12 KK)	Kesehatan	8 (66,67)	4 (33,33)	-	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	9 (75,00)	3 (25,00)	-	-
	Perdagangan	7 (58,33)	5 (41,67)	-	-
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	10 (83,33)	2 (16,67)	-	-
	Pertanian Tanaman Pangan	8 (66,67)	4 (33,33)	-	-
NON PNS/ABRI (73 KK)	Kesehatan	20 (27,39)	32 (43,84)	21 (28,77)	-
	Pendidikan dan Kebudayaan	19 (26,03)	33 (45,20)	21 (28,77)	-
	Perdagangan	13 (17,81)	27 (36,99)	33 (45,20)	-
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	14 (19,18)	24 (32,88)	35 (47,94)	-
	Pertanian Tanaman Pangan	21 (28,77)	36 (49,32)	16 (21,91)	-

Sumber : Data Primer, 1996.
 Keterangan : S: Sangat, T: Tidak

Tabel tersebut di atas, dapat memberikan gambaran pada umumnya perilaku pelayanan yang diterima oleh warga masyarakat lokal adalah "ramah", kecuali pelayanan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi adalah pada dasarnya termasuk "kurang ramah", alasan mereka mengatakan demikian karena pelayanan kedua Dinas tersebut sering terlambat dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat lokal.

Sehubungan tanggapan-tanggapan tersebut, maka salah seorang informan yang kami wawancarai pada bernama B (tokoh pemuda) berumur 38 tahun, menyatakan "pada dasarnya aparat Pemerintah Daerah (Dinas-Dinas) orangnya ramah-ramah, tetapi jarang kita ketemu dan kadang-kadang kalau kita butuhkan mereka tidak ada di tempatnya (maksudnya dikantornya)".

Jadi menurut pengamatan kami, tanggapan warga masyarakat yang berkenaan dengan tingkat keramahan aparat Pemerintah Daerah adalah penilaiannya bukan hanya pada aspek bagaimana cara mereka melayani warga masyarakat saja, tetapi juga dalam hal kecepatan dan kebutuhan pelayanan yang mereka terima dari petugas Dinas-Dinas yang ada artinya perilaku pelayanan yang dinilai adalah banyak aspek.

Kebutuhan Pelayanan

Kebutuhan pelayanan yang dimaksudkan adalah untuk mengungkapkan tentang jumlah sarana dan prasarana pelayanan

yang dimiliki oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut (tabel 5.8) tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap kebutuhan pelayanan yang mereka rasakan.

Tabel 5.8
Tanggapan Masyarakat Desa Jenetallasa
Terhadap Kebutuhan Pelayanan
Oleh Pemda Kabupaten Dati II Gowa

KELOMPOK PEKERJAAN	DINAS-DINAS DAERAH	KEBUTUHAN PELAYANAN			
		S. Banyak (%)	Banyak (%)	Kurang (%)	S. Kurang (%)
PNS/ABRI (12 KK)	Kesehatan	-	2 (16,67)	8 (66,66)	2 (16,67)
	Pendidikan dan Kebudayaan	4 (33,33)	8 (66,67)	-	-
	Perdagangan	3 (25,00)	9 (75,00)	-	-
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	4 (33,33)	8 (66,67)	-	-
	Pertanian Tanaman Pangan	5 (41,67)	7 (58,33)	-	-
NON PNS/ABRI (73 KK)	Kesehatan	-	5 (6,85)	52 (71,23)	16 (21,92)
	Pendidikan dan Kebudayaan	8 (10,96)	54 (73,97)	11 (15,07)	-
	Perdagangan	-	13 (17,81)	35 (47,94)	25 (34,25)
	Koperasi dan Pengusaha Kecil	3 (4,11)	45 (61,64)	25 (34,25)	-
	Pertanian Tanaman Pangan	9 (12,33)	38 (52,05)	26 (35,62)	-

Sumber : Data Primer, 1996.

Keterangan : S: Sangat

Dalam tabel tersebut di atas, membuktikan tentang sarana dan prasarana yang sangat membutuhkan pengadaan dari

menunjukkan pada suatu suasana kehidupan di perkotaan (*urban*) dan Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga, yakni yang dapat menunjukkan pada suatu suasana kehidupan di pedesaan (*rural*).

Adapun dugaan-dugaan yang mendasari peneliti untuk menentukan kedua kategori tersebut di atas, yang berkaitan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan kesejahteraan warga masyarakat lokal adalah sebagai berikut:

Pertama, warga masyarakat yang bertempat tinggal di perkotaan (*urban*) diduga pada umumnya mereka mengetahui tentang hakikat, tujuan dan sasaran daripada otonomi daerah tersebut, sedangkan warga masyarakat yang bermukim di pedesaan (*rural*) adalah sebaliknya yaitu mereka tidak banyak mengetahui atau sama sekali tidak mengetahui tentang otonomi daerah tersebut.

Kedua, Warga masyarakat lokal yang bertempat tinggal di perkotaan (kelurahan) adalah mereka diduga dapat merasakan dan menikmati secara langsung tentang betapa pentingnya pelaksanaan otonomi daerah bagi peningkatan kesejahteranya. Sementara bagi warga masyarakat yang bermukim di pedesaan diduga justeru pelaksanaan otonomi daerah bagi mereka adalah tidak mempunyai arti atau tidak mempengaruhi kehidupannya, dalam hal peningkatan kesejahterannya.

Ketiga, dengan dasar pernyataan tersebut di atas, maka mereka dapat berkesimpulan, bahwa bagi warga masyarakat kota (*urban*) menganggap pelaksanaan otonomi daerah adalah

penting bagi kehidupannya, sedangkan bagi warga masyarakat pedesaan (*rural*) yang dirasakan adalah sebaliknya.

Subjek Penelitian

Studi kasus ini dilakukan pada satu kelurahan yang dapat menunjukkan kehidupan di perkotaan (*urban*) dan satu desa yang dapat menunjukkan kehidupan di pedesaan (*rural*). Pemilihan terhadap kedua Kelurahan/Desa tersebut, dilakukan secara "purposive", yaitu memilih atau menentukan subyek penelitian dengan sengaja atau pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pemilihan secara sengaja tersebut dengan maksud menemukan suatu lokasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, dengan pertimbangan: masyarakat yang tinggal di kelurahan (perkotaan) Pandang-Pandang adalah dianggap bisa mewakili warga masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa (pedesaan) Jenetallasa adalah dianggap bisa mewakili warga masyarakat yang bermukim di pedesaan.

Dalam penelitian ini yang dipandang sebagai unit analisis adalah warga masyarakat lokal, sedangkan unit pengamatannya rumah tangga dari warga masyarakat tersebut, yang dicerminkan oleh Kepala Keluarga (KK). Hal ini didasarkan atas pertimbangan, fenomena (sosial, ekonomi, politik) yang dipelajari, diteliti dan dicermati adalah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan warga masyarakat lokal akibat dari pelaksanaan otonomi daerah.

pemerintah daerah adalah pada bidang kesehatan yang tergolong "sangat kurang", padahal menurut pengakuan warga masyarakat lokal di desa ini, sarana inilah sangat penting diantara yang penting lainnya.

Hal ini dapat pula dibuktikan pada (tabel 4.14) pada bab terdahulu. Demikian juga sarana dan prasarana perdagangan masih tergolong kurang, bidang ini juga menurut masyarakat adalah penting keberadaannya dalam rangka mengurus dan menyelamatkan hasil-hasil produksi yang dihasilkan oleh warga masyarakat lokal di pedesaan yang kadang-kadang sulit pemasarannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat mengatakan: "Sarana dan prasarana kesehatan di desa ini adalah sangat kurang, sehingga warga masyarakat di desa ini kadang-kadang penyakitnya sudah parah baru di bawa ke Ibukota Kabupaten untuk berobat dan biasanya sudah terlambat dan tidak bisa tertolong lagi".

Lain halnya dengan komentar warga masyarakat tentang sarana dan prasarana Pertanian dan Koperasi, oleh salah seorang informan bernama AN (tokoh tani) berumur 58 tahun, menyatakan: "sarana yang bagus dan tenaga yang banyak adalah tidak ada artinya kalau tidak difungsikan dengan baik pula, karena kadang-kadang petugas dari Dinas Pertanian dan Koperasi kurang siap memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada warga masyarakat lokal yang membutuhkannya".

Pernyataan seperti itu terungkap oleh anggota masya-

rakat, pada saat mereka membutuhkan pelayanan tetapi aparatnya tidak ditemukan dikantornya.

Sebagai bahan perbandingan, jumlah pegawai di Kabupaten Gowa sebanyak 2.273 orang (lihat tabel 4.8), dan lebih rinci lagi lihat tabel 4.9, jika dianalisa secara rasional, dengan jumlah pegawai sebanyak itu maka kabupaten Gowa tidak akan kekurangan tenaga pelayanan, termasuk sampai ke pelosok desanyapun tidak akan kekurangan pegawai.

Menurut kami setelah mengamati langsung di lapangan, hal-hal yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pelayanan dalam suasana kehidupan di desa ini adalah memang kadang-kadang demikianlah adanya, oleh karena itu perhatian Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dan memenuhinya sangat diharapkan oleh warga masyarakat khususnya yang bermukim di pedesaan. Dan sebenarnya kenyataan seperti ini tidak seharusnya terjadi, karena sudah sejak lama pemerintah memprogramkan peningkatan pelayanan di desa-desa seluruh Indonesia, dengan melalui programnya "Gerakan Kembali ke Desa".

Peningkatan Penghasilan

Dalam penelitian ini, diungkapkan salah satu unsur dari manifestasi keberadaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, tepatnya pada Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa. Maka berikut ini (tabel 5.9) diketahui tentang tanggapan warga masyarakat lokal pada dua desa tersebut terhadap tingkat penghasilan yang mereka

peroleh atau rasakan dari upaya-upaya Pemerintah Daerah (Dinas-Dinas Daerah) yang telah dibentuk dalam rangka mencapai kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Tabel 5.9
Tanggapan Masyarakat Terhadap Peningkatan Penghasilan
Oleh Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dati II Gowa

ALTERNATIF PENILAIAN	KELURAHAN/DESA			
	PABDANG-PANDANG		JE'NETALLASA	
	PNS/ABRI (%)	NON PNS (%)	PNS/ABRI (%)	NON PNS (%)
Sangat Meningkatkan	-	-	-	-
Meningkat	21 (55,26)	15 (26,79)	3 (25,00)	14 (19,18)
Cukup Meningkatkan	10 (26,32)	28 (50,00)	7 (58,33)	17 (23,29)
Tidak Meningkatkan	7 (18,42)	13 (23,21)	2 (16,67)	33 (45,21)
Menurun	-	-	-	9 (12,32)
Sangat Menurun	-	-	-	-

Sumber: Data Primer, 1996.

Pada tabel di atas, secara umum dapat dideskripsikan, bahwa tingkat penghasilan warga masyarakat lokal baik di Kelurahan Pandang-Pandang maupun di Desa Je'netallasa adalah masih memerlukan perhatian dari Pemerintah karena masih ada warga masyarakat (responden) mengatakan "tidak mengalami peningkatan penghasilan" bahkan ada beberapa responden pada Desa Je'netallasa mengatakan penghasilannya menurun yang disebabkan dengan kurang berfungsinya aparat pelaksana otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Tetapi dibalik dari pernyataan tersebut, di Kelurahan Pandang-Pandang oleh seorang informan yang kami wawancarai, justeru mengatakan sebaliknya, yaitu bernama L (tokoh pengusaha), berumur 43 tahun mengemukakan:

"Berbicara tentang penghasilan di kalangan masyarakat Pandang-Pandang adalah selama dua tahun terakhir ini Alhamdulillah, karena pendapatannya mengalami peningkatan. Sebagai bukti kami contohkan oleh para pedagang di pasar (saya juga termasuk) pendapatan kita setiap bulannya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu. Ini semua berkat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yakni dengan memberikan kemudahan-kemudahan serta penyediaan sarana pendukung lainnya bagi pedagang untuk menjalankan usahanya".

Namun disisi lain ada juga masyarakat di Kelurahan Pandang-Pandang mengeluh, diantaranya HH umur 46 tahun, dia mengungkapkan "Pemerintah Daerah belum mampu mengatasi jumlah pengangguran yang masih banyak di Kabupaten Gowa, seperti pengadaan lapangan kerja masih sangat terbatas, sehingga pendapatan mereka boleh dikatakan hampir tidak ada". Kemudian lain halnya, dengan tanggapan dan kenyataan yang terjadi di Desa Je'netallasa, yaitu yang terjadi adalah sebaliknya dari pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan di atas (diperkotaan), adapun pernyataan tersebut adalah dari salah seorang tokoh tani yang kami wawancarai bernama DG. M dengan umur 51 tahun, menyatakan:

"Masyarakat petani pada umumnya mengeluh, karena penghasilannya tidak naik bahkan cenderung menurun disebabkan karena produksi pertanian yang kita hasilkan pemasarannya sulit sekali karena sarana transportasi (jalanan menuju ke desa-desa) banyak mengalami kerusakan dan sampai sekarang ini belum diperbaiki

atau dikerjakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Bina Marga), jadi otomatis penghasilan kami menurun. Bahkan kadang-kadang hasil produksi pertanian kami jual dengan harga yang sangat rendah, karena kita (warga masyarakat) sudah sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. yah, terpaksa kita menjualnya dengan harga apa adanya".

Jadi dengan demikian menurut pengamatan kami yang didukung oleh data yang terungkap di atas, maka masalah penghasilan adalah dapat dikatakan sebagai penyakit nasional, karena kalau di perkotaan pada umumnya jumlah penganggurannya yang sangat sulit diantisipasi sementara di pedesaan masalah produksi, pemasaran dan lain-lain sebagainya, sehingga dari semua permasalahan tersebut dapat langsung atau tidak langsung mempengaruhi tingkat penghasilan warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Kenyataan seperti itu merupakan suatu pertanda, keberadaan Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten daerah Tingkat II Gowa dalam rangka meningkatkan penghasilan warga masyarakat lokal adalah belum berfungsi secara maksimal dengan kata lain kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi atau sumber daya alam yang tersedia adalah masih sangat terbatas.

Sehubungan dengan tanggapan dan pernyataan tersebut di atas, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Dinas-Dinas Daerah) dalam rangka meningkatkan penghasilan warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dirasakan dan dinikmati oleh warga masyarakat lokal baik di perkotaan

maupun di pedesaan.

Sehubungan dengan itu, Sekwilda Tingkat II Gowa, mengakui secara terus terang, bahwa kenyataan-kenyataan seperti itu disebabkan karena (1) kemampuan aparatnya yang masih sangat terbatas untuk merealisasikannya, (2) kesadaran masyarakat masih kurang, dan (3) potensi sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Dati II Gowa belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu Pemerintah Daerah tidak henti-hentinya berupaya untuk mengantisipasinya, adapun upaya-upaya antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (a) Membuat berbagai kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan upah para buruh;
- (b) Mengadakan sarana dan prasarana untuk berbagai kegiatan kursus atau diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga masyarakat lokal;
- (c) Di bidang pertanian, mengadakan pola tanam yang baik, pengadaan pengolahan hasil-hasil produksi, serta membantu masyarakat mencari pemasaran yang lebih baik dari hasil produksi yang dihasilkan, yang diistilahkan Program "Pola Tanam, Petik, Olah dan Jual";
- (d) Mengadakan pembinaan industri kecil yang bisa dikembangkan di Kabupaten Dati Gowa;
- (e) Mengadakan promosi pariwisata;
- (f) Memberikan peluang kepada putra daerah untuk bekerja pada Dinsa-Dinas Daerah yang tersedia yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki warga masyarakat lokal

setempat;

(g) Senantiasa memberikan peluang dan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha dan investor dari luar untuk dapat menanamkan modalnya dan menciptakan lapangan kerja di Daerah Tingkat II Gowa.⁶³

Demikianlah gambaran secara umum penjelasan Sekwilda Tingkat II Gowa terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penghasilan warga masyarakat lokal di daerahnya.

Namun kalau dicermati secara mendalam, maka upaya-upaya tersebut adalah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh kalangan dalam masyarakat, sehingga dengan demikian penghasilan warga masyarakat juga secara tidak langsung belum sepenuhnya bisa ditingkatkan.

Sesuai dengan pengamatan dan hasil konfirmasi kami dengan warga masyarakat di lokasi penelitian, menunjukkan upaya-upaya tersebut memang dibenarkan adanya. Namun secara nyata operasionalisasinya masih sangat sedikit.

Salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Pandang-Pandang dengan mengambil contoh pengadaan kursus dan diklat yang diupayakan oleh Pemda, menyatakan: "secara tidak langsung masyarakat umum tidak mampu untuk mengikutinya karena biayanya tidak mampu dijangkau oleh anggota masyarakat".

⁶³Sumber: Bagian Pembangunan dan Perencanaan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, 1996.

Jadi kami menilai upaya-upaya tersebut, dalam pengadaannya, Pemerintah belum mampu menyesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya, padahal kegiatan seperti ini selayaknya diserahkan kepada swasta atau lembaga-lembaga lainnya untuk mengelolanya, sehingga hasilnya bisa efisien dan efektif.

Demikian pula yang sempat kami amati di Desa Je'netallasa, tentang program "Pola Tanam dan Petiknya" memang sudah dilakukan, tetapi Program "jualnya" (pemasarannya) belum diperhatikan secara maksimal, hal ini terbukti dari keluhan-keluhan warga masyarakat tentang sulitnya pemasaran hasil produksi yang telah dihasilkan.

Penyaluran Aspirasi

Fokus pengamatan yang kami lakukan adalah mencermati secara mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah khususnya yang berhubungan dengan penyaluran aspirasi warga masyarakat lokal, untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.

Maka untuk membuktikan tentang seberapa jauhkah aspirasi mereka dapat disalurkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya penyaluran aspirasi warga masyarakat yang terkait dengan peningkatan kesejahteraannya, maka berikut ini dikemukakan tentang tanggapan warga masyarakat lokal di dua desa tentang penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa.

Tabel 5.10
Tanggapan Masyarakat Tentang Persentase Penyaluran Aspirasi
Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Gowa

ALTERNATIF PENILAIAN	KELURAHAN/DESA			
	PABDANG-PANDANG		JE'NETALLASA	
	PNS/ABRI (%)	NON PNS (%)	PNS/ABRI (%)	NON PNS (%)
Semuanya tersalurkan	-	-	-	-
Pada umumnya tersalurkan	9 (23,68)	13 (23,21)	-	-
Sebagian tersalurkan	24 (63,16)	26 (46,43)	7 (58,33)	41 (56,16)
Sebagian kecil tersalurkan	5 (13,16)	17 (30,36)	5 (41,67)	32 (43,84)
Tidak ada yang tersalurkan	-	-	-	-

Sumber : Data Primer, 1996.

Dalam tabel tersebut di atas terbukti, Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD dalam menyalurkan aspirasi warga masyarakat di samping tidak merata juga kurang mengabdikan keinginan (aspirasi) dari pada anggota masyarakat yang ada.

Sehubungan dengan data tersebut di atas, salah seorang informan di Kelurahan Pandang-Pandang yang kami wawancarai, bernama HS (tokoh pendidikan) berumur 52 tahun, menyatakan:

"Sebenarnya, Bapak-bapak dari DPRD itu mengetahui persis tentang apa yang menjadi keinginan kami (anggota masyarakat), apalagi Bapak-bapak itu (anggota DPRD) sering-sering ke lapangan melihat langsung situasi dan kondisi anggota masyarakat, jadi masalahnya adalah aspirasi atau keinginan kami itu tidak diperjuangkan untuk dipenuhinya, hal ini terbukti terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada, yaitu kurang sesuai dengan keinginan kami".

Lain halnya pernyataan yang disampaikan oleh informan di Desa Je'netallasa, yakni informan yang bernama BD (pengamat sosial dan pembangunan) berumur 47 tahun, mengemukakan:

"Bapak-bapak anggota DPRD selama ini (maksudnya priode tahun 1992-1997) saya belum pernah mendengar atau melihat ada anggota DPRD yang berkunjung ke desa Je'netallasa ini. Jadi janganakan mengabulkan aspirasi kami, mengetahui saja belum tentu, contohnya saja perbaikan sarana transportasi serta pengadaan sarana pendukung lainnya kami setiap harinya sangat memerlukan perbaikan dan perhatian Pemerintah Daerah. Hal ini sering disampaikan kepada Kepala desa tetapi hasilnya belum ada. Mungkin kalau ada kebijaksanaan yang sama dengan kebutuhan kami di desa ini, yah..., mungkin itu secara kebetulan saja".

Dengan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dalam penelitian ini kami bandingkan dengan tanggapan dari hasil wawancara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Gowa, adapun keterangan yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

"Sebenarnya, ada dua cara yang ditempuh oleh DPRD Tingkat II Gowa dalam mengambil/memutuskan kebijaksanaan. yaitu pertama mendengar usulan-usulan dari Kepala Daerah dan kedua berdasarkan pengamatan langsung di lapangan atau mendengar aspirasi masyarakat, dengan dilandasi suatu prinsip skala prioritas. Jadi kalau ada warga masyarakat merasa aspirasinya belum terpenuhi, kemungkinannya DPRD setelah membicarakan dalam rapat-rapat pleno menilainya bahwa hal yang diusulkan tersebut belum dianggap mendesak untuk dilaksanakan".

Kami menilai, pernyataan seperti itu adalah suatu hal yang bersifat umum, yang menjadi pertanyaan adalah apakah betul demikian atau tidak ?.

Jika di hubungkan dengan pengamatan kami yaitu sebagai contoh adanya kerusakan-kerusakan jalanan yang terjadi di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

adalah saya kira seandainya skala prioritas yang diterapkan, maka jalanan desa tersebut sudah terantisipasi tetapi nyatanya belum. Karena jalanan tersebut kami menilai sangat mendesak untuk mempermudah pemasaran hasil produksi warga masyarakat setempat.

Sebagai perbandingan dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka berikut ini (tabel 5.11) dikemukakan tanggapan warga masyarakat pada dua desa tentang kuantitas kunjungan Pemerintah Daerah ke lapangan atau ke desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, khususnya yang berkaitan dengan informasi-informasi tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat di lapangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.11
Tanggapan Masyarakat Tentang Kunjungan Ke Lapangan
Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Gowa

ALTERNATIF PENILAIAN	KELURAHAN/DESA			
	PABDANG-PANDANG		JE'NETALLASA	
	PNS/ABRI (%)	NON PNS (%)	PNS/ABRI (%)	NON PNS (%)
Selalu ke lapangan	5 (13,16)	-	-	-
Sering ke lapangan	26 (68,42)	34 (60,71)	5 (41,67)	9 (12,33)
Kadang-kadang ke lapangan	7 (18,42)	22 (39,29)	7 (58,33)	47 (64,38)
Tidak pernah ke lapangan	-	-	-	17 (23,29)

Sumber: Data Primer, 1996.

Dalam tabel di atas, dapat dilihat tentang kuantitas kunjungan Pemerintah Daerah ke lapangan, untuk melihat

langsung situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Sehubungan dengan kuantitas kunjungan Pemerintah Daerah ke lapangan, kami mewawancarai Kepala Bagian Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tingkat II Gowa, adapun pernyataannya adalah:

"Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD adalah sebenarnya secara rutin mendapatkan informasi tentang perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat di lapangan baik secara langsung maupun melalui aparat yang terkait. Namun dalam kunjungan dan semacamnya itu tidak selamanya harus diketahui oleh aparat desa ataupun warga masyarakat yang dikunjungi tersebut, jadi kalau ada warga masyarakat mengatakan bahwa Pemda tidak pernah atau jarang ke lapangan, yah..., itu disebabkan karena mereka tidak tahu saja".

Secara rasional kami menilai, pernyataan-pernyataan tersebut baik dari warga masyarakat maupun dari pihak Pemerintah Daerah, adalah kedua belah pihak ada benarnya.

Karena di satu pihak (warga masyarakat) mengatakan demikian karena situasi dan kondisi yang dialami dan dirasakannya tidak mengalami perubahan, dan di pihak lain (Pemerintah Daerah) mengatakan demikian karena di samping karena menganut prinsip skala prioritas (sebagaimana keterangan Sekwan Tingkat II Gowa) juga disebabkan karena kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas (sebagaimana keterangan Sekwilda Tingkat II Gowa).

Jadi kalau dianalisa lebih mendalam tentang kebenaran yang dikemukakan baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat, maka pada akhirnya yang menentukan adalah kenyataan yang terjadi di lapangan.

Konsekuensi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Bagi Masyarakat Lokal
Pada Dua Desa di Kabupaten Dati II Gowa.

Sesuai dengan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal pada dua desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah tercermin pada hasil penelitian sebagaimana terungkap di atas.

Untuk mengetahui konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang hubungannya dengan fenomena sebenarnya yang terjadi pada Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa. Maka setelah ditelaah dan dicermati secara jelas hasil penelitian tentang tanggapan warga masyarakat lokal terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal. Sebagai konsekuensinya adalah sebagai berikut:

Pertama, pelayanan sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi empat hal yaitu: waktu pelayanan, biaya pelayanan, perilaku pelayanan, dan kebutuhan pelayanan.

Menurut hasil penelitian dan pengakuan warga masyarakat di Kelurahan Pandang-Pandang adalah pada umumnya sudah merasakan manfaat bagi peningkatan kesejahteraaannya, namun demikian masih ada Dinas Daerah dalam memberikan pelayanannya belum memuaskan. Sedangkan di Desa Je'netallasa adalah belum sepenuhnya bisa dikatakan penting dalam rangka terjaminnya tingkat kesejahteraan warga masyarakat lokal, kecuali kelompok masyarakat dari kalangan PNS/ABRI.

Kedua, peningkatan penghasilan yang diakibatkan dari penerapan berbagai macam kebijakan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dari Dinas-Dinas Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa adalah juga demikian adanya.

Menurut hasil penelitian dan diakui langsung oleh warga masyarakat lokal di Kelurahan Pandang-Pandang, bahwa pada dasarnya mereka sudah mengalami kenaikan penghasilan, namun oleh sekelompok masyarakat mengeluh tentang masih perlunya penciptaan dan perluasan lapangan kerja untuk mengantisipasi jumlah pengangguran di perkotaan. Sedangkan di Desa Je'netallasa adalah yang dialami adalah sebaliknya, yaitu belum bisa dikatakan mampu meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Ketiga, Demikian juga halnya antara pemenuhan keinginan dengan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat lokal.

Menurut pengakuan warga masyarakat lokal di dua desa adalah belum sepenuhnya bisa terpenuhi oleh Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian ini memang terbukti masih banyak kebutuhan masyarakat belum terkabulkan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal pada dua desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa tersebut.

Selanjutnya, secara umum kami menilai, eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal,

dari segi pemanfaatannya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat lokal adalah "belum merata", di samping pelaksanaannya belum maksimal.

Pernyataan ini terbukti, dari: (1) segi karakteristik pekerjaan, yaitu kelompok Keluarga PNS/ABRI menilai pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bermanfaat bagi kesejahteraannya, sedangkan bagi kelompok Keluarga yang bukan (non) PNS/ABRI yang dirasakan adalah sebaliknya. (2) segi lokasi, di perkotaan (Kelurahan Pandang-Pandang) adalah pada umumnya warga masyarakat merasakan manfaat pelaksanaan otonomi bagi kesejahteraannya, sedangkan di pedesaan (Desa Je'netallasa) yang dirasakan justru sebaliknya, yaitu pada umumnya mereka mengatakan otonomi daerah kurang penting bagi kesejahteraannya.

Jadi, kalau dicermati dan dianalisis lebih mendalam maka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah belum berjalan sesuai tujuan dan hakekat pelaksanaan otonomi daerah pada daerah Tingkat II, karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang diungkapkan oleh Sekwilda Tingkat II Gowa pada halaman terdahulu.

BAB VI

PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang eksistensi otonomi daerah dan kesejahteraan warga masyarakat lokal, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, peningkatan penghasilan masyarakat serta proses penyaluran aspirasinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Selain itu juga akan dikemukakan faktor penyebab otonomi daerah dianggap tidak penting oleh warga masyarakat lokal di Kabupaten Dati II Gowa.

Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Warga Masyarakat Lokal

Berdasarkan hasil penelitian pada bab V, ternyata dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah pada dasarnya belum sepenuhnya dapat dikatakan penting secara merata bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Hal tersebut telah dibuktikan dengan memakai tiga indikator atau aspek penilaian, yaitu aspek pelayanan, aspek peningkatan penghasilan, dan aspek penyaluran aspirasi warga masyarakat lokal.

Untuk lebih jelasnya tentang pernyataan-pernyataan tersebut di atas, setelah ditelaah dan dicermati secara mendalam, maka hasilnya secara singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut:

rintahan Daerah Tingkat II Gowa yang belum dilakukan secara maksimal, khususnya yang berkenaan dengan: (1) aspek kelembagaan, yaitu tentang kemampuan aparat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) aspek kepegawaian, yaitu tentang adanya suatu kesesuaian antara penempatan pegawai dalam suatu unit kerja tertentu dengan kualifikasi dan kemampuan yang dimilikinya. dan (3) aspek kependidikan dan pelatihan, yaitu tentang adanya kemampuan atau tingkat profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, pada dasarnya kemampuan aparatur pemerintahan adalah terpenuhinya keseimbangan antara tenaga yang tersedia dengan beban tugas yang ada, hal ini disadari, bahwa manusia (aparatur) merupakan sub-sistem yang sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintahan.

Makin tinggi kemampuan aparatur dalam suatu organisasi, maka makin besar kemungkinan organisasi tersebut untuk tumbuh dan berkembang, serta mampu dalam arti trampil dan memahami segala aktivitasnya sebagai pemeran dalam memberikan pelayanan dalam berbagai aspek kepada warga masyarakat lokal di Daerah Tingkat II, termasuk Dati II Gowa.

Menurut data dari Kantor Kepegawaian Pemda Tingkat II Gowa, potensi aparatur pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa secara kualitatif adalah belum terpenuhi secara maksimal disebabkan karena beberapa faktor pendukung

aparatur untuk mampu berbuat secara kreatif dan efisien serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lokal. Namun secara kuantitatif adalah pada dasarnya sudah terpenuhi keseimbangan antara aparatur dengan beban tugas yang seharusnya diemban.⁶⁶

Sebagai perbandingan, dengan melihat jumlah aparatur pemerintahan dengan aparatur yang pernah mengikuti Diklat Penjenjangan sebanyak 139 orang (6,11%) lihat tabel 4.7, padahal menurut keterangan dari bagian kepegawaian Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa sebenarnya ada 409 (17,99%) aparatur yang memenuhi syarat mengikuti Diklat Penjenjangan, tetapi kenyataannya belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena keterbatasan dana dan peluang yang diberikan oleh pihak berwenang.⁶⁷

Dari variasi jumlah pegawai baik dilihat dari tingkat pendidikan maupun pangkat dan golongan serta jabatan struktural yang pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan dapat dikatakan cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang tersebar di berbagai unit kerja dan Dinas yang ada.

Dengan demikian, pendayagunaan potensi aparatur nampak dari segi kuantitas adalah sudah memadai namun dari

⁶⁶Sumber Data: *Pertama, Kantor Kepegawaian Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, 1996.* dan *Kedua, Hasil wawancara dengan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Gowa, 1996.*

⁶⁷Idem.

segi kualitas masih sangat perlu ditingkatkan, hal ini juga diakui oleh Sekretaris Wilayah Daerah, "bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa dalam rangka otonomi adalah optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah yang masih minim baik dari segi mental, etos kerja, kedisiplinan maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bidang tugasnya masing-masing".

Sementara dalam berbagai segi, dikatakan untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan anggota masyarakat.

Sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam Pelita VI dinyatakan pendayagunaan aparatur negara perlu terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat serta kemampuan profesional yang dimiliki secara maksimal.

Selanjutnya keberhasilan-keberhasilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah sangat ditentukan oleh pelaksanaannya (Pemerintah Daerah), yang dalam hal ini dioperasionalkan oleh segenap Dinas Daerah yang telah dibentuk Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa.

Dan oleh karena itu, Dinas-Dinas Daerah adalah tidak

boleh lengah atau tidak memperhatikan kondisi masyarakat, karena target grup otonomi daerah adalah masyarakat bukan aparatur, untuk itu banyak hal yang akan diukur dalam pelaksanaan otonomi, mulai pelayanannya, kondisi masyarakatnya sampai pada apakah kemiskinan dan berbagai macam kekurangan yang terjadi dan dirasakan langsung oleh warga masyarakat mampu diantisipasi atau belum.

Secara umum pelayanan yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat yakni yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi.

Namun istilah tersebut, pada umumnya digunakan untuk menyatakan adanya beraneka ragam pelayanan yang disediakan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah, yaitu meliputi seluruhnya atau sebagian dengan tujuan pokok meningkatkan di samping kualitas juga kuantitas hidup masyarakat.

Tujuan pokok ini lebih ditekankan pada tujuan yang secara langsung berwujud sumbangan nyata terhadap hasil produksi atau membawa secara langsung adanya keuntungan finansial bagi peningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dengan demikian, secara ringkas dikatakan rangkaian kegiatan yang dibentuk guna memungkinkan individu, keluarga, kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan yang lainnya, yang dikarenakan adanya perubahan keadaan.

Bentuk-bentuk pelayanan secara umum yang berkaitan dengan pelayanan diharapkan secara maksimal dirasakan oleh warga masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh A.Ramlan Sur

bakti, semakin tinggi pelayanan yang diterima oleh warga masyarakat maka makin bermaknalah otonomi daerah tersebut bagi warga masyarakat lokal.⁶⁸

Cakupan tersebut, seperti bimbingan keluarga, pendidikan orang tua, pelayanan perawatan sehari-hari, pelayanan kesejahteraan anak, perawatan orang lanjut usia atau jompo, rehabilitasi para cacat dan napi, pelayanan bagi pengembara dan pengungsi, kegiatan kelompok remaja, pelayanan kesehatan dan pengobatan, kegiatan persekolahan, pusat pelayanan sosial yang ada kaitannya dengan masalah perumahan dan lain sebagainya.

Namun secara konkrit pelayanan-pelayanan semacam itu, seringkali dikategorikan sebagai pelayanan seperti kesejahteraan sosial (masyarakat) yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi dan pengadaan air bersih, serta berbagai pelayanan sarana rekreasi. Demikian juga pelayanan lain seperti listrik, transportasi dan komunikasi, mempunyai implikasi sosial yang dipandang sebagai pelayanan pendukung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Tingkat II Gowa.

Untuk menggeneralisasikan proses pelayanan masyarakat yang beraneka ragam bentuknya itu, adalah tidak semua aspek kehidupan dalam masyarakat akan dikemukakan, melainkan

⁶⁸A. Ramlan Surbakti, Seminar dan Riset Politik Lokal, dalam Mata Kuliah Politik Lokal Semester III, 1995, (Surabaya, IIS-PPS UNAIR, 1995), Kuliah kedua.

Pertama, proses pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa merupakan salah satu unsur terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi empat hal yaitu: waktu pelayanan, biaya pelayanan, perilaku pelayanan, dan kebutuhan pelayanan.

Menurut hasil penelitian dan pengakuan warga masyarakat yang disertai dengan pengamatan langsung yang kami lakukan di Kelurahan Pandang-Pandang adalah pada umumnya sudah merasakan manfaat bagi peningkatan kesejahteraannya, namun demikian masih ada Dinas Daerah dalam memberikan pelayanannya belum memuaskan. Sedangkan di Desa Je'netallasa adalah belum sepenuhnya bisa dikatakan bahwa otonomi daerah itu penting dalam rangka terjaminnya tingkat kesejahteraan warga masyarakat lokal, kecuali kelompok masyarakat dari kalangan PNS/ABRI beserta Pensiunan.

Kedua, aktivitas dalam proses peningkatan penghasilan yang diakibatkan dari penerapan berbagai macam kebijakan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dari Dinas-Dinas Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa adalah juga masih belum merata dapat dirasakan oleh warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Menurut hasil penelitian dan diakui langsung oleh warga masyarakat lokal serta pengamatan kami di Kelurahan Pandang-Pandang, bahwa pada dasarnya mereka sudah mengalami kenaikan penghasilan, namun oleh sekelompok masyarakat mengeluh tentang masih perlunya penciptaan dan perluasan

lapangan kerja untuk mengantisipasi jumlah pengangguran di perkotaan. Sedangkan di Desa Je'netallasa adalah yang dialami adalah sebaliknya, yaitu belum bisa dikatakan mampu meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Ketiga, Demikian juga halnya dengan penyaluran aspirasi warga masyarakat lokal, yaitu yang menyangkut pemenuhan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Menurut tanggapan dan pengakuan warga masyarakat lokal serta hasil pengamatan langsung yang kami lakukan di dua desa adalah belum sepenuhnya bisa terpenuhi oleh Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian ini memang terbukti masih banyak kebutuhan warga masyarakat belum tersalurkan dengan baik. Padahal kalau ditinjau secara mendalam, kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat yang belum tersalurkan itu adalah seharusnya sudah tersalurkan, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal pada dua desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa tersebut.

Selanjutnya, secara umum kami menilai, eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal, dari segi pemanfaatannya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat lokal adalah sepenuhnya "*belum merata*".

Pernyataan tersebut terbukti, pada penilaian yang ditinjau: (1) dari karakteristik pekerjaan, yaitu kelompok

Keluarga PNS/ABRI menilai pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bermanfaat bagi kesejahteraannya, sedangkan bagi kelompok Keluarga yang bukan (non) PNS/ABRI yang dirasakan adalah sebaliknya. (2) dari segi lokasi, di perkotaan (Kelurahan Pandang-Pandang) adalah pada umumnya warga masyarakat merasakan manfaat pelaksanaan otonomi bagi kesejahteraannya, sedangkan di pedesaan (Desa Jenetalasa) yang dirasakan justru sebaliknya, yaitu pada umumnya mereka mengatakan otonomi daerah kurang penting bagi peningkatan kesejahteraannya.

Adapun alasan dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas adalah:

Pertama. warga masyarakat lokal PNS/ABRI mengatakan otonomi daerah itu penting bagi peningkatan kesejahteraannya karena, di samping mereka mengetahui lebih jelas tentang eksistensi otonomi daerah, juga karena mereka memang berkecimpung dalam operasionalisasi otonomi daerah tersebut. Umpamanya, mereka mengetahui dengan jelas tentang: bagaimana mendapatkan pelayanan yang baik, bagaimana cara menyalurkan aspirasi dalam rangka memperjuangkan kebutuhannya dan lain-lain sebagainya. Sedangkan bagi warga masyarakat lokal Non PNS/ABRI adalah pada umumnya bahkan semuanya tidak merasakan tentang apa yang dirasakan warga masyarakat PNS/ABRI.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Observasi dan Wawancara, kepada beberapa Tokoh Masyarakat pada Dua Desa Di Kabupaten daerah Tingkat II Gowa, Desember 1997.

Kedua, warga masyarakat lokal yang tinggal di perkotaan mengatakan eksistensi otonomi daerah penting bagi peningkatan kesejahteraannya karena: lokasinya berdekatan dengan pusat pelayanan, sarana dan prasarana yang diinginkan cukup tersedia, mudah memperoleh informasi tentang tata cara memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah demikian juga dalam menyalurkan aspirasinya dan lain-lain sebagainya. Sedangkan bagi warga masyarakat lokal yang bermukim di pedesaan mengatakan otonomi daerah kurang penting bagi peningkatan kesejahteraannya, karena mereka: jauh dari pusat pelayanan, sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas, sulit memperoleh informasi tentang pelayanan dari Pemerintah Daerah dan sulit menyalurkan aspirasi yang mereka inginkan, serta hal-hal yang serba terbatas lainnya.⁶⁵

Selanjutnya, khusus tentang perbedaan tanggapan antara warga masyarakat lokal PNS/ABRI dengan warga masyarakat lokal yang Non PNS/ABRI. Dapat ditambahkan, bahwa hal tersebut disebabkan karena: realitas yang ada atau peluang yang dirasakan/dialami oleh kedua kelompok jenis pekerjaan yang berbeda tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya juga berbeda. Berbeda dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti: peluang mendapatkan pelayanan, peluang meningkatkan pendapatan, peluang dalam menyalurkan aspirasi serta berbagai macam peluang lainnya.

⁶⁵Idem.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kalau dicermati dan dianalisis lebih mendalam lagi maka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah belum berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuannya.

Oleh karena itu proses pelaksanaannya masih memerlukan waktu yang panjang karena dari hasil penelitian ini juga membuktikan, proses sosialisasi tentang otonomi daerah saja belum menyeluruh atau baru sebagian kecil masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang mengerti betul tentang hakekat dan tujuan serta sasaran dari pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan tersebut. Demikian juga pengetahuan mereka adalah sangat terbatas terhadap hal-hal pendukung dan penghambat pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Faktor yang Menyebabkan Otonomi Daerah Dianggap Tidak Penting

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, yang intinya, pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, khususnya di perkotaan adalah dianggap penting bagi kesejahteraan, sedangkan di pedesaan yang dirasakan adalah sebaliknya.

Maka faktor-faktor yang menyebabkan sehingga warga masyarakat lokal menganggap otonomi daerah kurang penting secara merata bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal pada dua Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor pendayagunaan potensi aparatur peme

jenis-jenis pelayanan yang dianggap lebih menonjol dirasakan dan dialami baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga masyarakat lokal.

Hal itu seiring dengan pendapat The Liang Gie, otonomi merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan kelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan tertentu.⁶⁹

Dan secara ideal, Parsons mengatakan, inti setiap masyarakat adalah jalinan makna, kepercayaan dan nilai yang dianut bersama. Kepercayaan dan nilai suatu masyarakat dapat membentuk struktur cara-cara dasar mereka dalam memandang dan mengorganisasikan kehidupan sosialnya,⁷⁰ dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik dari masa sekarang ke masa yang akan datang.

Kebutuhan dasar bagi kehidupan seseorang (masyarakat) yang dianggap sebagai cikal bakal tercapainya suatu kesejahteraan, dengan sasaran pokok yang strategis dari metode pemenuhan kebutuhan dasar adalah dalam rangka: (1) dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan atau perumahan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang dipandang perlu. (2) dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh berbagai

⁶⁹M. Solly Lubis, SH., Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Di Daerah, (Bandung: Alumni, 1985), h. 11.

⁷⁰Stepen K. Sanderson, Sosiologi Makro..., h. 6.

jasa, pendidikan untuk anak dan orang tua, program preventif dan kuratif kesehatan air minum, pemukiman dengan lingkungan yang mempunyai infrastruktur dan komunikasi, baik rural maupun urban. (3) dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (4) terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, ataupun dari perdagangan internasional untuk memperolehnya dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha selanjutnya. (5) menjamin adanya partisipasi massa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek.⁷¹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka eksistensi otonomi daerah dianggap penting atau tidaknya bagi kesejahteraan masyarakat karena didalamnya tercakup segala jenis pelayanan sebagaimana yang terungkap di atas, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini di operasionalisasikan oleh Dinas-Dinas Daerah yang telah dibentuk oleh setiap daerah tingkat II.

Hal ini juga dipertegas oleh H. Sumitro Maskun (Dirjen PUOD Depdagri), sebenarnya otonomi daerah dilaksanakan di daerah tingkat II karena mempunyai empat tujuan (sasaran), antara lain: (1) peningkatan ekonomi masyarakat, (2)

⁷¹Dorodjatun Koentjoro-Jakti, "Mau Kemana Kita dengan Pembangunan Ini", dalam PRISMA Tahun VII No. 10, 1978, (Jakarta: LP3ES, 1978), h. 10 - 12.

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*), (3) meningkatkan sosial budaya masyarakat, dan (4) untuk demokratisasi.⁷²

Demikian juga secara jelas diungkapkan Abdurrahman, Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah Tingkat II adalah untuk menjunjung aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya, demikian juga pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.⁷³

Kedua, faktor pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal dan merata. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lokal, maka sumber-sumber ekonomi hendaknya senantiasa dioptimalisasikan pemanfaatannya.⁷⁴

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, sektor pertanian

⁷²H. Sumitro Maslam, "Otonomi Daerah adalah Program Pemerintah", dalam Majalah PRISMA Nomor 4 Tahun 1995..., h. 43.

⁷³Abdurrahman, (ed), Beberapa..., h. 109.

⁷⁴Sumber: Hasil wawancara dengan Sekwilda Tingkat II Gowa, dan Kepala Bagian Pembangunan Pemda Tingkat II Gowa, akhir 1996.

sebagai salah satu pendukung sektor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini didukung oleh sumber daya lahan yang dimiliki cukup memadai untuk dimanfaatkan sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) dan hasil wawancara kami dengan Sekwilda Tingkat II Gowa, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka dilakukan upaya, seperti pengalokasian kawasan dari berbagai potensi yang dimiliki daerah tersebut menjadi empat, yaitu kawasan: pemukiman, pertanian, industri, dan kawasan wisata.⁷⁵

Tetapi namun demikian, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial seperti itu adalah kenyataannya belum dapat menjamin perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini diakui sendiri oleh Sekwilda Tingkat II Gowa, "SDA di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa memang belum dinikmati secara menyeluruh oleh warga masyarakat lokal, karena Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya juga kemampuannya masih sangat terbatas yang disertai dengan tingkat kesadaran warga masyarakat itu sendiri yang masih sangat kurang".

Dalam penelitian ini juga ditemukan, kemanfaatan pelaksanaan otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal adalah terdapat perbedaan antara kehidupan di pedesaan dan kehidupan di perkotaan demikian juga dari segi

⁷⁵Sumber data: Kabupaten Gowa dalam Angka, 1996, (BPS Dati II Gowa, 1996).

karakteristik pekerjaannya, yakni antara PNS/ABRI dengan yang bukan PNS/ABRI.

Hal ini secara singkat dikatakan kehidupan di perkotaan dan warga masyarakat yang bekerja pada PNS/ABRI merasakan manfaat dari pelaksanaan otonomi tersebut bagi kesejahteraannya, sementara bagi warga masyarakat di pedesaan demikian juga yang bukan PNS/ABRI yang dialami atau dirasakan adalah sebaliknya.

Kenyataan seperti itu terjadi karena: (1) di perkotaan di samping dekat juga banyak sarana dan sumber pelayanan yang tersedia sedangkan di pedesaan jauh dan kurang, (2) bagi PNS/ABRI lebih banyak mengetahui baik kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah maupun terhadap personil (aparatur) pelayanan itu sendiri sedangkan bagi Non PNS/ABRI adalah pada umumnya tidak demikian, sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan demikian juga dengan peningkatan penghasilan serta penyaluran aspirasi dari kedua sub-karakteristik tersebut juga berbeda dalam segala aspek kehidupannya.

Gejala ketimpangan antara pelayanan di pedesaan dan di perkotaan membuktikan, hasil pembangunan yang sudah berjalan selama ini belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan warga masyarakat lokal. Dan kajian lebih lanjut terhadap fenomena itu berdasarkan hasil-hasil penelitian empirik para ahli ekonomi menunjukkan tidak adanya keseragaman pendapat tentang hubungan antara pertumbuhan dan

pemerataan.⁷⁶

Tetapi kalau kita kembali mencermati pada eksistensi otonomi daerah itu sendiri adalah seharusnya tidak terjadi demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah itu sangat luas cakupannya, artinya jenis pelayanan antara yang dilakukan di perkotaan adalah kadang-kadang lain dari pada yang dilakukan di pedesaan, jadi tergantung jenis pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut dapat dicontohkan masyarakat pedesaan jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan adalah sarana dan prasarana pertanian, sedangkan di perkotaan umpamanya kebersihan dan lain-lain sebagainya.

Seirama dengan hal tersebut di atas, maka salah satu isu yang berkembang dan dihadapi sekarang ini warga masyarakat lokal adalah masalah kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah, antar pendapatan penduduk, antar sektor dan bahkan antar pengusaha besar dan menengah serta kecil.

Kesenjangan tersebut terjadi sebagai akibat dari kurangnya atau tidak meratanya pengelolaan sumber daya alam dan produktivitas, serta sistem pasar dan distribusinya, diantara para pelaku ekonomi.

Dan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita tidak bisa dijadikan ukuran berkurangnya kesenjangan

⁷⁶Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 3.

ataupun terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, bahkan pertumbuhan ekonomi selama ini selalu diikuti kesenjangan pendapatan yang makin besar.

Laju pertumbuhan sektor modern semakin cepat diban- dingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rakyat. Ini tidak berarti, untuk menseimbangkan perkembangan ekonomi harus mengerem laju pertumbuhan ekonomi modern, tetapi justru kita harus mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Kesenjangan ekonomi ini tentu saja tidak bisa kita biarkan dan secara bertahap dirintis melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan agar kesenjangan itu tidak semakin melebar dan berdampak lebih besar ke dalam berbagai aspek kehidupan warga masyarakat lokal di daerah-daerah tingkat II.

Kenyataan seperti ini juga diakui oleh Alwi Dahlan, bukan hanya karena pembangunan politis, akan tetapi lebih berfokus pada aspek ekonomis dan hal-hal lain yang mendukung. Laju pembangunan di daerah diharapkan dapat menyebarkan aspek pemerataan pendapatan dan keadilan yang selalu didambakan oleh seluruh masyarakat, Oleh karena itu perkembangan pembangunan dalam perspektif regional sangat dipengaruhi oleh proses politik dan tingkat perkembangan ekonomi daerah. Daerah-daerah yang relatif telah berkembang justru "menuntut" fasilitas dan prasarana yang makin lama makin baik. *Pressure* alami ini, baik atas pertimbangan politis maupun pertimbangan ekonomis mau tidak mau "terpaksa" dipenuhi agar tidak mengganggu stabilitas sosial, politik dan

pertumbuhan ekonomi daerah.⁷⁷

Selanjutnya untuk lebih menjamin tingkat penghasilan warga masyarakat, maka mereka diharapkan berupaya untuk: (1) meningkatkan: kemandirian, nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan pemiliknya dan pengelolaannya, (2) menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, (3) mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mampu berkembang menjadi usaha menengah, (4) mewujudkan lapisan usaha kecil dan menengah yang tangguh sebagai unsur kekuatan ekonomi rakyat yang handal dan tulang punggung dunia usaha nasional yang berbasis di daerah-daerah tingkat II untuk kepentingan warga masyarakat lokal pada umumnya.

Pembangunan daerah sebagaimana pembangunan nasional senantiasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui penciptaan kegiatan ekonomi produktif yang tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Seirama dengan itu, pembangunan merupakan proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi dan kualitas pekerjaan untuk mempertinggi tingkat penghasilan warga masyarakat secara berkesinambungan, sehingga dengan demikian pada gilirannya warga masyarakat lokal di Kabupaten daerah Tingkat II Gowa mengalami peningkatan kesejahteraan.

⁷⁷Alwi Dahlan (Editor), Membangun Matabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1992), h. 121.

Oleh karena itu, Korten mengusulkan dalam tulisannya, agar pembangunan seyogianya berorientasi pada manusia. Dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan perubahan cara-cara produksi yang berorientasi pada mekanisasi keuntungan semata akan mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal yang diperlukan adalah merubah cara produksi masyarakat menjadi cara produksi otonom.⁷⁸

Dengan dukungan data yang terungkap pada penelitian ini, maka masalah penghasilan adalah dapat dikatakan sebagai penyakit nasional, karena kalau di perkotaan pada umumnya jumlah penganggurannya yang sangat sulit diantisipasi sementara di pedesaan masalah produksi, pemasaran dan lain-lain sebagainya.

Sehingga dari semua permasalahan tersebut dapat langsung atau tidak langsung mempengaruhi tingkat penghasilan warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Ketiga, faktor pendayagunaan lembaga penyaluran aspirasi warga masyarakat lokal. Sesuai dengan pengamatan kami yang disertai dengan hasil wawancara, maka pendayagunaan Pemerintah Daerah (DPRD dan Kepala Daerah) dalam menyalurkan aspirasi warga masyarakat lokal untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya adalah belum sesuai dengan harapan warga

⁷⁸David C.Korten dan Syahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 54.

masyarakat lokal.⁷⁹

Sementara diketahui, dengan tersalurnya aspirasi warga masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan pada setiap penyelenggaraan pembangunan, dalam keadaan yang ideal keterlibatan masyarakat lokal untuk pengambilan kebijaksanaan yang menyangkut nasib mereka adalah suatu pertanda, tingkat kemaslahatannya mendapat peluang untuk ditingkatkan ke arah yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa dituntut selaku mediator penentu kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka memberi peluang kepada warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam setiap penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi segala aspek kehidupannya.

Hal ini sesuai pernyataan Bintoro Tjokroamidjoyo, yang menegaskan "Untuk mencapai tingkat kemaslahatan masyarakat dalam pembangunan, maka ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian secara maksimal, meliputi segala segi kehidupan, yaitu termasuk aspek: politik, ekonomi dan sosial budaya, itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam

⁷⁹Sumber data: Hasil Wawancara dengan Beberapa Tokoh Masyarakat, di Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa, Desember 1996.

suatu negara atau daerah".⁸⁰

Selanjutnya pemberian otonomi kepada daerah tingkat II memang merupakan suatu prasyarat untuk terciptanya suatu pembangunan daerah dan nasional yang *sustainable*. Akan tetapi hal ini hanya dapat tercapai apabila pemberian otonomi itu juga didukung dengan suatu lingkungan yang demokratis. Tanpa suatu lingkungan yang demokratis maka pemberian otonomi daerah tidak akan mampu membawa pembaruan di daerah yang bersangkutan.

Dan oleh karena itu, salah satu upaya untuk menciptakan iklim demokratis di daerah, maka DPRD sebagai wahana masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dapat mengadakan dengar pendapat dengan rakyat dan sekaligus menjaring jenis-jenis proyek yang diinginkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah,⁸¹ sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Relevan dengan pendapat Miriam Budiardjo, Pengarahan-pengarahan yang dimaksudkan pada daerah tingkat II itu, yakni menyangkut kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang antara lain: senantiasa memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang

⁸⁰Bintoro Tjokroamidjoyo, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), h. 222.

⁸¹Lukman Sutrisno, Upaya menciptakan Pembangunan Berkelanjutan, dalam Markus Rani dan Ronald Ngantung, Otonomi Daerah, Peluang..., h.90

teguh pada program pemerintah. Sehingga pada hakikatnya asumsi pokok dari suatu sistem demokrasi adalah mesti ada peluang untuk berbagai-bagai pandangan, dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan dapat dikemukakan dengan bebas.⁸²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka menurut Steers, keputusan yang dibuat lebih dekat pada sumber-sumber informasi akan meningkatkan efektivitas, menimbulkan semangat dan rasa tanggung jawab anggota terhadap apa yang telah menjadi keputusannya. Pemikiran ini pada dasarnya mendorong perlunya penerapan asas desentralisasi pada organisasi yang tingkatannya lebih rendah, di mana desentralisasi dipandang bukan saja akan dapat memperbaiki status keputusan-keputusan yang diambil tetapi juga akan dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil.⁸³

Hal ini sangat didukung dengan pernyataan, jika kita menginginkan pemerintahan itu mampu menjawab secara cepat dan tepat semua kebutuhan-kebutuhan pelbagai kelompok masyarakat dan daerah, maka bentuk pemerintahan tersebut adalah hendaknya semakin desentralisasi dan sesuai dengan kepentingan

⁸²Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), h. 62.

⁸³Steers R.M., Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 47.

an daerahnya.⁸⁴

Kurang tersalurannya aspirasi warga masyarakat maka dapat mengakibatkan ketidakpuasan, ketidakpedulian serta kemalaratan yang tercermin dalam kehidupan warga masyarakat itu sendiri.

Sehingga pada gilirannya dimanfaatkan sebagai petunjuk dalam menentukan pilihan di dalam badan perwakilan, karena pada prinsipnya komunikasi politik itu adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu yang satu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.⁸⁵

Untuk mengetahui dengan jelas tentang upaya Pemerintah Daerah dalam menyalurkan aspirasi warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah dapat dilihat pada tabel 5.10, mengenai tanggapan masyarakat tentang persentase penyaluran aspirasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa.

Kalau dihubungkan dengan pernyataan Ketua DPRD Tingkat II Gowa maka hasilnya bertolak belakang dengan tanggapan dan pendapat warga masyarakat pada tabel tersebut. Adapun per-

⁸⁴Karl Deutsch.W., Politics and Government How People Decide Their Fate, (Boston: Houghton Mifflin Co, 1974), h. 72.

⁸⁵Michael Rush & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 23.

nyataan Ketua DPRD adalah "Dalam mengakomodasi aspirasi-aspirasi masyarakat DPRD Tingkat II Gowa menganut pelayanan dalam pengertian DPRD "menjemput bola" dengan masuk ke seluruh Desa dan Kelurahan. DPRD selain berfungsi sebagai lembaga aspirasi juga berfungsi sebagai Pemerintah Daerah dengan menyampaikan program Pemerintah daerah dan dialog dengan tokoh masyarakat".

Sehubungan dengan ketidakrelevanan di atas, maka kalau dikaitkan antara kuantitas kunjungan Pemerintah Daerah (anggota DPRD) ke lapangan dengan pemenuhan keinginan (aspirasi) anggota masyarakat lokal dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, maka ada tiga anggapan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu antara lain: (1) DPRD bekerja sesuai dengan kehendaknya (kalangan anggota DPRD), (2) DPRD bekerja sesuai dengan keinginan pihak eksekutif (Kepala Daerah), dan (3) DPRD bekerja jika merasa beruntung, tanpa memperhatikan kepentingan warga masyarakat lokal yang diwakilinya.

Anggapan-anggapan seperti tersebut di atas, adalah didukung dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Azam Awang, yaitu kemampuan anggota DPRD itu dikelompokkan ke dalam hal: *Pertama*, struktur politik dengan mekanisme sistem politik yang kurang kondusif bagi "kreativitas" anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi politik, di mana secara formal relatif tidak kelihatan dan tidak menjadi

masalah. *Kedua*, keberanian anggota DPRD dalam mengatasi hambatan psikologis yang ditandai dengan adanya sanksi dalam mekanisme sistem politik yang kurang kondusif. *Ketiga*, masalah keterbukaan anggota DPRD dalam memberi atau menyampaikan informasi dan data yang benar di dalam pembahasan input dari masyarakat melalui sidang-sidang pleno terbuka untuk umum dan sidang-sidang tertutup yang dilakukan anggota DPRD dalam rangka menyalurkan aspirasi warga masyarakat lokal. dan *Keempat*, masalah komunikasi politik yang dikaitkan dengan cakupan atau jangkauan, intensivitas, dan aktualisasi materi yang dikomunikasikan tersebut.⁸⁶

Dan oleh karena itu, arah otonomi daerah akan membentuk suatu manajemen pemerintahan otonomi yang satu sama lainnya berbeda-beda, perbedaan itu muncul selain dari karakteristik daerah juga dari inisiatif kepemimpinan staf aparatur. Aparatur adalah motor penggerak otonomi, dan perlu diketahui pula otonomi itu bukan untuk aparatur, tetapi untuk warga masyarakat setempat di mana inspirasi, aspirasi dan kebutuhannya dapat diperjuangkan untuk dipenuhi.

Sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan sistem demokrasi dalam artian pemegang kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat, maka negara Republik Indonesia mempunyai lembaga perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang meru-

⁸⁶ Azam Awang, Peranan..., h. 105

pakan penjelmaan dari warga masyarakat.

Sebagai pemegang amanah, anggota DPRD diharapkan menyadari untuk senantiasa menghendaki tersalurnya aspirasi dan berperan dalam mengupayakan terwujudnya tujuan dari seluruh anggota masyarakat yang diwakilinya, berperannya anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi rakyat pada hakikatnya berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut, tepatnya anggota badan legislatif dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan.⁸⁷

Aplikasi dari kewajiban anggota DPRD tersebut di atas, maka realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan seluruh anggota masyarakat yang merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan oleh teori demokrasi itu sendiri, di mana anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan.⁸⁸

Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan seluruh rakyat. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat

⁸⁷Wantjik Saleh, Undang-Undang RI No. 5 1979 dan Undang-Undang RI No. 5 1974, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 51.

⁸⁸Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 203.

maka sebaiknya mengetahui dan sekaligus memperjuangkannya secara benar tentang aspirasi rakyat dari segala aspek kebutuhan hidupnya.

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD di dalam menjalankan tugasnya, kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi dalam setiap kegiatan pembangunan mereka merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terbinanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti luas. Dan oleh karena itu, antara legislatif dan eksekutif (DPRD dan Kepala Daerah) sebagai unsur Pemerintah Daerah perlu terjalin, memperhatikan dan menampung aspirasi serta memajukan tingkat kehidupan warga masyarakat lokal dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah. Sehingga dalam melaksanakan fungsinya kedua lembaga tersebut saling menunjang, mengisi serta berkomunikasi secara baik. namun di sisi lain kedua lembaga tersebut bekerja menurut hak dan kewenangan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Dalam bab ini dikemukakan pertama, kesimpulan dari hasil penelitian tentang Tanggapan warga masyarakat Lokal terhadap keberadaan otonomi daerah, kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa. Kedua, Implikasi teoritik dengan hasil analisis dan pembahasan, serta yang Ketiga juga dikemukakan implikasi praktis terhadap Pemerintah Daerah dan warga masyarakat lokal di Kabupaten daerah Tingkat II Gowa.

Kesimpulan

Tanggapan warga masyarakat lokal terhadap eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan, yang berfokus pada otonomi daerah dan kesejahteraan warga masyarakat lokal di Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dengan beberapa permasalahan yang terkait, adapun jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dimaksudkan adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama. pelayanan sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi empat hal yaitu: waktu pelayanan, biaya pelayanan, perilaku pelayanan, dan kebutuhan pelayanan yang dirasakan masyarakat lokal.

Menurut hasil penelitian dan pengakuan atau opini warga masyarakat serta realitas sosial yang ada di Kelurahan

Pandang-Pandang adalah pada umumnya sudah merasakan manfaat otonomi daerah bagi peningkatan kesejahteraannya, namun demikian masih ada Dinas Daerah dalam memberikan pelayanannya belum memuaskan.

Sedangkan di Desa Je'netallasa adalah belum sepenuhnya bisa dikatakan penting dalam rangka terjaminnya tingkat kesejahteraan warga masyarakat lokal, kecuali kelompok masyarakat dari kalangan PNS/ABRI pada dua desa atau lokasi penelitian.

Kedua, Peningkatan penghasilan yang diakibatkan dari penerapan berbagai macam kebijakan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dari Dinas-Dinas Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa adalah juga identik dengan pernyataan di atas.

Menurut hasil penelitian dan diakui secara langsung oleh warga masyarakat lokal serta realitas sosial yang terjadi di Kelurahan Pandang-Pandang, pada dasarnya mereka sudah mengalami kenaikan penghasilan, namun oleh sekelompok masyarakat mengeluh tentang masih perlunya penciptaan dan perluasan lapangan kerja untuk mengantisipasi jumlah pengangguran di perkotaan.

Sedangkan di Desa je'netallasa adalah yang dialami adalah sebaliknya, yaitu belum bisa dikatakan mampu meningkatkan penghasilan (taraf hidup) atau meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lokal.

Ketiga, Demikian juga halnya dengan penyaluran aspi

rasi dari keinginan dan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat lokal di dua desa penelitian.

Menurut hasil penelitian dan pengakuan warga masyarakat lokal serta berdasarkan realitas sosial yang telah diamati di Kelurahan Pandang-Pandang dan Desa Je'netallasa adalah belum sepenuhnya bisa terpenuhi oleh Pemerintah Daerah, karena pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian ini memang terbukti masih banyak kebutuhan warga masyarakat lokal yang belum tersalurkan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat lokal pada dua desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa tersebut.

Selanjutnya secara umum kami menilai, eksistensi otonomi daerah bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal, dari segi pemanfaatannya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat lokal adalah "*belum merata*", antara kehidupan di perkotaan dengan di pedesaan.

Pernyataan ini terbukti, dari: (1) karakteristik pekerjaan, yaitu kelompok Keluarga PNS/ABRI menilai pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bermanfaat bagi kesejahteraannya, sedangkan bagi kelompok Keluarga yang bukan (non) PNS/ABRI yang dirasakan adalah sebaliknya. (2) segi lokasi, di perkotaan (Kelurahan Pandang-Pandang) adalah pada umumnya warga masyarakat merasakan manfaat pelaksanaan otonomi bagi kesejahteraannya, sedangkan di pedesaan (Desa Je'netallasa) yang dirasakan justru sebaliknya, yaitu pada

umumnya mereka mengatakan otonomi daerah kurang penting bagi peningkatan kesejahteraannya.

Sehingga pada akhirnya dapat dinyatakan, warga masyarakat kota (*urban*) menganggap pelaksanaan otonomi daerah adalah pada dasarnya penting bagi peningkatan kesejahteraannya, sedangkan bagi warga masyarakat pedesaan (*rural*) yang dirasakan adalah sebaliknya, yakni pelaksanaan otonomi daerah kurang berpengaruh atau pada dasarnya tidak dianggap penting bagi kesejahteraannya.

Implikasi Teoritik **Pelayanan Pemerintah Daerah**

Salah satu aspek penting dari pemenuhan kesejahteraan warga masyarakat lokal adalah tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan yang dirasakan atau diterima warga masyarakat. Beberapa kategori yang tercakup dalam unsur pelayanan yang dimaksudkan diantaranya waktu pelayanan, biaya pelayanan, perilaku pelayanan dan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

Tanggapan warga masyarakat lokal pada pelaksanaan penelitian ini tentang manifestasi dari keempat kategori dalam unsur pelayanan tersebut di atas adalah belum merata dan kurang berarti bagi peningkatan kesejahteraannya, yang disebabkan karena sumber daya manusianya (*aparatur*) yang belum memiliki kemampuan yang maksimal, sumber daya alamnya yang belum terkelola dengan baik, serta kesadaran masyarakat itu sendiri yang masih rendah.

Hal-hal tersebut relevan dengan salah satu hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Josef Riwu Kaho, temuannya adalah ada beberapa faktor yang berpengaruh sukses atau tidaknya otonomi daerah dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Daerah Tingkat II, seperti: *Pertama*, manusianya harus baik, faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Kedua*, keuangan harus cukup dan baik, mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. *Ketiga*, peralatan yang harus cukup dan baik, adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah, dan *Keempat*, organisasi dan manajemennya harus baik, organisasi yang dimaksudkan organisasi dalam arti struktur.⁸⁹

Kenyataan yang ditemukan dalam penelitian ini, juga sangat relevan atau memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan Rozali Abdullah, dalam penelitian tentang "Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi", tentang kemampuan suatu Daerah Tingkat II untuk melaksanakan hak otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, ditentukan banyak faktor yaitu diantaranya: kemampuan (keuangan, aparatur, organisasi/admi

⁸⁹Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Republik..., h. 60.

nistrasi, ekonomi daerah, potensi masyarakat, dan demografi). Juga ditemukan faktor utama yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor sumber daya manusia.⁹⁰

Kemudian secara umum, untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal adalah bukan berarti hanya semata diukur secara kuantitas (ekonomi) tetapi perlu juga, ditinjau dari segi non ekonomi (sosial, politik dan lain sebagainya), pandangan ini menghendaki agar indikator pembangunan lebih melihat perbaikan kehidupan dilihat dari aspek manusianya (*improvement of human life*), dengan demikian pembangunan diperuntukkan bagi semua pihak dan semua lapisan masyarakat.

Dalam hal ini para pengamat dan peneliti otonomi daerah, menyebutkan minimal ada tiga tujuan, yaitu (1) memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan penopang hidup warga masyarakat, (2) memperbaiki kondisi kehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan harga diri, (3) adanya kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan dan penindasan, dari ketidakacuhan serta dari kesengsaraan dan kemelaratan.

Masalah pelayanan antara kehidupan diperkotaan dengan yang terjadi di pedesaan sering terjadi ketimpangan sehingga tidak jarang juga menimbulkan persoalan-persoalan tertentu

⁹⁰Rozali Abdullah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi", dalam Jurnal Universitas Jambi Nomor 6 Tahun 1994, (Jambi: Publikasi Khusus Universitas Jambi, 1994), h. 1-13.

dalam kehidupan masyarakat.

Di Kabupaten Dati II Gowa juga terjadi demikian, hal seperti ini dicontohkan pada pelayanan bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran dana bagi pelayanan kesehatan perkapita lebih tinggi di daerah perkotaan dari pada daerah pedesaan dan tentunya jangkauan serta kualitas pelayananpun juga lebih baik.

Menurut Sujanto, dalam kajiannya tentang otonomi daerah dan peran BPD, hal-hal seperti di atas terjadi karena ada beberapa aspek yang penanganannya tidak maksimal, seperti aspek ekonomis, sosiologis, psikologis dan politis. *Aspek ekonomis*, menyangkut terbatasnya pemilikan faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar menawar yang lemah dalam menentukan harga, rentan terhadap kebutuhan mendesak karena tidak punya tabungan, kemampuan yang lemah dalam mengantisipasi peluang ekonomi. *Aspek psikologis*, berkaitan dengan perasaan rendah diri, sikap fatalisme, merasa terisolir. *Aspek Sosiologis*, menyangkut terbatasnya interaksi sosial dan terbatasnya penguasaan informasi. *Aspek politis*, berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, perlakuan diskriminatif, lemahnya posisi dalam melakukan bargaining untuk menuntut hak dan kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.⁹¹

⁹¹Sujanto, Otonomi Daerah dan Peran BPD, (Semarang: Dahara Prize, 1992), h. 98.

Selanjutnya, perluasan pelayanan terhadap segala aspek kehidupan warga masyarakat lokal di pedesaan dapat dikembangkan bila tidak lagi terjadi kenaikan biaya bagi pelayanan-pelayanan tersebut di perkotaan. Secara teoritik hal ini memang ideal, tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena sepanjang hidup manusia pelayanan tidak akan hilang baik di perkotaan maupun di pedesaan, hal ini dicontohkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya.

Namun demikian, dewasa ini sudah banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia menyadari tentang perlunya diadakan penyesuaian dalam penerapan pelayanan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, dengan titik berat pada keadaan serta situasi setempat.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak saja mencari cara yang lebih murah, tetapi yang lebih utama yaitu menerapkan suatu bentuk pelayanan yang lebih cocok ditinjau dari segi fisik, sosial, ekonomi serta lingkungan politik yang mendukung pada suatu daerah. Perubahan semacam ini merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas lagi yaitu penelaahan "tehnologi tepat guna" (*appropriate technology*) dalam semua aspek pembangunan yang terkait.

Tingkat Penghasilan Warga Masyarakat Lokal

Peningkatan penghasilan yang dirasakan oleh warga masyarakat lokal yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada Dua Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa

adalah pada dasarnya masih belum merata, hal ini diungkapkan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai aspek kebutuhan yang diinginkan warga masyarakat lokal.

Kemudian berkenaan dengan pernyataan Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa tentang keterbatasan-keterbatasan yang masih dialami sehingga dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dilakukan secara bertahap dan pelaksanaannya belum merata.

Pernyataan tersebut didukung dari hasil penelitian yang pernah dilakukan Sujanto, tentang penerapan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah pada Daerah Tingkat II, yaitu secara nyata juga telah ditemukan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Pulau Jawa yang masih menemui banyak kendala di lapangan (Dati II), secara garis besarnya kendala-kendala tersebut antara lain (1) kendala yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi daerah, (2) kendala yang berkaitan dengan kemampuan anggota legislatif, (3) kendala yang berkaitan dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan lain-lain sebagainya.⁹²

Jika dibandingkan dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia di Kabupaten Dati II Gowa yang cukup potensial dalam menopang dan mendukung peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penghasilan warga masya-

⁹²Sujanto, Cakrawala Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 40.

rakat lokal sudah meningkat, tetapi secara kenyataan tidaklah demikian halnya. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat PAD yang tinggi adalah tidak dapat menjamin kesejahteraan warga masyarakat juga ikut meningkat.

Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan salah satu hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh A.W.Widjaya, tentang "Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II", yang intinya: dengan sumber daya alam yang potensial bagi suatu daerah tingkat II adalah suatu prospek yang baik untuk meningkatkan PAD pada daerah tingkat II yang bersangkutan dan dengan PAD yang tinggi, maka dapat menjamin meningkatnya tarap hidup warga masyarakat setempat.⁹³

Demikian juga kesimpulan Bhenyamin Hoessein, dalam hasil penelitiannya, "Kecilnya sumbangan PAD terhadap total APBD dan ketidakjelasan sumber anggaran bagi perangkat desentralisasi dan perangkat dekonsentrasi selama ini menyulitkan tugas-tugas otonomi daerah, di samping itu kecilnya porsi PAD mengisyaratkan kecilnya kemendirian daerah."⁹⁴

Sehubungan dengan beberapa kenyataan di atas, maka kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat penghasilannya, salah satu upaya untuk itu adalah pember-

⁹³A.W.Widjaja, Titik...., h. 83.

⁹⁴Bhenyamin Hoessein, Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, dalam Bisnis & Birokrasi Nomor 2/Volume I/Maret 1994, (Jakarta: Jurusan Ilmu administrasi FISIP-UI, 1994), h. 64

dayaan (*empowerment*) masyarakat itu sendiri.

Langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah antara lain meningkatkan kesadaran kritis dalam hal politik pada berbagai lapisan masyarakat.

Langkah-langkah penyadaran ini terlaksana apabila terjadi komunikasi yang "dialogis" antara perumus kebijaksanaan dan masyarakat, dan jalur yang dapat ditempuh antara lain adalah pendidikan politik dan lobbying (*advocacy*) yang bertujuan untuk mengoreksi kebijakan, agar tidak terlalu merugikan warga masyarakat lokal umumnya.

Dari pernyataan tersebut di atas, relevan dengan beberapa kajian tentang otonomi dan pembangunan, inti kajiannya adalah tingkat kesejahteraan absolut maupun pola pembagian pendapatan di negara berkembang seperti Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh beberapa faktor pokok, seperti pemilikan dan redistribusi harta produktif, terutama lahan pertanian. Akses pada lahan pertanian ini, hilangnya lapangan kerja karena kemajuan teknologi, nilai tukar sektor pertanian, akses pada lapangan pekerjaan, pendapatan dan pendidikan, dan ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Penyaluran Aspirasi Warga Masyarakat Lokal

Kualitas dan kuantitas penyaluran aspirasi warga masyarakat lokal pada dua Desa di Kabupaten Dati II Gowa

adalah pada dasarnya masih belum memuaskan, kenyataan ini relevan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Azam Awang dalam penelitiannya tentang peranan DPRD Riau dalam penyaluran aspirasi rakyat menyimpulkan, DPRD Riau dalam menyalurkan aspirasi rakyatnya adalah sangat didominasi oleh lembaga eksekutif setempat.⁹⁵

Berkenaan dengan hasil penelitian tersebut, maka juga relevan dengan pernyataan Sujanto dalam penelitiannya tentang evaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan mengungkapkan beberapa kesimpulan diantaranya, keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Tingkat II adalah sangat mempengaruhi dan berarti terhadap keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.⁹⁶

Kemudian salah satu penelitian yang relevan dari Ehenyamin Hoessein, hasil pengukuran otonomi menurut berbagai indikator menunjukkan otonomi Dati II cenderung lebih kecil daripada bagian otonomi Dati I di wilayah Dati II yang bersangkutan, hal ini sangat tidak mendukung terhadap proses pendekatan pembangunan dari bawah.⁹⁷

Dalam konteks seperti tersebut di atas, Mudrajad

⁹⁵ Azam Awang, Peranan...., h. 95.

⁹⁶ Sujanto, Perspektif...., h. 52.

⁹⁷ Ehenyamin Hoessein, Beberapa...., h. 63.

dalam penelitiannya tentang langkah dan strategi perencanaan pembangunan, adalah dengan mempertimbangkan suatu pendekatan dan manajemen baru dalam pemerintah daerah.⁹⁸ Langkah seperti ini sangat tepat dalam rangka mengantisipasi tumbuhnya perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*).

Kenyataan-kenyataan di atas, relevan dengan temuan Azhar Kasim dalam penelitiannya, menyimpulkan "masalah yang dialami Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor Jawa Barat adalah sulitnya mencari titik temu antara proses perencanaan yang datang dari atas atau "*top down*" dengan proses perencanaan yang diusulkan dari bawah atau "*bottom up*", karena strategi dan kebijaksanaan nasional maupun sektoral tidak jelas operasionalisasinya sampai ke tingkat yang paling bawah."⁹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah yang meliputi DPRD dan Kepala Daerah adalah institusi yang melayani masyarakat sekaligus merupakan institusi politik, karena penguasa daerah termasuk organisasi sektor publik, segala keputusannya selalu berdasarkan pertimbangan politik.

Sehubungan dengan itu, maka hendaknya mempertimbangkan: (1) suatu pendekatan dan pemikiran yang baru mengenai manajemen Pemerintah Daerah, (2) manajemen yang mendukung

⁹⁸ Mudrajad Kumcoro, "Manajemen Pembangunan Dalam RJP II: Menuju Desentralisasi", dalam Usahawan Nomor 4 thn XXIII, April 1994, h. 8.

⁹⁹ Azhar Kasim, Koordinasi..., h. 69.

proses politik, (3) kepentingan daerah (*local choice*) yang mencerminkan pilihan nilai dan sanggup merespon aspirasi masyarakat yang ada di Daerah Tingkat II.

Akibat kurang tersalurannya aspirasi warga masyarakat maka dapat mengakibatkan ketidakpuasan, ketidakpedulian serta kemalaratan yang tercermin dalam kehidupan warga masyarakat itu sendiri. Maka para wakil rakyat (DPRD) diharapkan mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur, sehingga pada gilirannya dimanfaatkan sebagai petunjuk dalam menentukan pilihan di dalam badan perwakilan.

Keseluruhan dari proses penyaluran aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Gowa adalah di samping belum intensifnya juga informasi tentang kebutuhan masyarakat belum diketahui dan diperjuangkan secara maksimal. Sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan relatif belum dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan seluruh warga masyarakat setempat.

Dengan demikian, DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa belum mampu melaksanakan tugas perwakilan dengan baik atau belum berperan secara maksimal. Sedangkan kalau dicermati secara mendalam, sebagai wakil rakyat, setiap kebijaksanaan yang dihasilkan oleh DPRD selalu mengatasnamakan seluruh rakyat yang diwakilinya, sehingga DPRD mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat.

Tanggapan warga masyarakat seperti tersebut di atas,

secara umum relevan dengan hasil penelitian Azam Awang tentang beberapa masalah yang dihadapi anggota DPRD Riau dalam penelitiannya,¹⁰⁰ antara lain:

Pertama, struktur politik dengan mekanisme sistem politik yang kurang kondusif bagi "kreativitas" anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi politik, di mana secara formal relatif tidak kelihatan dan tidak menjadi masalah.

Kedua, keberanian anggota DPRD dalam mengatasi hambatan psikologi yang ditandai dengan adanya sanksi dalam mekanisme sistem politik yang kurang kondusif.

Ketiga, Keterbukaan anggota DPRD dalam memberi atau menyampaikan informasi dan data yang benar di dalam pembahasan input dari masyarakat melalui sidang-sidang pleno terbuka untuk umum dan sidang-sidang tertutup yang dilakukan anggota DPRD dari berbagai partai, fraksi dan komisi.

Keempat, adanya dominasi eksekutif (Kepala Daerah) terhadap DPRD, yang ditandai dengan keterlambatan penyampaian suatu usulan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas kepada pihak DPRD dan hampir "tidak pernah" dilakukan pembahasan "setengah kamar" sebelum sebuah rancangan Peraturan Daerah dibahas.

Kelima, Kondisi eksternal yang kurang mendukung di dalam menampakkan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat, ini dibuktikan dengan relatif kurang-

¹⁰⁰Azam Awang, Peranan..., h. 105-106.

nya aktivitas, terutama aktivitas kemasyarakatan dari pihak eksternal yang berpredikat organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial politik di daerah ini.

Keenam, Keadaan alam, geografis dan terbatasnya prasarana juga sarana yang dimiliki, sehingga menyebabkan aktivitas penyaluran aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRD relatif terbatas untuk menjangkau masyarakat di daerah ini.

Ketujuh, kemampuan anggota DPRD yang dihubungkan dengan pendidikan politik dan kemampuan berkomunikasi dalam bidang politik, sosial dan kemasyarakatan yang relatif kurang memadai.

Kemudian secara umum dapat dikatakan, keterkaitan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan tingkat kesejahteraan warga masyarakat pada Daerah Tingkat II adalah relevan dengan pendapat Atar Sibero, dalam suatu seminar nasional menyarankan, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi secara maksimal, maka ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. antara lain: *Pertama*, perlunya memberikan penampungan atau memenuhi aspirasi masyarakat yang terus meningkat di dalam hal berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, aspirasi untuk mendapatkan pelayanan pemerintah secara lebih baik dan untuk ikut di dalam merumuskan berbagai macam kebijaksanaan. *Kedua*, perlunya penekanan pada pendekatan pembangunan sektor wilayah, dan *Ketiga*, perlunya penyempur-

naan proses perencanaan pemba ngunan.¹⁰¹

Pernyataan-pernyataan seperti itu pelaksanaannya secara merata di daerah tingkat II adalah sulit akan tercapai, hal ini dapat dibuktikan pada hasil penelitian pada dua desa kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, dan kami kira kejadian seperti ini juga terjadi di Daerah-Daerah Tingkat II lainnya yang ada di Indonesia, yaitu terbukti dari beberapa hasil penelitian terdahulu.

Hakikat dan tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan warga masyarakat yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan adalah sulit terkabulkan secara maksimal, jadi dalam hal ini dimaklumi adanya, dan kehidupan warga masyarakat yang hidup di perkotaan adalah jauh lebih banyak merasakan dan menikmati sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan apa yang dirasakan dan dinikmati oleh warga masyarakat lokal yang bermukim di pedesaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka secara operasional dari pada teori idealisme dari Talcott Parsons, bahwa manusia dalam beraktivitas pada dasarnya menghendaki suatu kenyataan yang dihadapi itu adalah sesuai dengan apa adanya (seharusnya). Kalau prinsip seperti itu ditaati sepenuhnya, maka asumsi dasar dalam penelitian ini, yang

¹⁰¹Atar Sibero, Otonomi Daerah dan Masalahnya, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Nomor 2 Tahun 1992, (Jakarta: PAU-IIS-UI, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 47.

intinya dikatakan: "pelaksanaan otonomi daerah adalah penting bagi kesejahteraan warga masyarakat lokal", adalah belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat lokal di Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan.

Implikasi Praktis

Dalam rangka mencapai operasionalisasi tujuan dan prinsip otonomi daerah secara maksimal, yang berintikan tentang dihendakinya Daerah Tingkat II (Daerah Tingkat II Gowa) mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk mencapai tingkat kesejahteraan warga masyarakat lokal secara maksimal.

Kemampuan tersebut berkaitan erat dengan: pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna, pelaksanaan pelayanan secara maksimal kepada warga masyarakat lokal, dan peningkatan pendapatan warga masyarakat lokal, serta penyaluran aspirasi dari segala kebutuhan warga masyarakat lokal yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang berhubungan dengan hasil penelitian ini, maka berikut ini dikemukakan implikasi praktis, yaitu:

Pertama, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, agar senantiasa lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di daerahnya. Karena tanpa Sumber Daya Aparat Pemerintahan yang memiliki kemampuan dan kualitas tinggi, maka secara umum eksistensi otonomi daerah dan

pelaksanaannya mustahil akan bisa berhasil secara maksimal.

Kedua, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, agar pelayanan kepada warga masyarakat lokal dilaksanakan secara merata mulai dari perkotaan sampai kepada pedesaan terpencil sekalipun.

Ketiga, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, agar lebih meningkatkan kemampuan kualitas dan ketrampilan (*empowerment*) Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup potensial.

Keempat, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, agar pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan warga masyarakat lokal lebih ditingkatkan, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kelima, khusus kepada warga masyarakat lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan, agar senantiasa memacu diri untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih maksimal. Dan senantiasa memiliki tekad dan keyakinan dalam meraih kesuksesan terhadap bidang kerja yang ditekuni.

Sehingga pada akhirnya, Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa diharapkan lebih jeli dan mampu melihat serta sekaligus dapat mengantisipasi dari segala celah yang bisa menghambat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan warga masyarakat lokal yang lebih baik lagi dari apa yang telah di hasilkan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi", dalam Jurnal Universitas Jambi Vol. 3 No. 6 tahun 1994, Jambi: Publikasi Khusus Universitas Jambi, 1994.
- Abdurrahman. (Ed), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Alfian & Nazaruddin Syamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka utama, Grafiti, 1991.
- Amin, T. Dzulkarnain, "Tinjauan Atas Kebijakan Anggaran Negara di Indonesia Selama Periode Orde Baru", dalam Amir Santoso, M. Riza Sihbudi, Politik Kebijaksanaan dan Pembangunan, Jakarta: Dian Lestari Grafika, 1993.
- Awang, Azam, "Peranan DPRD Riau 1982-1987 dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat: Suatu Studi Komunikasi Politik", dalam Jurnal Ilmu Politik No. 8 tahun 1991, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Badudu, J.S., & Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Barnes, Herry Elemer, An Introduction to the History of Sociology, Chicago: University of Chicago Press, 1848.
- Brata, Suwandi, S., (ed), Pembangunan Berkelanjutan, Mencari Format Politik, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Bryant, Christopher G.A., and David Jary, Giddens' Theory of Structuration: A Critical appereciation, New York: Routledge, 1991.
- Budiardjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Budihardjo, Eko, Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Campbell, Tom, Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Cipto, Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintah an Modern-Industri, Jakarta: PT.Grafindo Persada 1995.

- Conyers, Diana, Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga. Suatu Pengantar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Craib, Ian, Teori-Teori Sosial modern: Dari Parsons sampai Habermas, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Cuzzort, Ray P. dan King, Edith W., 20th Century Social Thought, New York: Hold, Rinehart and Wiston, 1988.
- Dahlan, Alwi, (ed), Membangunan Martabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1992.
- Deutsch, W.Karl, Politics and Gouvernment How People Decide Their Fate, Boston: Houghton Mifflin Co, 1974.
- Djohan, Djohermansyah, Problematic Pemerintahan dan Politik Lokal, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial. Dasar-Dasar dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Friedlander, Walter A., Introduction to Social Welfare. 3th, ed, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1968.
- Gaffar, Afan, "Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila", dalam Akhmad Zaini Abar, Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur, Solo: CV. Ramadhani, 1990.
- _____, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan", dalam PRISMA No. 4 tahun 1995, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Giddens, Anthony, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber, Jakarta: UI Press, 1985).
- _____, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, New York: Polity Press, 1995
- Haris, Syamsuddin & Riza Sihbudi, (ed) Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Hoessein, Bhenyamin, Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, dalam Bisnis & Birokrasi Nomor 2/Volume I/Maret 1994, Jakarta: Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UI, 1994.

- Hutabarat, Martin H., dkk. (penyunting), Hukum Dan Politik Indonesia. Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Iglesias, Gabriel U., Implementation: The Problem of Achieving Results, dalam Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Irfan, Islamy M., Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Johnson, Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern I, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Kaho, Josef Riwu, Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Suatu Studi Perbandingan, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- , Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Kansil, C.S.T, Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah (KUPD), Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Kasim, Azhar, Koordinasi antara Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Instansi-Instansi Vertikal: Studi Kasus Kabupaten Dati II Bogor Jawa Barat, dalam Bisnis & Birokrasi Nomot 1/Volume I/April 1993, Jakarta: Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UI, 1993.
- Khaeruddin. Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Koentjaraningrat, (Redaksi), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia, 1993.
- Koentjori-Jakti, Dorodjatun, Mau Kemana Kita dengan Pembangunan Ini, dalam Prisma Tahun VII No. 10. 1978, Jakarta: LP3ES, 1978.
- Korten, David.C., dan Syahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Kuncoro, Mudrajad, Manajemen Pembangunan dalam PJP II: Menuju Desentralisasi, dalam Usahawan Nomor 4 thn XXIII. April 1994, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Laeyendecker, L., Tata Perubahan dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi, Jakarta: PT.Gramedia, 1993.

- Latupapua, Christina, dkk., "Rekrutmen Elite Politik di Maluku (Studi Kasus Pemilihan Gubernur)", dalam Berkalah Penelitian Pascasarjana UGM No. 4A tahun 1993, Yogyakarta: Gadjah Mada University Graduate Research Publication, 1993.
- Lubis, M.Solly, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Di Daerah, Bandung: Alumni, 1985.
- MacAndrews, Colin & Ichlasul Amal, (ed) Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mantra, Ida Bagoe dan Kato, "Penentuan Sampel", dalam Masri Singarimbun & Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Islam Indonesia, 1995).
- Maskun, H.Sumitro, Pembangunan Masyarakat Desa: Asas, Kebijakan, dan Manajemen, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1993.
- _____, "Otonomi Daerah adalah Program Pemerintah", dalam PRISMA No. 4 tahun 1995, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Mas'ood, Mohtar, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1994.
- Miles, Matthew B., Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Miller, Delbert Charles, Handbook of Research Design and Social Measurement, New York: David McKay Company, Inc., 1977.
- Mohammad Ibrahim, Jimmi, Prospek Otonomi Daerah, Semarang: Dahara Prize, 1991.
- Moleong, Lexy.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Mubyarto, dkk., Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi Antropologi di Dua desa Pantai, Jakarta: CV. Rajawali, 1984
- Muhadjir, Neong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remadja Rosdakarya, 1990.
- Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1980.

- Muslimin, Amrah, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1992.
- Ndraha, Taliziduhu, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Ngadiyono, Kelembagaan dan Masyarakat, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Nirwandar, Sapta & Ibrahim Tadju, (Penyunting) Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Beberapa Pemikiran Pemecahan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Oetomo, Dede, "Penelitian Kualitatif", dalam Bagong Suyanto (ed), Metode Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga University Press, 1995.
- Pitomo, Sundoyo, "Kebutuhan Dasar Kelompok Berpenghasilan Rendah di Kota Jakarta", dalam Mulyanto Sumardi, dkk., (ed), Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Poloma, Margaret M., Sosiologi Kontemporer, Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Ponsioen, J.A., National Development, dalam Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Rani, Markus dan Ronald Ngantung, (Penyunting), Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Ritzer, George, Contemporary Sociological Theory, New York: Alfred A. Knoff, 1988.
- , Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- R.M. Steers, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Rush, Michael & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Saleh, Wantjik, UU RI No. 5/1979 dan UU RI No.5//1974, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

- Sanderson, Stephen K., Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Sanit, Arbi, Perwakilan Politik di Indonesai, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Santoso, Budi Priyo, Birokrasi Pemerintahan Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1993.
- Sartono, Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Seda, Frans, "Otonomi Daerah", dalam Kompas 8 April Tahun XXXI Hal. IV-V, 1996.
- Siagian, Faisal, "Meretas Kepemimpinan yang Demokratis dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia", dalam Analisis CSIS No. 2 tahun 1995, Jakarta: CSIS, 1995.
- Siahaan, Hotman M., Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Sibero, Atar, Otonomi Daerah dan Masalahnya, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu sosial Nomor 2 Tahun 1992, Jakarta: PAU-IIS-UI dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Silalahi, TB., "Otonomi Daerah Tingkat II, Urusan Siapa?", dalam Markus Rani, Ronald Ngantung (Penyunting), Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, (Penyunting), Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soedjatmiko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Soehino, Perkembangan Pemerintahan Di daerah, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekartawi, Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soemardjan, Selo, Social Change in Yogyakarta, New York: Cornel University Press, Ithaca, 1962.
- Soemarnonugroho, T., Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1991.

- Sugandha, Dann, Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bandung: CV. Sinar Baru, 1981.
- Sujanto, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- _____, Cakrawala Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- _____, Otonomi Birokrasi Partisipasi, Semarang: Dahara Prize, 1992.
- _____, Perspektif Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sukirno, Sadono, Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah, Jakarta: Fakultas Ekonomi-UI, 1976.
- Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- _____, "Isu Politik di Kota dari Perspektif Arus Bawah", dalam Majalah Widvapraja No. 23 Tahun XV 1996, Jakarta: IIP Depdagri, 1996.
- _____, "Pertumbuhan Kota dan Struktur Politik", dalam Analisis CSIS Tahun XXV No. 1 1996, Jakarta: CSIS, 1996
- Surianingrat, Bayu, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Sutrisno, Lukman, Upaya Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan, dalam Markus Rani dan Rnald Ngantung, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Syafii, Inu Kencana, Ilmu Pemerintahan, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Syamsi, Ibnu, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintah Daerah, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983.
- TAP MPR No. IV/MPR/1978, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1978.
- Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Jakarta: LP3ES, 1981.
- The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Pemerintahan Di Daerah, Yogyakarta: Karya Kencana, 1979.

- _____, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jilid I, II, III, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Thoha, Mifta, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Tjokriamidjoyo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- T, Moeljarto, Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Startegi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Surabaya: Arkola, 1991.
- Wajong, J., Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Djambatan, 1975.
- Widjaya, A.W., Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985.
- Veeger, K.J., Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

asa



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 1995 SERI D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 1995

**T
E
N
T
A
N
G**

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II GOWA



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 1995 SERI D NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka perlu menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan kepada Daerah Tingkat II Gowa ;
- b. bahwa penyerahan urusan sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) juncto

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penciptaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Pp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karst Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pembinaan kerja kepada penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1555) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Ke- pariwisataan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Perambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penye- lenggaraan Otonomi Daerah dengan Tiitik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tam- bahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Unsur-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 292/HK.205/Phb.79 tentang Ketentuan Pelak- sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Unsur Pemerintahan dalam Bidang Keperawatan kepada Daerah Tingkat I ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam Bidang Keperawatan Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN KEPADA DAERAH TINGKAT II GOWA.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa ;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa ;
- f. Penyerahan Urusan adalah tindakan pemberian otonomi kepada Daerah dalam bentuk hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan dan atau kegiatan-kegiatan Pemerintahan tertentu oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II dan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Lingkungannya ;
- g. Urusan Rumah Tangga Daerah adalah Urusan dan atau kegiatan Pemerintahan

tertentu yang dengan Peraturan Penundang-undangan diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah ;

- h. Tiuk Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan urusan otonomi pada Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan yang dinamis antara hak, wewenang dan kewajiban bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 2

Urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I meliputi Bidang-bidang Kehutanan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Pertambangan, Keperawatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tenaga Kerja.

BAB II

JENIS DAN PERINCIAN URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 3

Jenis dan perincian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I di Bidang Kehutanan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Penjualan dan Peredaran Hasil Hutan.
2. Perlindungan Hutan.

Pasal 4

Jenis dan Perincian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pemeliharaan atas :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Tingkat I dan Ibukota Daerah Tingkat II (Jalan Negara) ;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antara Ibukota Daerah

Umum Cipta Karya yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan ;
2. Pembinaan atas pengaliran dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung ;
3. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis ;
4. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih ;
5. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Jenis dan Perincian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I di Bidang Pertambangan Golongan C yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Urusan pemerintahan yang diserahkan meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sepanjang tidak terletak dilepas pantai darat/atau pengusahannya dilakukan dalam rangka penanaman Modal Asing.
- b. Urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud huruf a diatas meliputi jenis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan terhadap jenis-jenis bahan galian :
 - 1) Pasir ;
 - 2) Andesit ;
 - 3) Tanah Urug ;
 - 4) Tanah Liat ;
 - 5) Bau Kapur (uniuk pertanian) ;
 - 6) Sirtu.

Pasal 8

Jenis dan Perincian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I di Bidang Kepariwisata

Tingkat II :

- c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai Strategis terhadap Kepentingan Daerah Tingkat II.
2. Penetapan status sebagai jalan kabupaten atas :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk kelompok Jalan Nasional dan Kelompok Jalan Propinsi ;
 - b. Jalan Lokal Primer ;
 - c. Jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok Jalan Nasional dan kelompok Jalan Propinsi ;
 - d. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a, b dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

Jenis dan Perincian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I dibidang Pekerjaan Umum Pengaliran yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pelaksanaan Penyediaan Air Irigasi berdasarkan Perencanaan yang telah ditetapkan ;
2. Pemberian izin penggunaan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi ;
3. Penetapan Masa Irigasi untuk setiap Daerah Irigasi dan dalam rangka pembagian dan pemberian Air secara tepat guna ;
4. Penetapan Prioritas pembagian Air Irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat ;
5. Pelaksanaan Eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada Saluran Percolohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap ;
6. Perizinan untuk mengadakan dan/atau pembongkaran Irigasi maupun bangunan pelengkapya.

Pasal 6

Jenis dan Perincian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I di Bidang Pekerjaan

Kerja yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kesejahteraan Buruh ;
- b. Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 11

Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan Rumah Tangga Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dengan berpedoman kepada Peraturan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini, Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

taan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Urusan obyek wisata sepanjang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat ;
- b. Urusan Losmen ;
- c. Urusan Peningkatan Remaja ;
- d. Urusan Pondok Wisata ;
- e. Urusan Perkemahan ;
- f. Urusan Rumah Makan ;
- g. Urusan Bar ;
- h. Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 9

Jenis dan Perincian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pengadaan, penetapan pencampatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di Jalan Propinsi dalam Wilayah Daerah Tingkat II.
2. Penetapan Peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor.
3. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi :
 - a. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan sumpunya.
 - b. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.
5. Penunjukan lokasi, pengontrolan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan Bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus Angkutan Bersenjata.

Pasal 10

Jenis dan Perincian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I di Bidang Tenaga

**BAB V
PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN**

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II pada saat pelaksanaan penyerahan, maka sumber pembiayaan dan kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak diserahkan menjadi kekayaan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 15

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I untuk membiayai urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diserahkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 16

Segala pungutan terhadap urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II, diurus dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Tata cara penyerahan pembiayaan dan kekayaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

(1) Selama penyerahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penyelenggaraan

urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini. Peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Dengan dibentuknya Dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Daerah Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II dinyatakan hapus.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang telah menjadi wewenangnya melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 21

Apabila urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menghentikan untuk menarik kembali.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memintakan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
I Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di : Ujung Pandang
Pada Tanggal : 29 Maret 1995

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN
WAKIL KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
SULAWESI SELATAN

Cap / tud

Cap / tud

II. ALIM RACHRIE

H. Z. B. PALAGUNA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor 118 / 266
Tanggal 25 April 1995.

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 3
Tanggal 1 Mei 1995 Seri D Nomor 3
(Tambahan Lembaran Daerah No. 117).

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttid

Drs. H.A. BAKRI TANDARAMANG

Pangkat : Pembina Utama
N I P : 010 042 544

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
NOMOR 117**

PENJELASAN
ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TINGKAT I SULAWESI SELATAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II GOWA**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pembangunan Nasional disegala bidang
senantiasa berupaya menggalih dan mengembangkan sumber daya alam karunia
Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan Rakyat Indonesia,
khususnya masyarakat Sulawesi Selatan.

Bahwa titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II mengandung
arti bahwa sebagian besar dari jumlah dan jenis urusan Pemerintahan berada
pada Daerah Tingkat II dan diurus sebagai urusan rumah tangganya. Penyerahan
urusan Pemerintahan kepada Daerah Tingkat II karena kemungkinan kemam-
puan, keadaan maupun kebutuhan Daerah harus diukur dan ditentukan melalui
upaya penelitian dan penilaian secara obyektif, sehingga penyerahan urusan
tersebut benar-benar disertai dengan keyakinan bahwa urusan yang diserahkan
itu dapat diselenggarakan dengan penuhi rasa tanggung jawab.

Sulawesi Selatan yang memiliki sumber daya alam dan aneka corak seni
budaya masyarakat yang tersebar merata pada seluruh Daerah Tingkat II, perlu
dikembangkan, dibina dan dikelola secara konsepsional agar dapat secara optimal
membankan dukungan bagi kelanjutan Pembangunan di Daerah ini.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7, 8, 9

dan 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyerahan Otonomi Daerah dengan lirik berat pada Daerah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan memandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa sebagai pelaksanaan proyek percontohan otonomi Daerah dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab agar pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan potensi yang ada di Daerah Tingkat II Gowa dapat dilaksanakan secara terarah dan berencana agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat

Untuk memenuhi prosedur sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf b : Andcsit meliputi jenis batuan seperti :

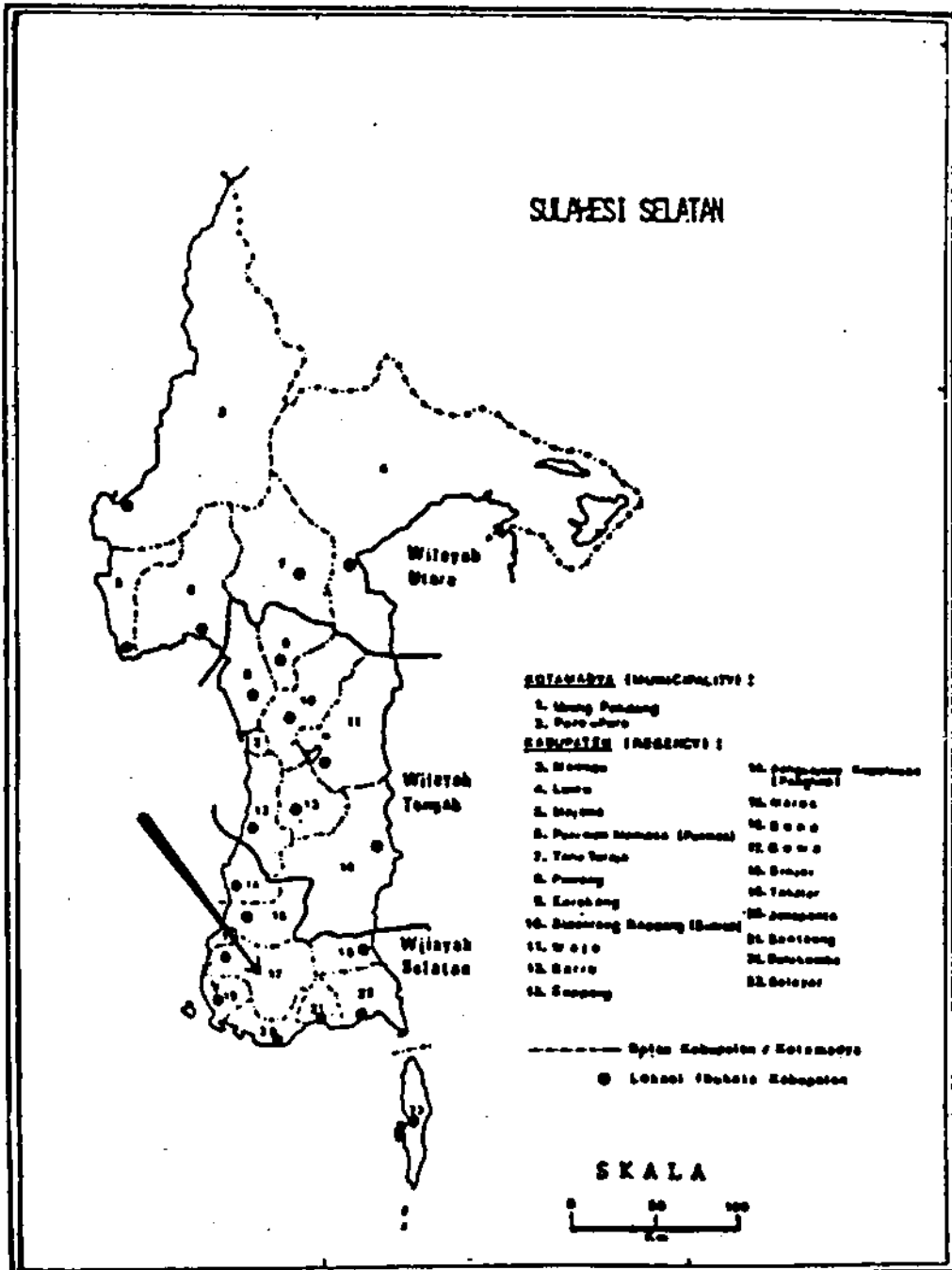
Batu kali, batu kerikil, batu gunung dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur mineral lainnya.

Pasal 8 huruf b : unsur losmen atau disebut juga hotel dengan Tanda Bunga Melati.

Pasal 9 s/d 23 : Cukup jelas.

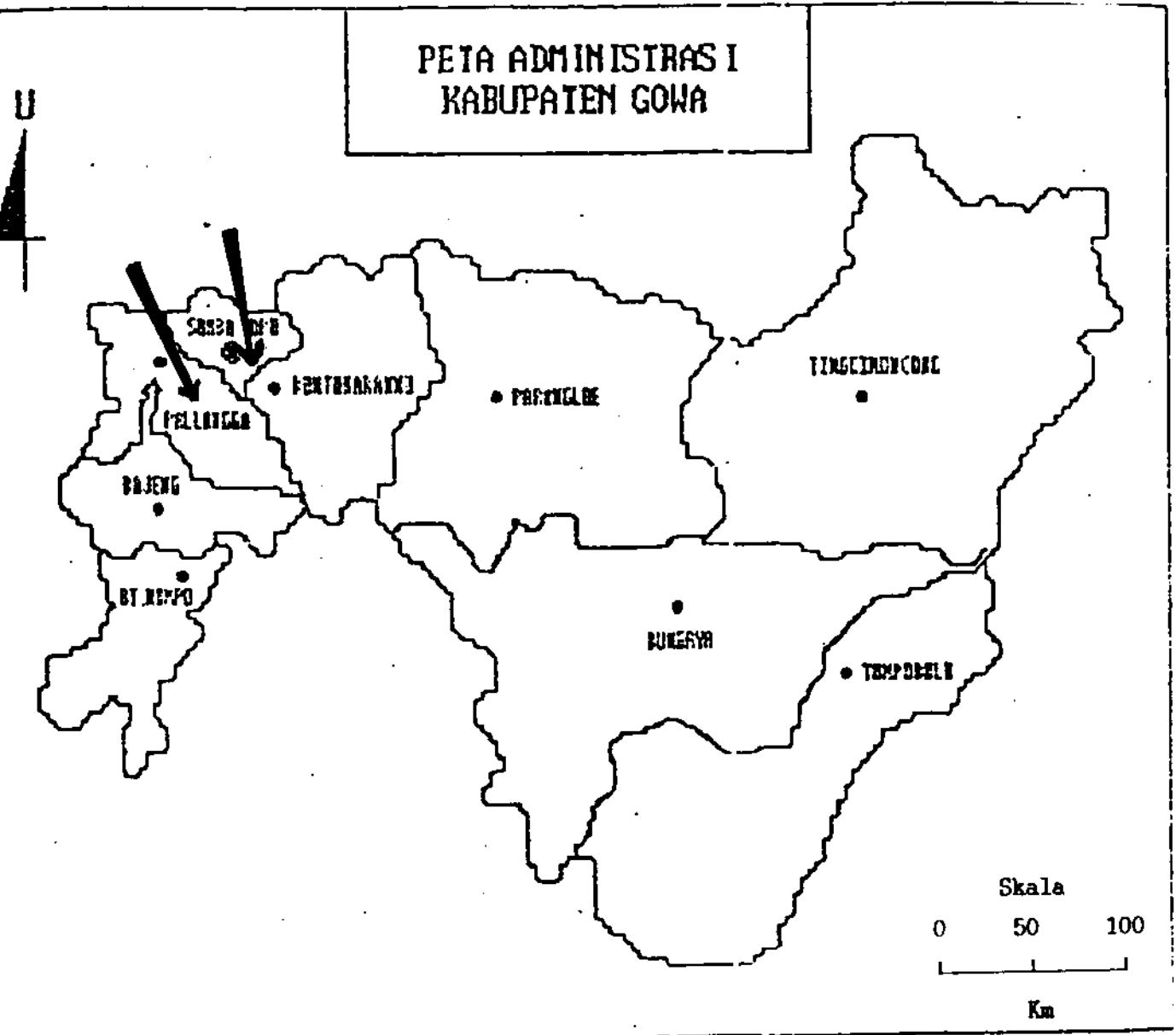
Lampiran 2

SULAWESI SELATAN



→ : Lokasi Penelitian

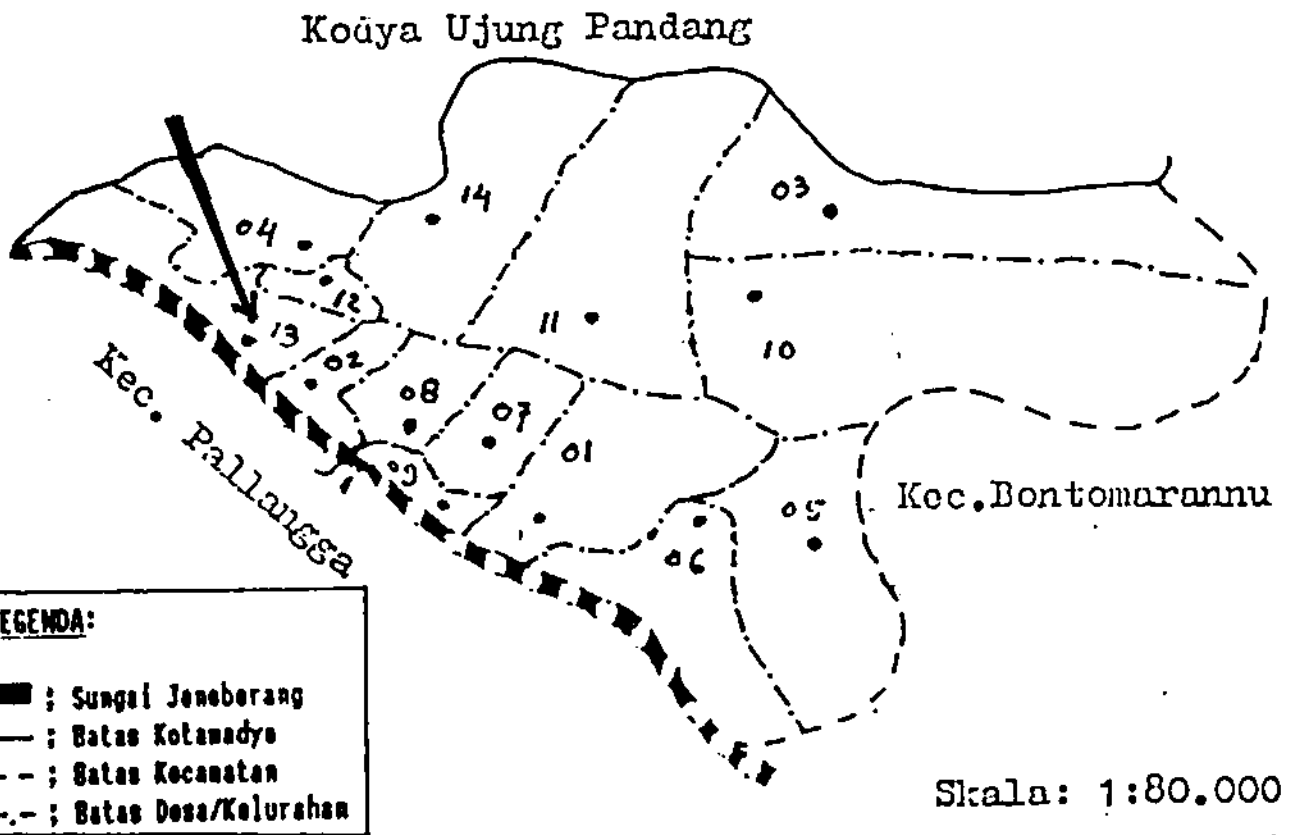
KABUPATEN GOWA



→ : Lokasi Penelitian

KECAMATAN SOMBA OPU

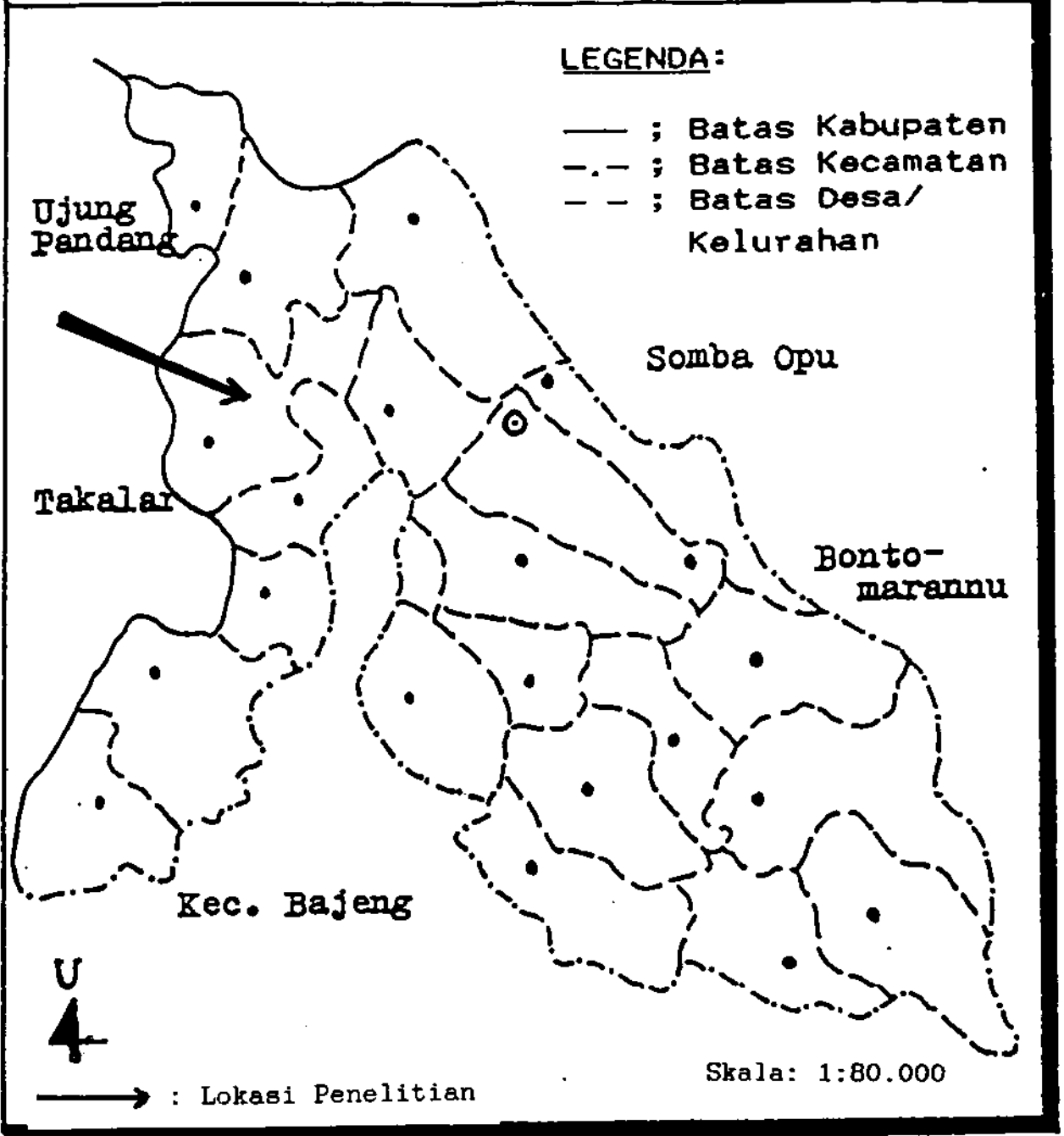
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SOMBA OPU



→ : Lokasi Penelitian

KECAMATAN PALLANGGA

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN PALLANGGA





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

207

Jl. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 5310076, 5353715, 5350170, FAX. (031) 5310076

Lampiran 6

Nomor : 1812 /J03.11/PP/1996
Lamp :
Hal : Izin untuk melaksanakan penelitian

16 Juli 1996

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Jawa Timur
U.p. Direktorat Sosial Politik
Jl. Putat Indah No. 1
Surabaya - 60189

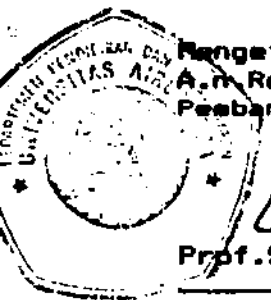
Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta program Magister angkatan tahun 1994/1995 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

n a m a : Andi Samsu Alam, Drs.
n i m : 099411720 / M
j u d u l : EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT WAR-
GA MASYARAKAT LOKAL (Studi Tentang
Interpretatif Warga Masyarakat Lokal
Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Kabupaten Dati II Gowa Sulawesi
Selatan.

pembimbing ketua : A.Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.

maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Daerah Tingkat II Bowa Sulawesi Selatan.

Demikian dan atas bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Mengetahui
A.n. Rektor
Pembantu Rektor I,

Prof. Soedarto, dr, DTM&H, Ph.D

NIP. 130350713

TESIS



Rektor,

Prof. Dr. H. Soedijono, dr.

NIP. 130261504

EKSISTENSI OTONOMI DAERAH....

ANDI SAMSU ALAM

Nomor : 072/3383/303/1996
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey
- Research

Surabaya 23 JULI 1996

Kepada:

Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SULAWESI SELATAN

DI - UJUNG PANDANG

KADIT SOSPOL

U.P.

Menunjuk Surat **DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNAIR SURABAYA.**

tanggal : 16 JULI 1996
nomor : 1812/J03.11/PP/1996

Bersama ini diberitahukan bahwa

Nama : **ANDI SAMSU ALAM, DRS**
Alamat : **JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA.**
Pekerjaan : **MAHASISWA PASCASARJANA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " **EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT PERSEPSI
WARGA MASYARAKAT LOKAL** ".
(Studi kasus pada dua desa di Kab.Gowa Sul Sel).

Waktu : **7 (TUJUH) BULAN**

Lokasi : **PROP. SULAWESI SELATAN.**

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

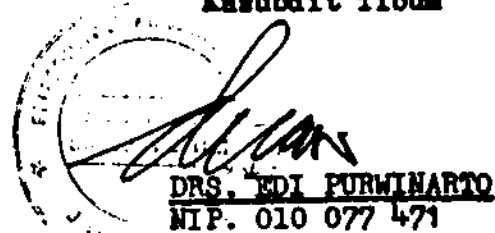
Kepala Direktorat Sosial Politik
u.b.
Kasubdit Tibum

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
 2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
 3. Sdr. Kelua Bappeda Prop. Jatim
 4. Sdr. Yang bersangkutan
 5. Sdr. **REKTOR UNAIR SURABAYA**

TESIS

EKSISTENSI OTONOMI DAERAH....


DRS. EDI PURWINARTO
NIP. 010 077 471

ANDI SAMSU ALAM

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

209

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453046
UJUNG PANDANG (90231)

Nomor : 070/3967 -TV/DSI/96.

Ujung Pandang, 21 Agustus 1996.

Sifat : Biasa

Lampiran :

K e p a d a

Perihal : Permohonan Penelitian

Yth. BUPATI KDH TK II GOWA

Dr. KEPALA KANTOR SOSPOL

Di -

Simpangwasa

Berdasarkan Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Dati I Jawa -
Timor No. 077/3323/103/1996 tanggal 21 Juli 1996,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. ANDY SAMST ALAM
Tempat/tanggal lahir : Sidrap, 17 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki - Laki
Instansi/pekerjaan : Mah. Program Pascasarjana IKATR Sarabaya
A l a m a t : Jl. Dharmajaya Dalam Selatan Sarabaya.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara
dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul :
"EKSTENSIF OTONOMI DAERAH MENYIKAP PERSEPSI WARGA MASYARAKAT LOKAL".
(Studi Kasus pada dua Desa di Kab. Gowa Sul-sel).

S e l a m a : 7 (tujuh) bulan s/d 31 Maret 1997

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat
menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDH TK II Up.Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan kan Adat-Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "REKSTENSIF" kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Selatan Up.Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

Tembusan :

1. Miter Sosial Perwari di Jkt.
2. Gub. Kdh Tk. I Sulsel (Sbe.lan).
3. Ketua Bekerjasama Salmesi.
4. Kapolda Sulselra.
5. Kasidat Pembid. Wil. III di UP.
6. Gub. Kdh Tk. I Jawa Timur
7. Dr. Kadit Sospol di Sarabaya.
8. Dr. Program Pascasarjana IKATR
9. Kadit Sospol Prop. Sulawesi
10. Up. Kasubdit III (Sbe.han.lan).
9. Dr. Andi Samsu Alam.
10. A - - -

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
di
KEPALA SUBDIT PERGAMINAN

PERDA NO 3 TH 1996



HARYADI

ANDI SAMSU ALAM

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
KANTOR SOSIAL POLITIK

210

Jln. Mesjid Raya No. Telp. (0411) 861178 Sungguminasa

Sungguminasa, 26 Juli 1996

K e p a d a

Noor : 070/226/KSP/1996
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

- Yth. 1. Bupati KDH Tingkat II Gowa
2. Ketua DPRD Tingkat II Gowa
3. Ketua Bappaeda Tingkat II Gowa
4. Kepala Dinas P & K Kab. Gowa
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa
6. Kepala Dinas Kebersihan Kab. Gowa
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gowa
8. Kepala Dinas Tata Kota Kab. Gowa
9. Kepala Biro Pusat Statistik Kab Gowa
10. Bagian Otonomi Daerah KDH. Gowa
11. Warga Masyarakat kel. Pandang-Pandang
Kecamatan Somba Opu
12. Warga Masyarakat Desa Je'ne Tallasa
Kecamatan Pallangga

Masing-masing di -
T e m p a t

Menunjuk Surat Direktorat Sespol Prop. Dati I Sul Sel No. 070/3967-IV/DSP.96 tanggal 21 Agustus 1996, sebagai realisasi Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Jawa Timur No. 072/3383/303/1996 tanggal 23 Juli 1996.

Bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa oknum tersebut dibawah ini :

N a m a : Drs. ANDI SAMSU ALAM
Tempat/tgl lahir : Sidrap, 17 Juli 1964
Instansi/pekerjaan : Mah. Program Pascasarjana UNAIR Surabaya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya

Bermaksud akan mengadakan Penelitian diWilayah/ tempat saudara dalam rangka Penyusunan Tesis dengan judul : "EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT PERSEPSI WARGA MASYARAKAT LOKAL". (Studi Kasus pada dua Desa di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan).

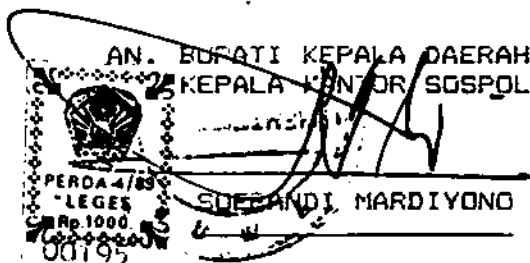
S e l a m a : 7 (Tujuh) bulan s/d 21 Maret 1997
Pengikut/anggota team : Tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
2. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Gubernur KDH TK I Sul Sel Cq. Kadit Sospol dan 1 (satu) berkas yang sama kepada Bupati KDH TK II Gowa Cq. Kepala Kantor Sospol.

Untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud kepada saudara diharapkan dapat memberi bantuan seperlunya.

Demikian untuk dimaklumi seperlunya.-



Tembusan :

1. Gub. KDH TK I Prop. Sul Sel
Cq. Kadit Sospol
2. Pembantu Gubernur Wil. III
3. Bupati KDH TK II Gowa (sbg lap)
4. Pembantu Bupati Wil. I & II
5. Muspida Tingkat II Gowa
6. Kepala Direktorat Sospol Prop. Dati
I Jawa Timur.
- ⑦ Sdr Drs ANDI SAMSU ALAM ✓
8. A. r. s. i. P.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU

212

Jln. Sirajuddin Rani No. 71 Telepon 866882
 SUNGGUMINASA

Sungguminasa, 04 SEPTEMBER 1996.

K o p e d a

Yth. LURAH FANDANG-PANDANG

di -

T E M P A T

Nomor : 070 / 16 / Pou.
 Lampiran :
 Perihal : IZIN PENELITIAN

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Kantor SOSPOL Kab Dati II Gowa, Nomor : -
 070/226/KSP/1996 Tanggal 26 JULI 1996

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa yang bersangkutan --
 tan :

N a m a : Drs. ANDI SAMSU ALAM

Tempat / Tgl. lahir : SIDRAP, 17 JULI 1954

Jenis Kelamin : PRIA

Instansi / Pekerjaan : MAH.PROGRAM PASCASARJANA UNAIR SURABAYA

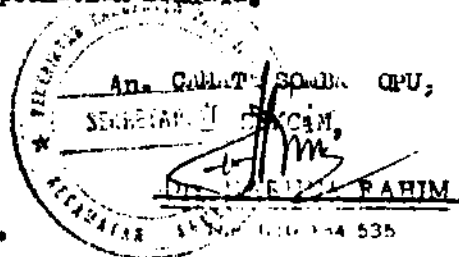
A l a m a t : JL.DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Wilayah / Tempat Saudara
 dalam rangka : Penyusunan Thesis dengan judul :
 "EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT PERSEPSI WARGA MASYARAKAT LOKAL "

S o l a m a : 7 (TUJUH) BULAN s/d 21 MARET 1997

Pengikut : -

Demikian untuk dimaklumi dan diketahui seperlunya, serta tak lupa
 kami ucapkan terima kasih atas perhatian Saudara.



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Gowa.
2. Yang bersangkutan.
3. A r s i p.-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II GOWA
KECAMATAN PALLANGGA

Cambaya, 5 SEPTEMBER 1996.

K e p a d a
Yth, Bupati D. da. S. Pallangga...
Di ...
... T e m p a t ,

NOMOR : 070/ /KP/1996
Perihal : IZIN PENELITIAN

Menyentuh Surat Bupati KDH, TK. II Gowa Nomor Sospol Kab. Gowa, Nomor: 070/235/KP/1996, Tanggal 26 Juli 1996. Perihal tersebut di atas sebagai realisasi Surat Gubernur KDH, TK. I Sel - Sel. Nomor: 0702/3383/303/1996, Tanggal 23 Juni 1996.

Bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa oknum tersebut ini :

N a m a : MRS. ANDI SAMSU ALAM
Tempat/Tanggal lahir : SIDRAP, 17 Juli 1966
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : MAH. HIRWAN MARGASARJANA UMAR SURABAYA
Alamat : JL. DEAHMANAKSA DALAM SELATAN SURABAYA

Bermaksud akan mengadakan Penelitian diwilayah/kantor saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi/..... dengan Judul :
• EKISTENSI OTONOMI DAERAH MENYUPEK PERSEKUTU WANJA MASYARAKAT LOKAL (Studi. Kasus pada di desa di Kecamatan Gowa Sel - Sel.).....

Selama : 7 (tuju) bulan s/d 21 Maret 1997
Pengikut / Anggota : Tidak ada

Pada Prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

- 1. Penelitian..... Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
- 2. Mentaati semua Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
- 3. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Cq. Kadit Sospol, 1 (satu) berkas pada Bupati KDH Tk. II Gowa Cq. Kantor Sospol dan 1 (satu) berkas yang sama pada Kantor Camat Pallangga.

Untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud kepada saudara diharapkan dapat memberi bantuan seperlunya.

Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya. -



- Tembusan :
- 1. Bupati Kepala Daerah Tk. II Gowa
 - 2. Muspika Pallangga
 - 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 - 4.

Lampiran 7

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 070/15/T.Pem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bupati Kepala Daerah, c.q. Asisten Tata Praja Setwilda Tingkat II Gowa menerangkan bahwa :

N a m a : Andi Samsu Alam, Drs.
No. Pokok : 099411720/M.
Program Studi : Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan thesis dengan judul :

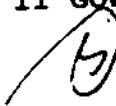
"EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT TANGGAPAN WARGA MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus Pada Dua Desa) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan)"

Pada tanggal 5 September sampai dengan 28 Desember 1996.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 28 Desember 1996

Bupati Kepala Daerah,
c.q. Asisten Tata Praja Setwilda
Tingkat II Gowa.


Drs. A. Yusni Mappanyulle

Pangkat : Pembina
NIP. : 580 008 435

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 12/KP/KLP-SC/KI1/1996

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menerangkan bahwa :

N a m a : Andi Samsu Alam, Drs.

No. Pokok : 099411720/M.

Program Studi : Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan thesis dengan judul :

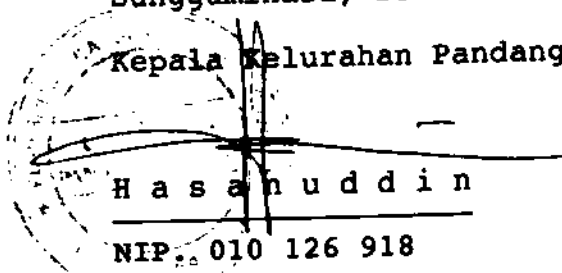
"EKSISTENSI OTONOMI DAERAH MENURUT TANGGAPAN WARGA MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus Pada Dua Desa) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan)"

Pada tanggal 5 September sampai dengan 28 Desember 1996.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 28 Desember 1996

Kepala Kelurahan Pandang-Pandang


Hasanuddin

NIP. 010 126 918

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 138 / Dj / X / 11 / 1997 .

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menerangkan bahwa :

N a m a : Andi Samsu Alam, Drs.
No. Pokok : 099411720/M.
Program Studi : Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan thesis dengan judul :
"EKSIStENSI OTONOMI DAERAH MENURUT TANGGAPAN WARGA MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus Pada Dua Desa) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Sulawesi Selatan)"

Pada tanggal 5 September sampai dengan 28 Desember 1996.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Je' ne Tallasa, 28 Desember 1996

Kepala Desa Je' ne Tallasa


Sultani H. DG. Ngiri